

POLITIK



bankriaukepri
by srikub mitra syariah terpercaya

Bagian 1

“lul-laby yang dalam kamus Oxford Advanced Learner’s diartikan sebagai a soft gentle song sing to make a child go to sleep. Jadi, betapa akan hancurnya masa depan masyarakat atau suatu komunitas bila ia hanya akan menjadi terlelap oleh pencitraan–pencitraan yang dilakukan para pemimpin atau pun calon–calon pemimpin mereka”

ANGGARAN LUL-LABY

Dewasa ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah yang sama sekali bertolak belakang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan itu sendiri. Bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menyebabkan masyarakat justru terdegradasi secara mental dan melemah dorongan keinginannya untuk menggapai prestasi dan mengubah kehidupannya dari serba kekurangan menjadi serba berkecukupan. Dalam istilah politik saat ini dikenal sebagai tebar pesona. Artinya, pejabat menyambangi rakyat dengan berbagai bantuan dan mengisi banyak sekali kegiatan yang hanya bersifat seremonial belaka.

Kegiatan tersebut sering dimulai dari menghidupkan kembali acara-acara tradisi di kampung dimana masyarakat bermukim, maupun acara-acara yang sengaja diciptakan untuk mengumpulkan masyarakat dan dengan berlagak sebagai seorang dermawan para pejabat maupun politisi memberi secuil bantuan sehingga rakyat pun terpesona. Kalau pun berbagai bantuan tersebut berasal dari kantong pribadi tindakan itu jelas hanya membuat rakyat ternina-bobokkan. Inilah yang dinamakan

lul-laby yang dalam kamus Oxford Advanced Learner's diartikan sebagai a soft gentle song sing to make a child go to sleep. Jadi, betapa akan hancurnya masa depan masyarakat atau suatu komunitas bila ia hanya akan menjadi terlelap oleh pencitraan-pencitraan yang dilakukan para pemimpin atau pun calon-calon pemimpin mereka.

Berlarut-larutnya penetapan APBD di beberapa kabupaten/kota di Riau dan kusut-muyutnya penganggaran daerah di tingkat provinsi ternyata mengindikasikan adanya upaya-upaya memperbesar dan memperluas anggaran lul-laby tersebut. Berbagai nama di kemas untuk melegitimasi sehingga dana-dana aspirasi bagi politisi ini dapat dianggarkan. Di seputaran eksekutif mata anggarannya dipoles sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan rakyat. Bantuan rumah ibadah, pembangunan rumah layak huni, bantuan bibit, bantuan operasional dan hibah-hibah ke berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Semua itu ternyata telah membuat masyarakat lupa bahwa mereka berhak mendapatkan pengelolaan lingkungan yang menopang kualitas kehidupan mereka. Rakyat wajib menerima pelayanan-pelayanan dasar yang berkualitas dan antisipatif terhadap perkembangan zaman, seperti pendidikan yang bermutu, kesehatan yang prima, perekonomian yang tumbuh dan aktualisasi diri yang tak terpasung.

Kini, setelah mendapatkan berbagai hibah dan bantuan tersebut mereka belum juga terjaga karena anggaran-anggaran lul-laby tersebut masih tersedia dananya dan bahkan semakin membengkak. Di Provinsi Riau saja jumlahnya konon mencapai Rp 1,3 triliun. Anggaran sebesar itu di Korea Selatan digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya sebesar 54 MGT. Kita lebih menginginkan ada ambulan di setiap desa, diberi baju seragam sekolah, dikilapkan rumah-rumah ibadahnya dengan keramik dan berbagai ukiran walaupun sepi dari umat yang beribadah. Sering kita melupakan untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat dorongan nafsu kita untuk mencukupi keinginan-keinginan sesaat. Biarlah listrik kita tak menyala asal pesta kampung tetap terselenggara. Tak perlu ada air bersih asal hibah-hibah masih ada.

Kemelencengan desentralisasi fiskal seperti ini pernah dialami negara lain seperti Phillipina dan Rusia. Negara Phillipina pernah terperangkap oleh eforia otonomi dengan menggunakan dana-dana negara untuk menyelenggarakan berbagai pesta kampung. Dalam jangka pendek rakyat seperti terhiburkan. Mereka menganggap pemerintah telah memberikan perhatian dengan mencurahkan dana untuk membantu pesta-pesta rakyat diberbagai pelosok kecamatan dan desa. Untunglah kemudian banyak ahli dan peneliti mengingatkan bahwa sumberdaya keuangan tersebut harus lebih diarahkan pemanfaatannya pada sektor-sektor produktif dalam kehidupan masyarakat. Bukannya makin mendorong rakyat untuk kian konsumtif dan tergantung pada anggaran yang lul-laby tersebut.

Di Riau memang belum ada kajian ataupun penelitian tentang berapa prosentase anggaran yang dapat dikategorikan merupakan anggaran lul-laby rakyat. Selain sudah tersedot untuk memenuhi pelayanan birokrasi anggaran daerah di provinsi dan kabupaten/kota di Riau tidak sedikit pula yang bernuansa lul-laby. Lambatnya pengesahan APBD di legislatif ditengarai adanya tarik-menarik untuk membengkakkan anggaran lul-laby ini. Bentuknya macam-macam dan semuanya sangat signifikan berhubungan dengan kepentingan pemilihan umum 2014. Sunngguh memprihatinkan bila semua itu dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal muara dari program dan kegiatan seperti itu hanyalah akan membuat rakyat terlelap dan kehilangan kesempatan untuk maju dan berkembang. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang dulunya mereka justru berguru kepada kita maka saat ini kita sudah tertinggal lima puluh tahun ke belakang.

Persoalan anggaran lul-laby ini tentu tak semestinya dibiarkan berlarut-larut. Eksekutif sering tak mau repot menghadapi politisasi hak budget legislatif. Untuk mengurangi tekanan itu tidak jarang mereka mencoba menawarkan berbagai program pembangunan yang dibiayai melalui multi-years. Strategi ini digunakan untuk mengunci anggaran pada tahun-tahun selanjutnya karena perdebatannya ketika akan mengesahkan APBD akan berkurang. Pada tahap awal mungkin

perlu perjuangan ekstra ketat. Dukungan sumberdaya manusia yang lebih memadai pada level eksekutif untuk memberikan alasan-alasan pembenaran membuat program-program multi-years tersebut pada akhirnya dapat disetujui.

Sayangnya Mendagri atau pun pemerintah provinsi dalam melakukan verifikasi tidak pula mau dan mampu berbuat banyak untuk menjernihkannya sehingga uang rakyat dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup rakyat secara berkesinambungan. Selayaknya tim yang melakukan verifikasi tersebut dibentuk secara independen dan multi-pihak agar rasionalisasinya memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan azas penganggaran negara. Perlu ada revisi dalam ketentuan yang mengatur hak budget di legislatif, khususnya pada tingkat kabupaten agar politik anggaran yang seharusnya diarahkan pada optimalisasi pemenuhan kebutuhan rakyat tidak berubah arah menjadi politisasi anggaran yang menina-bobokkan masyarakat demi kepentingan para politisi itu sendiri.

APBD pada level kabupaten harus benar-benar diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pada level provinsi lebih dominan pada bagaimana menjalin hubungan keterkaitan antar kabupaten/kota membangun gedung sekolah maka provinsi masuk dalam penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas atau memoles kapalitas dan kompetensi guru. Demikian pula halnya dalam aspek ekonomi dan pembangunan sosial lainnya. Pemerintah pusat sebaiknya hanya turun tangan di daerah untuk tiga hal utama, yakni perbaikan transportasi antar wilayah provinsi, penyediaan listrik dan air bersih serta dorongan produksi dan stabilitas ketersediaan pangan. Pembangunan dibidang yang menjadi kewenangan pusat seperti moneter dan lainnya dilakukan secara tersentralisasi saja.

Keinginan untuk mengunci anggaran agar mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebenarnya sudah dimulai melalui adanya ketentuan agar anggaran diperuntukkan sebesar dua puluh persen untuk pendidikan dan lima persen untuk kesehatan. Hanya saja kebijakan ini kurang memadai dan masih perlu pemberdayaan di berbagai daerah dalam mengimplementasikannya. Anggaran lul-laby

masih bergentayangan ditengah-tengah masyarakat karena secara politik hal kabupaten/kota dan mengisi ruang kosong yang belum mampu dilakukan kabupaten/kota dalam aspek pemberdayaan dan keterampilan masyarakat. Kalau

tersebut sangat mungkin dilakukan. Belum ada instrumen yang memadai untuk dapat mengukur kualitas APBD yang dihasilkan suatu daerah sehingga pbenarannya masih bersifat kesepakatan yang minim standardisasi.

*“sindrom inkontinensi
(incontinence syndrome) yang
menunjukkan suatu gejala
ketidakmampuan akal sehat
seseorang mengontrol naluri
dasar manusia yang cenderung
mengumbar kenikmatan ragawi
sehingga yang bersangkutan gagal
mencapai nilai kehidupan yang
lebih tinggi.”*

RIAU KIAN LULUH LANTAK ?

Berkah otonomi yang tercurah ke Riau sempena perubahan paradigma pemerintahan Indonesia telah dapat dinikmati dalam dua hal utama. Pertama, membesarnya anggaran yang didesentralisasi ke daerah dengan kewenangan menggunakannya yang cukup fleksibel. Dana-dana ini diperoleh sebahagian besar dari dana bagi hasil sumber daya alam. Daerah-daerah penghasil migas mendapat dana berlimpah yang dapat digunakan sesuai kehendak daerah.

Kedua, kewenangan pimpinan daerah mengatur dan menetapkan aparaturnya sehingga memungkinkan untuk membangun gerbong birokrasi yang dapat diarahkan bagi mencapai visi dan misi daerah. Bupati dan Gubernur dapat menunjuk orang yang dia kehendaki menjadi kepala dinas untuk menjalankan program guna merealisasikan janji-janji yang disampaikannya dalam proses pemilihan kepala daerah. Ketika ia memenangkan pilkada maka ada kesempatan untuk mewujudkan impian dan harapan-harapan yang telah ditaburkannya pada masyarakat dengan tersedianya dana dan sumber daya manusia yang mampu ia kendalikan dan arahkan.

Apa yang terbayang dari perspektif otonomi daerah ini adalah

kesejahteraan rakyat yang meningkat dan berkesinambungan karena daerah memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri proses dan capaian-capaian pembangunannya. Namun dibalik semua itu mengikut pula risiko-risiko yang tidak kecil. Bila daerah tak mampu mengelola pembangunan diwilayahnya maka bakal mencuat ego kedaerahan yang tak berdasar, raja-raja kecil yang sok kuasa. Tergadainya sumberdaya alam dan luluh lantaknya ranah hidup rakyat akibat eksploitasi yang tak beraturan.

Dana yang semula sedianya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kini tertabur sia-sia. Banyak kerja-kerja mubazir yang ditaja atas nama kepentingan rakyat. Berhala-berhala modern ditegakkan dan secara massif menghisap uang rakyat. Hutan-hutan dikelupaskan untuk kepentingan pemburu rente. Jalan-jalan rusak dan terbengkalai. Manipulasi merebak dengan berbungkuskan pemberantasan kemiskinan. Riau menjadi contoh konkrit dari melencengnya mimpi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemimpin-pemimpinnya keranjingan berpesta pora dan berfoya-foya melancong keluar negeri.

Atas nama pembangunan kehidupan rakyat di hari esok digagas berbagai kegiatan yang sesungguhnya justru malah merezam hari depan anak cucu. Kita jadi sangat terperanjat ketika uang mencapai lima milyar yang dipakai bagi pembangunan pabrik biodiesel malah menjadi penghasil “tuak” yang meluluh-lantakkan masa depan anak cucu. Uang rakyat terkuras hanya untuk merebakkan sumber maksiat. Atas nama kemaslahatan masa depan justru kita mejejali ana cucu dengan racun-racun penghancur harapan dan kehidupan kelak.

Berdiri bulu roma ketika kita menengarai banyaknya dana yang harus dikorbankan untuk program berlabel OPRM. Program ini ditaja untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Sawah-sawah baru akan dicetak dan sawah-sawah lama akan dipulihkan semula. Riau yang selama ini menjadi pengimpor beras dan kebutuhan pokok lainnya melalui Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) akan disulap menjadi penghasil padi-padian dan jagung. Namun, mimpi ini memang benar-benar sebuah mimpi dan tak kunjung jadi kenyataan. Lahan-lahan

OPRM justru tak berubah dari semak belukar. Jangankan menjadi penghasil beras, ilalang pun enggan menguak. Lahan masih semak dan hutan belantara. Dana pembangunan tentunya sudah banyak tercurah. Hasilnya kian jauh panggang dari api.

Pola-pola pembangunan yang mengedepankan kesia-siaan semata juga tampak dari pembangunan berbagai gedung pemerintah dan fasilitas lain di Riau. Terminal Agribisnis Dumai menjadi gedung bersarangnya kambing liar. Harapan menjadi pintu gerbang ekspor hanyalah pepesan kosong belaka. Bahkan pelabuhan Ro-Ro Dumai Malaka menjadi saksi baru betapa melencengnya pembangunan yang ditaja Riau dari kepentingan masa depan rakyat. Akhir-akhir ini Riau juga digerogeti oleh helat-helat besar yang tak bertalian dengan kemaslahatan rakyat.

Nampaknya para pemimpin di Riau ini (J.Kristiadi:2010) telah terjebak dalam

sindrom inkontinensi (incontinence syndrome) yang menunjukkan suatu gejala ketidakmampuan akal sehat seseorang mengontrol naluri dasar manusia yang cenderung mengumbar kenikmatan ragawi sehingga yang bersangkutan gagal mencapai nilai kehidupan yang lebih tinggi.

Sindrom ini mengakibatkan para pemimpin di negeri ini kedap terhadap suara dan jeritan hati rakyat. Bahkan mereka telah mati rasa. Empatinya sudah tumpul dan gemilang kemewahan yang selama ini dinikmati semakin meningkatkan ketidak mampuan mereka mengontrol naluri ketamakan dan keangkaramurkaan.

Begitu banyak dana yang harus dikorbankan Riau hanya untuk menyelenggarakan sebuah pesta olah raga berlabel PON. Pengalaman penyelenggaraan MTQ nasional di Riau sebenarnya menjadi tempat berkaca. Bangunan-bangunan purna MTQ menjadi mubazir dan rakyat tak merasakan manfaat dari penyelenggaraan even-even tersebut. Hanya untuk menunjang proses penyelenggaraan PON Riau harus mengorbankan dana Rp 787 milyar. Ini jelas-jelas akan membuat semakin tak seimbang struktur APBD Riau. Keadaan ini dapat dibaca dari Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Riau

Tahun anggaran 2011 dimana banyak SKPD yang tak memiliki kegiatan berarti tetapi harus mengeluarkan biaya pegawai yang sangat besar.

Kesalahan lain dalam strategi pembangunan Riau sejak delapan tahun terakhir adalah pendekatannya yang sangat urban bias. Pertumbuhan kota meningkat sedangkan wilayah pedesaan menjadi kian tertinggal. Industrialisasi terfokus di perkotaan sementara pembangunan pertanian di pedesaan terabaikan. Akibatnya urbanisasi meningkat dan persoalan-persoalan social semakin mengemuka dan bahkan kian sulit dikendalikan.

Problema perekonomian rakyat saat ini masih terbelenggu oleh kapasitas infrastruktur yang buruk, perlindungan social yang rendah, keberpihakan yang tidak memadai, kepastian usaha yang tidak jelas dan etika usaha yang memalukan. Oleh karena itu kualitas pertumbuhan ekonomi Riau tidak kian membaik. Sejak tahun 2006 pertumbuhannya pun makin melemah. Usaha-usaha rakyat seperti mengalami sindrom mayat berjalan (*dead-man walking syndrome*). Mereka terjebak pada kenangan masa lalu, tak jelas focus usaha dan pasar yang harus dilayani, proses bisnisnya kian using dan strateginya tidak memiliki keterkaitan dengan birokrasi usahanya sehingga Nampak kaku dan lamban merespon perkembangan eksternal.

Kedepan pemutarbalikan keadaan ini menjadi penting dan mendesak. Kesadaran akan habisnya sumberdaya yang tak terbaharukan harus kian ditanamkan. Riau tak mungkin bertahan dengan program-program yang tak masuk akal dan masih sangat erat dengan kepentingan-kepentingan kolusi dan nepotisme. Cara-cara yang tak berdasarkan kajian yang memadai harus dikesampingkan. Riau harus mampu menaja karya-karya kreatif yang dekat dan erat dengan proses pemberdayaan rakyat. Tanpa itu Riau akan semakin luluh lantak dan terpinggirkan.

Menurut Maria Hartinisngsih (2010:15) keberlangsungan hidup dan kehidupan hanya bisa diciptakan dengan menjaga, melindungi, dan memelihara secara bersama-sama ruang-ruang hidup. Kesadaran akan pengelolaan bersama ruang hidup membuat keberadaban dan

keadilan sebagai nilai-nilai yang menyatu dalam diri warga. Kalau demikian maka dalam proses pembangunan yang diselenggarakan di Riau hendaklah mengedepankan partisipasi dan kebersamaan. Memupuk semangat dan keterlibatan rakyat menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar dalam satu bingkai kebersamaan yang adil dan saling mnyejahterakan. Semoga....!!!



“...Mencengangkan sekali penjelasan yang dilontarkan salah seorang pejabat perencana pembangunan Riau (Riau Pos, 31/1/2011) yang menyatakan bahwa 60 persen jalan di Riau dalam kondisi rusak, baik parah maupun rusak ringan...”

JALAN RIAU RUSAK PARAH; SIAPA SALAH ?

Tanpa terasa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun di Indonesia. Walau belum seperti yang diimpikan banyak orang dan dilayakkan para ahli, implementasi otonomi daerah telah memberi peluang yang cukup besar bagi rakyat untuk menikmati pembangunan. Sekaligus ikut serta menentukan dan melakukan program pembangunan tersebut.

Dua sumber yang memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, proses politik yang berubah sangat cepat member kesempatan putra-putra daerah untuk memegang tampuk kepemimpinan daerah dan dengan kekuasaan serta kewenangan yang cukup kuat. Dibarengi pula dengan system pemilihan secara langsung sehingga secara normative akan ditemukan pemimpin yang tidak saja memahami karakteristik daerah tetapi juga berkomitmen teguh memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerahnya dengan legitimasi masyarakat tempatan yang kuat.

Kedua, adanya kewenangan yang besar pada pimpinan daerah yang dominansinya terletak di DPRD dalam menentukan program dan anggaran pembangunan. Ini secara teoritis akan menempatkan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan disuatu daerah. Anggota legislative adalah wakil-wakil rakyat yang seharusnya bersikukuh mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok politiknya. Kerangka pemikiran yang terbentuk haruslah mengedepankan kemajuan-kemajuan masyarakat dalam aspek pelayanan yang prima dan terselenggaranya dinamika kehidupan yang layak secara berkesinambungan.

Apakah kerangka normative dan kaidah teoritis tersebut telah terjadi setelah lebih sepuluh tahun otonomi daerah berjalan ? Riau merupakan contoh menarik yang tentunya patut menjadi bahan pelajaran dan kajian secara sistematis. Data di Riau sepertinya membunyikan makna bahwa kerangka normative dan kaidah teoritis tersebut tidaklah berkesesuaian dengan fakta empiris yang ada dilapangan.

Mencengangkan sekali penjelasan yang dilontarkan salah seorang pejabat perencana pembangunan Riau (Riau Pos, 31/1/2011) yang menyatakan bahwa 60 persen jalan di Riau dalam kondisi rusak, baik parah maupun rusak ringan.

Kerusakan jalan pada umumnya merata di Riau dan Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki kerusakan terbanyak. Kerusakan dipicu oleh kualitas jalan yang tidak sesuai dengan tonase pemakai jalan. Ketidakcocokan mutu jalan yang dibangun dengan kendaraan yang dilaluinya. Namun ini menandakan perekonomian daerah berjalan dan kian berkembang.

Logika aparatur seperti ini tentunya mungkin akan berbeda dengan logika para akademisi maupun rakyat banyak. Pembangunan jalan dilakukan oleh pemerintah. Swasta tak mau dan tak sanggup terlibat dalam masalah itu, kecuali untuk jalan TOL yang memberikan keuntungan investasi yang layak. Pembangunan jalan dilakukan pemerintah, mulai dari perencanaannya sampai pada pelaksanaan dan pengawasannya. Dalam merencanakan pembangunan jalan tentulah dilakukan studi dan estimasi terhadap kebutuhan dan daya tahan serta dinamika penggunaannya paling tidak sepuluh tahun yang akan datang. Tidakkah pemerintah mempertimbangkan berbagai variable tersebut

dalam membangun jalan dan jembatan ? Asumsi-asumsi ekonomi dan social kemasyarakatan seperti apa yang dijadikan acuan dalam menentukan kebutuhan masyarakat akan jalan dan jembatan ? Tekstur tanah dan kondisi geografis yang bagaimana yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan jalan sehingga dari semua pertimbangan yang ada akan menentukan biaya perunit pembangunannya ?

Dalam benak rakyat tentulah pemerintah yang lebih paham dan mengerti menjawab semua konteks tersebut. Sebab pemerintah memegang kendali uang rakyat, pemerintah memiliki teknisi dan aparatur yang digaji dengan uang rakyat, bahkan disekolahkan oleh rakyat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk semakin professional dan proporsional membaca hati nurani rakyat. Ironis sekali jika di Riau saat ini terdapat 2,06 juta hektar kebun sawit yang 49 persen dimiliki oleh perusahaan swasta (investor) tetapi pemerintahnya tidak berfikir dan tidak mampu memprediksi kebutuhan jalan dan jembatan untuk mendukung dinamika ekonomi yang timbul dan bakal timbul dari sector tersebut.

Mungkin dari pengalaman ketidaksingkronan kerangka berfikir normative pembangunan dan kaidah teoritisnya dengan fakta-fakta empiris yang ada didaerah seperti yang dipresentasikan Riau akhir-akhir ini pemerintah pusat semakin gencar mengumandangkan kembali wacana sentralisasi. Berbagai aturan baru muncul dan ditujukan untuk kian mengekang daerah membelanjakan uangnya. Termasuk berbagai instrument yang dirancang untuk makin mengurangi keleluasan daerah melaksanakan pembangunan. Ini didasarkan pada penilaian pemerintah pusat yang menganggap daerah masih belum mampu mawas diri dan menentukan program yang paling tepat untuk kepentingan masyarakatnya. Upaya-upaya seperti ini tentunya harus dicegah melalui penentuan prioritas yang didasari oleh argumentasi teoritis dan kerangka berfikir normative yang kuat serta berpijak pada kondisi objektif masyarakat.

Pemimin daerah hendaknya kian menyadari bahwa peluang yang terbuka sempena otonomi daerah harus dimanfaatkan sepenuhnya

untuk kepentingan rakyat. Bukan membangun oligarki kekuasaan dan melanggengkan hegemoni ekonomi. Menurut Azyumardi (Kompas,3/12/2010) perubahan yang sangat deras dan cepat akhir-akhir ini di Indonesia mulai tampak adanya liberalisasi dalam bidang ekonomi yang memajukan kekuatan ekonomi rakyat dan dibidang social mengemuka adanya disorientasi gaya hidup global yang tidak sesuai dengan norma berbangsa dan kebudayaan tempatan. Pemimpin-pemimpin di daerah, baik eksekutif maupun legislative hendaklah mampu keluar dari jebakan fenomena perubahan global tersebut. Agar pelaksanaan pembangunan di Riau ini tidak seperti mencampakkan batu ke lubang atau arang habis besi binasa.

Tantangan ke depan tidak semakin kecil dan signifikansinya terhadap penggerusan kesejahteraan rakyat kian besar. Anomali perubahan iklim saja sudah makin sulit diprediksi untuk menentukan formulasi program yang tepat. Ledakan penduduk disamping menaikkan kebutuhan penyediaan ruang dan fasilitas public berkorelasi langsung dengan kian tajamnya persaingan. Tidak jarang kondisi ini berdampak pada naiknya kejahatan dan kesenjangan social antar masyarakat. Nasi juga telah jadi bubur seperti jalan-jalan di Riau yang sudah banyak pula berubah jadi lumpur. Revitalisasi pembangunan dan fungsinya tentu membutuhkan waktu, ruang yang terbatas dan dana yang kian besar. Tantangan ini juga harus disikapi dengan kepiawaian menyusun rencana yang kian kecil biasanya dari percepatan perubahan dan dinamika kontekstual.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani persolana tersebut. Pertama, pemutahiran data terkini sehingga basis perencanaan pembangunan memiliki kerangka pondasi kekinian yang kuat. Prediksi yang tidak didasarkan data yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Pemerintah harus melakukan koordinasi vertical yang kuat agar daerah mau dan mampu mengumpulkan, mengolah dan memberi data yang dapat diterima secara metodologis. Kedua, melakukan diskusi public yang intensif dan juga meluas ke segenap stakeholders agar asumsi-asumsi yang disusun nantinya dapat diterima banyak orang dan memang mewakili

kepentingan yang lebih urgen dan mendesak untuk diprioritaskan.

Terakhir, konsistensi dan komitmen yang kuat dalam menyusun rencana dan implementasi pembangunan untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang memperjuangkan hasrat hegemoni dan oligarki kekuasaan. Sudah banyak saksi dan monument yang mampu menunjukkan betapa tidak mengakarnya program pembangunan yang dilaksanakan di Riau dengan kebutuhan perbaikan kesejahteraan rakyat kini dan dimasa hadapan. Kita memang telah berjalan tetapi dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kita seharusnya bisa kian terbilang dan berlari kejang diatas lebuah raya kita yang kinclong. Semoga...!!!



*“...Berdenting di atas kaleng yang
ditadahkan. Menggetar pada
sanubari pengemis yang belum sempat
menyentuh sarapan. Mereka semburat
menancap harapan. Adakah sesuap
nasi akan didapat dari para pengelola
negara ini yang dengan gagah perkasa
dibalut baju gratis yang diperoleh dari
keringat anak bangsa telah
memperingati hari
kemerdekaannya...”*

MEMAKNAI KEMERDEKAAN MENUJU KESEJAHTERAAN BERSAMA

Begitu semangatnya peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untung mata hari tidak begitu terik sehingga peluh yang mengucur relatif sedikit. Aparatur pemerintah dari lapisan paling bawah sampai pucuk pimpinannya bersigap memperingati hari lahir Indonesia dalam makna kemerdekaan. Lepas dari cengkraman bangsa asing. Namun ada juga mereka yang bolos dan sengaja bolos. Upacara menurut sebagiannya adalah warisan penjajah Jepang dan berbau militerisme. Memperingati hari jadi itu adalah merenung sudah berapa banyak yang diperoleh pada usia 64 tahun ini.

Bayangkan, bubar dari upacara itu para pengemis sudah menanti didepan pintu pagar. Menadahkan tangan minta sedekah. Mereka hidup kurang beruntung. Memang ada juga yang pura-pura kurang beruntung, namun itu masih diabaikan. Para peserta upacara ternyata tidak banyak yang melengong pada kelompok yang kurang beruntung ini. Ada yang tergugah tetapi bunyinya hanya recehan rupiah.

Berdenting di atas kaleng yang ditadahkan. Menggetar pada sanubari pengemis yang belum sempat menyentuh sarapan. Mereka

semburat menancap harapan. Adakah sesuap nasi akan didapat dari para pengelola negara ini yang dengan gagah perkasa dibalut baju gratis yang diperoleh dari keringat anak bangsa telah memperingati hari kemerdekaannya.

Makna kemerdekaan bagi anak bangsa memang bermacam-macam. Mereka yang bebas dari penjajah bangsa lain mengartikan sebagai kesempatan memperbaiki diri sendiri tanpa ada lagi tekanan dari penguasaan. Bagi mereka yang lain kemerdekaan malah mengandung arti beralihnya penguasa ke tangan bangsa sendiri yang akibatnya jauh lebih kejam dari penjajah bangsa lain. Mereka digusur kian kemari. Ditelantarkan sama sekali. Tak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan bangsa ini sebagai anugrah tuhan yang seharusnya dinikmati bersama.

Komitmen bersama pada awal dipeikikkannya kemerdekaan ditabalkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi harus menjadi dasar perekonomian Indonesia dalam makna produksi dikerjakan semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Sistem ini yang harus diimplementasikan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 bahkan dipertegas negara harus menjamain agar kemakmuran dirasakan seluruh warga negara. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Makna dipelihara disini tentunya tidak hanya memberi makan dan minum, apalagi sekedar melemparkan uang rupiah recehan. Dipelihara bermaksudkan pemenuhan seluruh kebutuhan hidupnya yang mendasar, seperti sandang, pangan dan papan. Termasuk pendidikan dan kesehatan.

Negara bertanggungjawab soal pendidikan anak bangsa dan pemeliharaan kesehatan mereka. Oleh karena itu pengelola negara yang diberi kepercayaan oleh rakyat, dalam hal ini pemerintah, diberi keleluasaan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi bangsa. Hasil pengelolaan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bersama semua anak bangsa. Pasal-pasal ini merupakan inti dari apa yang ingin dicapai oleh kemerdekaan. Sedangkan pasal-pasal yang lain merupakan upaya-upaya dan tatanan yang harus dibuat untuk sampai

kepada cita-cita itu. Kesejahteraan untuk semua mutlak adanya dari lahirnya NKRI ini. Bila itu tidak diperoleh maka gagallah bangsa ini adanya.

Tampilan Indonesia saat ini setelah 64 tahun memekikkan kemerdekaan ternyata sangat memprihatinkan. Kemiskinan merebak dan sakitnya banyak orang mengabaikannya sebagai suatu kewajiban dan tanggungjawab bersama. Kebodohan membelenggu hidup anak bangsa. Mereka bahkan seperti dibodoh-bodohi. Sebahagian dapat menikmati tanpa peduli pada mereka yang terpinggirkan oleh nafsu serakah dan hasrat menikmati itu. Hutan-hutan terkelupas menabur kabut asap dimana-mana. Tambang-tambang menghisap isi perut bumi yang hanya menyisakan limbah dan lingkungan yang punah ranah. Lebih parah dari itu, uang yang seharusnya digunakan untuk memakmurkan anak bangsa dipakai untuk hal-hal yang maksiat, dikorupsi untuk memuaskan diri sendiri dan kroni-kroninya. Tanggungjawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar dilegitimasi melalui program-program carity dan berbau memanjakan. Prinsip memeliharanya menjadi kabur dan kering makna.

Untuk keluar dari persoalan ini bangsa Indonesia harus melakukan reformasi yang terukur. Reformasi memerlukan akselerasi yang cepat dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah harus mampu dan bersedia membuka diri dari kritikan masyarakat. Birokrasi harus direformasi berdasarkan prinsip *the raight person in the right place*. Bila tidak maka ancaman menjadi negara gagal menanti diambang mata. Birokrasi Indonesia memerlukan orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk memperbaiki anak bangsa. Mereka harus teliti dan akurat dalam menangani segala persoalan rakyat. Disiplin dan integritas harus dipelihara dan senantiasa dipupuk agar kualitasnya mampu menjamin terselenggaranya proses pemerintahan yang efisien dan efektif. Mereka harus lebih transparan agar akuntabilitasnya dapat diuji kapan saja. Birokrasi pemerintah yang dipercaya rakyat sebagai komponen penyelenggara untuk mencapai tujuan bangsa harus mengerti bagaimana memanfaatkan komponen sumber daya yang dimiliki dengan tetap melibatkan rakyat sebagai komponen partisipan

pelaku dan penikmat hasil-hasil pembangunan.

Paradigma pembangunan harus diubah dari yang semula mengeruk sumberdaya alam untuk memperoleh uang ke arah menemukan anak bangsa yang cerdas dan canggih untuk mampu mengelola sumberdaya sehingga ia menjadi tuan dinegeri sendiri. Pembangunan manusia menjadi mutlak agar anak jati Indonesia memang benar-benar merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ada tiga unsur utama yang harus diperhatikan, yakni pendidikan, kesehatan dan entrepreneurship. Kualitas pendidikan menjadi kunci penting untuk masuk ke ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan kesehatan akan menjamin proses kualitisasi IPTEQ berlangsung efisien dan efektif. Menyangkut kewirausahaan adalah upaya membangkitkan kapabilitas dan integritas sehingga anak bangsa makin percaya diri, memiliki motivasi untuk berprestasi dan semangat yang tinggi memanfaatkan potensi diri yang dimilikinya. Bangsa ini tidak akan maju kalau hanya punya “kutu buku”. Perlu ada yang menorehkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh menjadi karya nyata yang inovatif, bersaing dan berkelanjutan. Kesadaran kita akan makna kemerdekaan sesungguhnya adalah karya-karya unggul kita memperbaiki status bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejahtera unggul secara berkelanjutan. Dirgahayu Republik Indonesia...!!!





“Kemampuan menyusun respon policy yang cepat dan tepat juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika yang berubah kian cepat. Perlu ada tim terpadu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis maupun taktis yang melibatkan berbagai stakeholder. Khusus untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kiranya perlu diambil langkah-langkah yang lebih terukur walaupun kurang populer untuk pencitraan.”

MENUNGGU KETEPATAN RESPON POLICY

Pilkada sudah usai dan pemimpin barupun sudah dilantik. Riau kini sudah setahun dipimpin gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat. Tentu banyak harapan yang digantungkan rakyat dipundak pemimpin baru tersebut. Kekecewaan masa lalu, bagi yang sebelumnya merasa kecewa, dan harapan baru, bagi yang sebelum ini tidak punya sangkutan, berpadu menjadi harapan bersama untuk menjadikan Riau lebih baik. Paling tidak, ada perubahan ke arah yang positif. Berubah lah hendaknya nasib Riau dan masyarakatnya.

Setahun memimpin tentu bukan lah waktu yang cukup untuk menggapai prestasi yang gemilang. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Mulai dari proses penyusunan APBD dalam masa transisi sampai pada pengangkatan personil yang akan mengayuh bahtera birokrasi. Liku-liku yang dihadapi begitu tajam. Seakan membuat perangkat untuk diri sendiri. Belum lagi kisah-kisah masa lalu yang ternyata tetap saja menjadi pemberat untuk kecepatan berlayar.

Cabaran eksternal juga tidak sedikit. Ekonomi dunia yang berkecamuk membuat kehidupan rakyatpun terganggu. Bertubi-tubi pula datangnya. Setelah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika yang tak kunjung usai kini wabah virus Corona pun menyerang.

Semuanya membuat perekonomian rakyat di Riau menjadi terganggu. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor utama Riau dari produk unggulan utama pula, yakni minyak sawit (CPO). Kemunduran dalam pembelian minyak sawit ini langsung memukul daya beli masyarakat. Sebahagian besar masyarakat Riau menggantungkan kehidupan dari perkebunan sawit. Besar-kecilnya pendapatan masyarakat tergantung dari naik turunnya harga sawit. Ujung-ujungnya adalah naik turunnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Riau.

Pada tahun 2019 ini laju pertumbuhan ekonomi Riau hanya mencapai 2,84 persen. Keadaannya justru lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang hanya mencapai 2,37 persen. Pada sisi produksi, hampir seluruh sektor mengalami perbaikan kecuali sektor pertambangan dan galian. Sektor ini memang sedang meradang di Riau dan sudah berlangsung lama. Kontraksinya tahun 2019 ini saja mencapai minus 7,96 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mampu tumbuh sebesar 14,11 persen. Diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,69 persen dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,30 persen. Sektor pertanian sebagai sektor andalan masih tumbuh sebesar 4,12 persen. Ini berarti dari sisi produksi mulai terdapat pergeseran pertumbuhan ekonomi Riau dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pada sisi pengeluaran sektor pengeluaran rumah tangga hanya tumbuh 2,05 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada perubahan Inventori sebesar 26,70 persen dan Pengeluaran LNPRRT sebesar 16,14 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 2,61 persen. Sedangkan Ekspor dan Import justru mengalami kontraksi masing-masing minus 23,97 persen dan minus 21,83 persen. Keadaan ini menggambarkan ketergantungan ekonomi Riau yang cukup tinggi terhadap perdagangan internasional. Adanya gangguan perdagangan internasional cenderung mengganggu perkembangan sector lain terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.

Ke depan, pemerintah Provinsi Riau harus benar-benar jeli untuk

memanfaatkan dinamika perekonomian global ini sehingga tidak hanya sekedar penerima dampak tetapi lebih piawi mengelola risikonya. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni kemampuan menganalisis pencapaian target-target pembangunan yang bersifat kuantitatif dan kemampuan menyusun respon policy yang cepat dan tepat. Target-target kuantitatif dalam pembangunan harus terdistribusi kepada level pemerintahan yang lebih rendah untuk dicapai. Bila perlu sampai ke pedesaan sebagai kesatuan terkecil dari struktur pemerintahan. Misalnya dalam menyusun target pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat haruslah ditentukan berdasarkan kemampuan pencapaian dari unit terkecil struktur pemerintahan.

Aggregat dari semua target capaian akan diformulasikan menjadi tujuan pencapaian bersama setelah menentukan sumber-sumber untuk proses pencapaian secara komprehensif dan terpadu. Jangan sampai target capaian yang dibuat Pemerintah Provinsi hanya angan-angan belaka yang tidak mendapat respon dari unit-unit terkecil pelaksana pembangunan di lapangan. Hal itu hanya akan menimbulkan kesimpangsiuran pelaksanaan pembangunan tanpa membuahkan hasil yang memadai.

Kemampuan menyusun respon policy yang cepat dan tepat juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika yang berubah-ubah cepat. Perlu ada tim terpadu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis maupun taktis yang melibatkan berbagai stakeholder. Khusus untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kiranya perlu diambil langkah-langkah yang lebih terukur walaupun kurang populer untuk pencitraan.

Pertama, mendorong komitmen para investor dan calon investor untuk berinvestasai secara lebih berkualitas. Asosiasi-asosiasi pengusaha dapat dijadikan jembatan kearah itu sehingga investasi yang ditanamkan di Riau tidak menjadi beban social yang harus ditanggulangi masyarakat dan pemerintah. Mendorong investasi daerah adalah syarat mutlak bagi lahirnya produktivitas dan terbukanya kesempatan kerja.

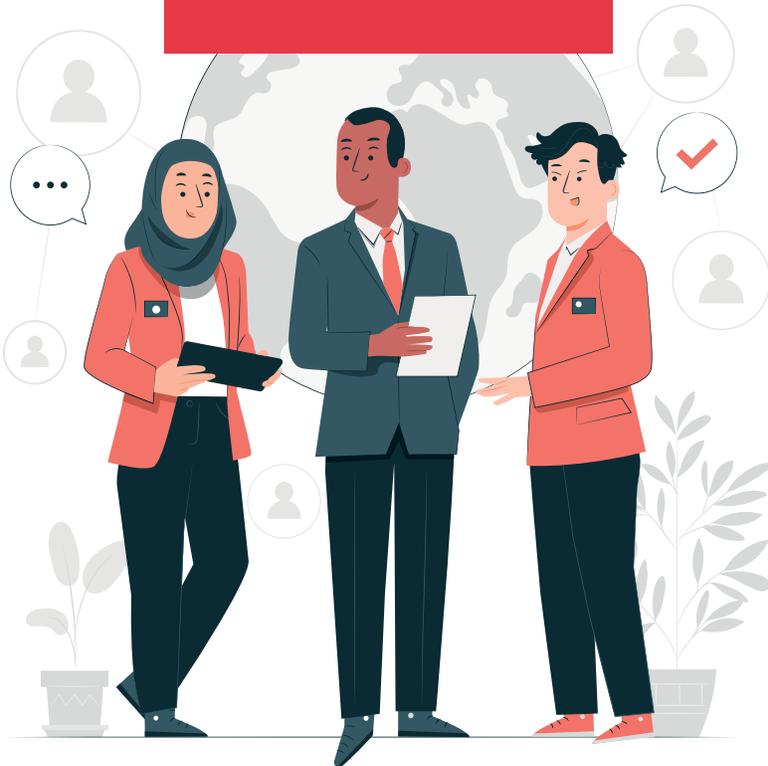
MENUNGGU KETEPATAN RESPON POLICY

Kedua, mengelaborasi semua dinamika perekonomian baik nasional maupun internasional secara Bersama-sama dengan para pelaku ekonomi dan pemerhati ekonomi agar semua pihak lebih agresif menangkap peluang pasar. Treruma sekali bagi pelaku-pelaku industri kecil dan rumah tangga sehingga jangkauan pasar mereka lebih luas. Ketiga, Mendorong terjadinya diversifikasi dalam produk-produk manufaktur, baik yang bersumber dari hasil pengolahan bahan mentah unggulan daerah, seperti minyak sawit dan kayu. Industri pengolahan makanan dan sandang serta bahan kebutuhan aksesoris lainnya dapat dipacu guna membangun diversifikasi yang lebih optimal.

Keempat, meningkatkan skill dan kapabilitas pengusaha-pengusaha daerah untuk mampu melakukan penetrasi pasar dengan cepat dan tepat sasaran. Kelima, melakukan positioning daerah yang lebih meresap kepada khalayak, khususnya dengan pembangunan yang mampu menarik pendatang berkualitas dan tak menjadi penduduk menetap. Wisatawan perlu digelitik punca hasratnya untuk berkunjung ke Riau dengan melekatkan kesan yang menarik dan indah. Meskipun dalam aspek alam Riau kurang memiliki objek tetapi dari aspek sejarah dan atraksi budaya masih bisa diandaalkan. Untuk itu perlu didukung oleh adanya objek-objek buatan yang menarik seperti Ci-Walk di Bandung, Lego-land di Johor, dan pengembangan wisata kesehatan.

Keenam, merajut jejaring pemasaran agar mampu menghadapi persingan. Baik pengusaha maupun pemerintah daerah harus mampu membentuk jarring pemasaran Bersama untuk produk-produk unggulan daerah diluar sawit dan bubur kertas. Pengerajin dan pengusaha kuliner daerah didampingi dalam menembus pasar asing. Termasuk produk-produk pertanian tanaman pangan dan sayur-sayuran. Selain untuk menembus pasar ekspor orientasi awal dapat dilakukan untuk substitusi impor sehingga mengurangi beban pengeluaran penduduk dan pengendalian inflasi. Ketujuh, tetap mengedepankan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ontah lah...!!!

“Bagaimanapun buku ini sangat patut dibaca, baik oleh kalangan akademis maupun birokrat. Penulis buku ini telah dengan baik membarwa pembaca pada kinerja yang dicapai oleh Kota Pekanbaru dan obsesi Bang Herman Abdullah sebagai orang yang didulukan selangkah dan ditinggikan seranting di Kota Bertuah ini.”



OBSESI BANG HERMAN MENGEMAS KOTA BERTUAH

Diluncurkannya buku bertajuk “Konsep dan Implementasi H. Herman Abdullah dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru” nampaknya bukan sekedar gagah-gagahan seorang pejabat publik menyeruakkan kerja nyatanya dalam memimpin sebuah institusi pemerintahan. Dari judulnya buku ini menggambarkan bahwa mengemas Kota Bertuah dengan segudang permasalahannya tidaklah didekati hanya sekedar obsesi pribadi belaka atau selera yang terbit dari seorang pejabat semata. Pembangunan harus dilaksanakan secara holistik dan terukur melalui metoda-metoda yang telah teruji. Buku ini menapaki kembali jejak dan strategi pembangunan yang dilaksanakan H.Herman Abdullah sebagai walikota yang memimpin semua armadanya (birokrasi pemerintah) untuk memberi yang terbaik bagi rakyat sebagai penikmat pembangunan, khususnya dalam pelayanan publik yang merupakan aspek terpenting dalam dimensi pembangunan terkini.

Sebagaimana digambarkan penulis dalam pengantar buku (hal xix) bahwa isi buku pada dasarnya mengedepankan kiat jitu H. Herman Abdullah sebagai walikota Pekanbaru memanfaatkan momentum otonomi daerah agar mendatangkan kesejahteraan bagi

masyarakat Pekanbaru. Kiat itu dipresentasikan melalui penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kota Pekanbaru. Apa yang telah dibuat agar konsep good governance dapat berjalan di Pekanbaru ? Kupasan utama yang dilansir buku ini sebagai “sepak terjang” H.Herman Abdullah memimpin Kota Pekanbaru adalah jawabannya. Hasilnya juga diungkap meskipun dalam ukuran-ukuran yang lebih makro.

Pada bahagian awal buku ditengarai tentang akan dibawa kemana Kota Pekanbaru sebagai capaian utama pembangunan dengan terlebih dahulu mengupas sejarah Pekanbaru masa silam, posisi geografis dan lingkungan strategis saat ini di bawah kepemimpinan H. Herman Abdullah sebagai walikota dan Erizal Muluk sebagai wakilnya. Salah satu diantara persoalan strategis tersebut adalah tingginya pertumbuhan penduduk akibat derasnya arus migrasi ke Kota Pekanbaru. Berbagai persoalan perkotaan menjadi mengemuka bila dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang demikian cepat ini sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya berpacu keras dengan naiknya kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai ibu kota provinsi dan pusat pelayanan masyarakat serta sentra perdagangan daerah visi pembangunan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Takwa.

Penulis buku menguraikan dengan rinci makna yang terkandung dalam visi ini. Sayangnya ia tidak mengulas apa saja kelemahan-kelemahan visi ini dikaitkan dengan konteks Pekanbaru kini dan ke depan. Juga tidak didiskusikan ukuran-ukuran yang tegas dari tahapan pencapaian visi tersebut dari setiap makna yang terkandung di dalamnya. Pernyataan visi yang demikian panjang tidak dipertanyakan, apakah itu efektif bagi diterimanya visi tersebut oleh stakeholder sehingga semua orang memiliki komitmen untuk memegangnya sebagai arah dan tujuan setiap langkah-langkah strategisnya.

Obsesi Bang Herman Abdullah mewujudkan Good Governance dan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru diulas pada bagian akhir Bab

Pendahuluan. Dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang berfungsi sebagai pelayanan satu atap untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengurus perizinan diangkat sebagai kebijakan strategis utama dalam hal pelayanan publik di Pekanbaru. Termasuk pula pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintahan menuju kapasitas aparat yang berkesesuaian dengan perkembangan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi secara jujur diakui dalam buku ini bahwa kendala yang masih melekat masih sangat banyak. Terutama aspek infrastruktur yang kurang memadai dan tidak terealisasinya Kawasan Industri Tenayan (KIT) sebagai kawasan sentra perekonomian modern yang akan menghela sektor-sektor ekonomi produktif lainnya di Pekanbaru. Buku ini memang tidak banyak mengupas aspek ekonomi dikaitkan dengan pelayanan publik dan dimensi good governance sehingga upaya-upaya mendorong Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa seperti tercecet.

Bab II dan Bab III diisi oleh berbagai konsep teoritis tentang pelayanan publik. Pada Bab II dikupas tentang perubahan paradigma pelayanan publik yang memaparkan esensi perubahan paradigma pada era desentralisasi. Bab ini juga diisi dengan kupasan tentang good governance dan arah kebijakan yang sebaiknya ditempuh untuk sampai kepada kondisi tersebut. Pada Bab III diketengahkan judul tentang reformasi pelayanan publik yang pada intinya memuat definisi dan konsep ideal pelayanan publik yang berkualitas. Membaca Bab II dan Bab III penulis buku ini mengajak untuk memahami konsep sesungguhnya dari good governance. Meskipun diskusi teoritik dan konsepsionalnya terbatas, namun pendedahannya cukup untuk membawa pembaca faham konsep-konsep pelayanan publik.

Buku ini memang bukan untuk mendiskusikan teori-teori tetapi lebih mengarah pada penelusuran dari yang telah diperbuat Bang Herman Abdullah selaku Walikota Pekanbaru menyangkut peningkatan pelayanan publik. Hal ini tergambar jelas dalam Bab IV yang diberi judul Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Jika pembaca ingin mengetahui dan mengukur

mutu pelayanan publik di Pekanbaru pada bab ini dapat ditemukan.

Penulis ternyata cukup rinci mengulas tentang langkah strategis yang diambil Kota Pekanbaru dalam hal reformasi birokrasi dengan mengedepankan perubahan paradigma manajemen kelembagaan. Peran dan tanggungjawab yang lebih besar pada masyarakat sambil melakukan pemberdayaan, menerapkan prinsip kompetisi sehingga timbul perbaikan sistem dan membuat berbagai peraturan daerah serta desain organisasi berbasis kinerja adalah kiatnya. Termasuk program-program unggulan yang ditaja di Kota Pekanbaru seperti Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) On-line, pelayanan kesehatan gratis, pengelolaan pembangunan pendidikan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Sayangnya Gerakan Cinta Orang Miskin (Gentakin,) sebagai program favorit Kota Pekanbaru, hanya diulas secara sepintas. Padahal gerakan ini cukup signifikan untuk mengajak segenap komponen masyarakat mencintai orang miskin dalam arti ikut berpartisipasi mengentaskan kemiskinan itu dari orang tersebut. Bukan mencintai kemiskinan sehingga harus membiarkan kemiskinan itu menggayut dan membelit kehidupan rakyat. Bila berbagai data tentang sukses Gentakin ini diungkap maka akan nampak betapa pelayanan publik yang diselenggarakan secara baik akan memberikan manfaat berganda.

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, buku ini kurang mendiskusikan problematika sesungguhnya kehidupan masyarakat di Kota Pekanbaru. Pada Bab V memang telah digambarkan secara seksama berbagai tantangan mewujudkan good governance di Kota Pekanbaru, baik secara konseptual maupun kontekstual. Namun, sebenarnya masyarakat masih sangat haus akan upaya yang lebih strategis dan profesional dalam peningkatan pelayanan publik di kota ini, terutama yang menyangkut proses kehidupan mereka sehari-hari, seperti air bersih, ruang terbuka hijau, kenyamanan di jalanan, keamanan, listrik, pemukiman yang menyejahterakan dan sarana serta prasarana penyejuk jiwa yang memadai.

Bagaimanapun buku ini sangat patut dibaca, baik oleh kalangan akademis maupun birokrat. Penulis buku ini telah dengan baik

membawa pembaca pada kinerja yang dicapai oleh Kota Pekanbaru dan obsesi Bang Herman Abdullah sebagai orang yang didulukan selangkah dan ditinggikan seranting di Kota Bertuah ini.

Paparan dalam buku ini juga mengungkap nilai-nilai yang seharusnya dipegang semua stakeholders dalam membangun masyarakat Kota Pekanbaru masa depan. Menurut Rhenal Kasali (Kompas, 13 Juli 2009, hal 15) kinerja pembangunan tanpa pondasi tata nilai adalah kinerja yang rapuh dan bisa memutar-balikkan kinerja. Membaca buku ini seolah menempatkan diri kita dalam posisi Bang Herman Abdullah yang ingin membangun kinerja dari upaya yang dilandasi tata nilai sehingga Kota Pekanbaru tidak kian rapuh dan lapuk dimakan usia setrta terbenam oleh penikmat-penikmat kehidupan metropolis yang memabukkan.



*“Membenahi Kota Pekanbaru ke depan
hendaknya tidak keluar dari tiga isu utama
yang urgen, yakni penyediaan air bersih dan
listrik, penataan kawasan DAS Sungai Siak,
dan penataan sarana dan prasarana
transportasi.”*

PINDAH KOTA

Walikota Pekanbaru mewacanakan untuk memindahkan pusat pemerintahan Kota Pekanbaru ke Tenayan Raya. Usulan sudah pun diajukan ke pemerintah provinsi dan anggaran telah dicadangkan untuk itu, konon jumlahnya mencapai 1,7 triliun rupiah. Walaupun skema pendanaannya secara multiyears dana sebesar itu tentu menjadi layak dipertimbangkan bila dikaitkan dengan kondisi pelayanan dasar masyarakat Pekanbaru dewasa ini. Sumber-sumber ekonomi dan pembangunan daerah selayaknya dioptimalkan kearah kesejahteraan masyarakat. Bukannya kian membengkak pada upaya-upaya menyenangkan pejabat dan para pengelola birokrasi. Meskipun ada adagium bahwa pusat pemerintahan yang terpadu dinilai bisa membuat layanan kepada masyarakat lebih efisien dan lebih cepat namun dalam konteks modernisasi saat ini kepiawian mengelolalah yang menjadi faktor utama peningkatan kinerja.

Terdapat berbagai syarat untuk memindahkan sebuah pusat pemerintahan agar memang menjadi lebih efisien dan lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, indeks sosial ekonomi suatu wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan memang menunjukkan trend yang meningkat dan wilayah yang akan

ditinggalkan tidak mengalami degradasi dalam aspek sosial ekonomi. Pusat pemerintahan harus dapat menjadi motor pendorong berkembangnya wilayah yang ia tempati sehingga memberi peluang pada masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan baik dalam upaya mendinamisir kehidupan perekonomiannya.

Kedua, infrastruktur transportasi memang memadai dan dapat dikembangkan. Pemandahan pusat pemerintahan jika masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang baru akan membutuhkan investasi yang cukup besar. Capaian perluasan akses ekonomi akan terhambat pada sektor-sektor sekunder dan tersier bila prasarana transportasi tidak memadai. Rencana pemindahan pusat pemerintahan di Pekanbaru selayaknya didahului oleh pemetaan dan implementasi pembangunan prasarana transportasi yang baik di sekeliling kota, khususnya menuju dan dari pusat pemerintahan yang baru tersebut. Mengingat sarana dan prasarana transportasi di Pekanbaru secara umum masih sangat kurang memadai maka pembenahan masalah ini seharusnya menjadi prioritas utama. Pemandahan pusat pemerintahan baru menjadi sesuatu yang patut dilakukan bila sarana dan prasarana transportasi sudah layak bagi masyarakat.

Ketiga, pusat pemerintahan yang baru harus dekat dengan pusat utama ekonomi dan jalur nasional. Pemandahan pusat pemerintahan kota pekanbaru ke Tenayan justru kian menjauh dari pusat pemerintahan provinsi dan arus utama perekonomian. Pengembangan perekonomian Kota Pekanbaru lebih banyak ke arah Bangkinang. Pergerakan arus perekonomian rakyat tidak meluber ke arah Tenayan sehingga kurang efisien dari aspek pelayanan ekonomi rakyat.

Keempat, lingkungan alam yang mendukung bagi sngkronisasi berbagai kepentingan masyarakat dan swasta dengan pemerintah. Selain mau berurusan dengan pemerintah rakyat yang datang juga harus dapat menyaksikan suatu kawasan pusat pemerintahan yang apik dan asri. Mengingat wilayah Tenayan masih relatif belum banyak terjamah maka aspek lingkungan alam ini masih bisa ditata dengan

baik.

Kelima, berkenaan dengan tenaga kerja dalam perspektif mendorong partisipasi masyarakat membuka lapangan pekerjaan. Pemindahan pusat pemerintahan harus mampu mendorong unit-unit usaha baru bagi masyarakat sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan. Pada satu sisi, pusat pemerintahan juga harus mampu mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga pemborosan birokrasi dapat ditekan. Bagaimana pun aspek kepegawaian juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai sebahagian besar karyawan malah menjadi tersiksa akibat pindah kantor ke tempat yang baru, baik karena jarak, waktu, dan tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Penempatan kantor pelantikan pemerintahan yang membuat ketidakelesaian pegawai sangat signifikan pengaruhnya pada penurunan kinerja.

Berkenaan dengan wawacana pemindahan pusat pemerintahan Kota Pekanbaru atas dasar keinginan melakukan pemerataan pembangunan menggelitik pula untuk dianalisa. Pemerataan pembangunan bukan menyangkut berpindahnya berbagai kantor pemerintah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Bila dianggap selama ini wilayah Tenayan Raya belum berkembang dengan baik maka solusinya adalah pada infrastruktur yang tidak memadai. Kota Pekanbaru sebaiknya membenahi strategi dan implementasi pembangunannya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Urusan tata ruang dan peruntukan wilayah hendaknya ditegaskan dan dipatuhi. Anggaran diarahkan untuk membentuk suatu kesatuan wilayah yang saling berkait kelindan sehingga semua wilayah berkembang dinamis secara bersama. Pemerintah kota harus menghindari terjadinya penumpukan-penumpukan pemukiman rakyat dan prasarana pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana mungkin disuatu wilayah menumpuk sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SLTA dalam jumlah yang relatif banyak. Ujung-ujungnya adalah kemacetan di jalan-jalan dan tidak terdistribusinya kegiatan perekonomian rakyat pada berbagai wilayah.

Mengembangkan wilayah pinggiran kota bukan berarti

memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah tersebut. Wilayah pinggiran akan berkembang jika disana ada destinasi yang membuat masyarakat berkunjung dan akses ke wilayah itu memang baik. Selain itu perlu ditunjang dengan ketersediaan prasarana dasar lainnya seperti listrik dan air bersih. Besaran anggaran yang mencapai 1,7 triliun rupiah akan menjadi pemborosan dan merugikan kepentingan rakyat. Jika hanya tempat arsip yang sudah tidak memadai maka yang diperlukan adalah gudang tempat menampungnya. Bukan harus memindahkan pusat pemerintahan. Dalam era modern saat ini arsip pun sudah banyak yang disimpan secara digital sehingga tidak memerlukan tempat yang luas dan besar.

Membenahi Kota Pekanbaru ke depan hendaknya tidak keluar dari tiga isu utama yang urgen, yakni penyediaan air bersih dan listrik, penataan kawasan DAS Sungai Siak, dan penataan sarana dan prasarana transportasi.

Pemerintah Kota pekanbaru harus mampu menempatkan penyediaan air bersih sebagai prasarat utama pembangunan kota layak huni masa depan. Cakupan pelayanan air bersih saat ini sangat memprihatinkan. Investasi tidak berkembang dengan baik dan masyarakat tidak merasakan pelayanan yang memuaskan hanya karena di Pekanbaru persoalan air bersih tidak memadai. Termasuk pelayanan listrik bagi kepentingan pembangunan perumahan dan pertokoan. Untuk itu lah diperlukan suatu keberanian merubah keadaan sehingga menata dan mengelola pembangunan di Kota Pekanbaru tidak sekedar menciptakan proyek-proyek yang hanya akan menjadi sumber korupsi.

Lebih penting lagi adalah menata pengelolaan transportasi masyarakat. Ini bukan sekedar membangun jalan dan membeli bus kota. Penataan transportasi perkotaan akan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi alokasi dan fungsi distribusi pemerintahan. Alokasi anggaran keberbagai sudut wilayah dilakukan dengan membangun dan memperbaiki prasarana transportasi. Sementara fungsi distribusi akan nampak pada upaya-upaya menempatkan wilayah sebagai destinasi yang layak huni dan layak dikunjungi. Hanya melalui itu lah rakyat akan merasakan kota sebagai milik mereka dan patut untuk mereka

PINDAH KOTA

pelihara dan kembangkan. Dari implementasi kedua fungsi tadi pada akhirnya akan menciptakan partisipasi sebagai prasyarat penting menuju demokrasi yang berkualitas. Semoga !

“visi adalah gambaran yang akurat tentang organisasi dan keadaan seperti apa yang ingin diwujudkankannya dalam kurun waktu tertentu. Visi harus mampu mengartikulasikan sifat esensial organisasi, nilai-nilai yang dipegangnya, dan pekerjaan yang diemban untuk sampai pada keadaan yang ingin diwujudkan.”



PILKADA SERENTAK 2020 DI RIAU; KIAMERUMUSKAN VISI CALON

Pilkada serentak di Riau akan digelar tahun 2020 mendatang. Perencanaan dan sebahagian tahapannya sudah dimulai tahun ini. Salah satunya adalah alokasi dana hibah dalam APBD kepada KPU masing-masing daerah sudah dianggarkan. Secara keseluruhan total dana dibutuhkan untuk menyelenggarakan diperkirakan mencapai Rp 257,7 milyar. Jumlah yang tidak kecil bila dikaitkan dengan skala prioritas pembangunan daerah saat ini. Kabupaten Bengkalis mengalokasikan anggaran paling besar yang berkisar Rp 40 milyar. Diikuti Rokan Hulu sekitar Rp 32,3 milyar, Indragiri Hulu sekitar Rp 31,1 milyar, Pelalawan sekitar Rp 29,9 milyar, Kuansing sekitar Rp 29,4 milyar, Rokan Hulu sekitar Rp 28,5 milyar, Siak sekitar Rp 26,4 milyar, Kepulauan Meranti sekitar Rp 22,1 milyar, dan Kota Dumai sekitar Rp 18 milyar.

Pesta demokrasi ini harus digelar. Apapun pengorbanannya dan bagaimanapun dampaknya. Walaupun soal kualitas, baik dalam aspek penyelenggaraan maupun aspek output dan benefit, masih sangat dipertanyakan. Rakyat sendiri belum lah siap menghadapi pesta

tersebut. Pilihan mereka bukan pada calon yang berkualitas dengan visi pembangunan yang jelas. Masih banyak diantara mereka yang memilih atas dasar kepentingan sesaat. Aroma politik uang yang merebak memberi nuansa dan bukti bahwa demokrasi menimbulkan banyak korban berkelanjutan. Korban uang para calon. Korban keharmonisan antar kontestan. Akhirnya, korban wilayah dan rakyat itu sendiri karena kualitas pembangunan wilayahnya hancur lebur akibat terpilih pemimpin yang tidak memiliki kemampuan yang baik. Terpilih pemimpin yang hanya mengumbar janji. Terpilih pemimpin yang menjadi makin kemaruk mengurus harta rakyat guna mengembalikan modal pilkada.

Rakyat sebenarnya harus menyadari bahwa politik uang yang ia nikmati adalah kesengsaraannya dalam jangka panjang. Rakyat harus mulai cerdas berdemokrasi. Selain menilai profil dan rekam jejak calon seharusnya rakyat juga memahami visi calon. Jangan sampai pilih-pilih tebu, terpilih di tembuku nan bebiluluak. Artinya, kekurangan arifan dalam memilih akan berakibat pada kesalahan memilih sehingga lahir pemimpin yang tidak berkualitas. Pemimpin yang selain secara profil dan rekam jejak yang tidak baik juga tidak memiliki visi pembangunan yang relevan dan mumpuni.

Kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi akan memaksa calon untuk bekerja lebih strategis. Itu akan tercermin dari visi dan misi yang disusunnya. Arah dan keadaan seperti apa wilayah dan rakyat yang akan dipimpinya lima tahun mendatang, harus tergambar dengan jelas dan akurat. Sesuai atau tidak dengan harapan dan gesah rakyat, dikaitkan dengan dinamika lingkungan eksternal, akan menjadi taruhan bagi calon dalam merumuskan visi dan misi pembangunannya. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan rakyat dalam memilih calon. Calon mana yang paling ideal mengusung visi dan misi ke depan sesuai perspektif rakyat maka dialah yang akan memenangkan pertarungan dalam pesta demokrasi tersebut.

Lantas, bagaimana sepatutnya sang calon merumuskan visi dan misi pembangunannya? Lima tahun memimpin suatu daerah kabupaten atau kota bukanlah waktu yang panjang. Sumber-sumber

pembangunan juga terbatas, baik sumberdaya manusia maupun dana serta infrastruktur. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan visi yang merupakan resultan dari kondisi kekinian dengan harapan masa depan serta berbagai cabarannya. Oleh karena itulah, menurut Janel M. Radtke pernah menulis *How to Write a Mission Statement* dalam buku berjudul *Strategic Communications for Non-profit Organizations: Seven Steps to Creating a Successful Plan*, menggariskan bahwa

visi adalah gambaran yang akurat tentang organisasi dan keadaan seperti apa yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi harus mampu mengartikulasikan sifat esensial organisasi, nilai-nilai yang dipegangnya, dan pekerjaan yang diemban untuk sampai pada keadaan yang ingin diwujudkan.

Sebuah visi haruslah terkini, hidup, dan merepresentasikan secara baik suatu keadaan yang menyenangkan banyak stakeholder. Terbebas dari sekedar jargon dan permainan kata-kata sehingga bukan merupakan paragraf-paragraf yang hampa. Pertimbangan penting dalam merumuskan visi adalah bagaimana visi tersebut menjadi lekat dengan semua orang. Mendorong mereka untuk berkontribusi, berpartisipasi, dan mampu mengevaluasinya sesuai perkembangan jaman. Visi yang baik akan membuat rakyat berkomitmen untuk secara bersama-sama mewujudkannya. Visi tidak boleh kehilangan relevansi dengan rakyat dan harapan-harapan mereka. Visi harus senantiasa beresonansi untuk menjaga pengaruhnya dalam memupuk inisiatif dan inovasi partisipasi rakyat dalam pembangunan. Ada keberanian rakyat dalam melakukan pekerjaan dan proses kehidupannya berkat visi bersama yang dicituskan.

Paling tidak, dalam sebuah visi dan misi yang baik dan relevan, akan terkandung jawaban dari tiga pertanyaan utama. Pertama, peluang dan kebutuhan apa yang ada untuk ditangani? Sebagai sebuah presentasi tujuan organisasi substansi sebuah visi akan mendedahkan keadaan yang paling layak digapai bersama. Kedua, pilihan terbaik apa dari begitu banyak langkah-langkah dan perbuatan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan keadaan yang telah disepakati bersama

tersebut?. Dalam kaitan ini sebuah visi akan menjawab proses mewujudkannya secara organisatoris. Ketiga, prinsip atau kepercayaan apa yang memandu semua proses tersebut?. Ini berkaitan dengan nilai-nilai yang melandasi organisasi.

Misalkan saja seorang calon kepala daerah ingin membuat sebuah perbedaan nyata dalam kehidupan generasi mudanya dimasa yang akan datang maka akan dirumuskan suatu keadaan generasi yang unggul dan kompetitif. Generasi yang peduli dan mampu menggunakan potensi dirinya untuk handal menghadapi segala perubahan, serta berkompeten dengan kepercayaan diri yang tinggi. Secara konsisten melakukan perubahan tanpa kehilangan identitasnya sebagai warga bangsa. Proses dan langkah-langkah mewujudkannya akan berkait dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang jelas dan terukur serta memberikan pendampingan yang berkala secara profesional. Substansi visi tersebut dikunci dengan seperangkat nilai-nilai, baik yang bersumber dari agama maupun kearifan-kearifan lokal yang dianut masyarakat selama ini.

Sebuah visi selanjutnya akan menjadi vocal point bagi semua orang. Menyatakan tujuan bersama yang dapat menginspirasi dukungan dan komitmen berkelanjutan. Memotivasi semua yang berkaitan dengan organisasi. Diartikulasikan secara sederhana dan ringkas sehingga mudah dipahami dan diresapi sebagai milik bersama yang harus diinisiasi. Menggunakan kata proaktif untuk menggambarkan segala yang bakal dilakukan dan tidak hanya sekedar jargon semata. Tidak perlu bertele-tele mengungkapkannya sehingga semua orang melalui kalimat yang singkat tetap mampu mempertaut-suaikan dengan perilakunya.

Tidak gampang mendorong para calon kepala daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan yang ditawarkannya memiliki standar kualitas yang baik. Kepentingan-kepentingan pragmatis senantiasa mengeliminirnya. Penerimaan masyarakat pun masih sulit diciptakan mengingat pemahaman mereka terhadap sebuah visi yang baik juga masih rendah. Apalagi mengaitkan visi para calon tersebut dengan upaya-upaya mentransformasi kehidupan rakyat

kearah yang lebih baik juga sangat tidak memadai. Visi dan misi para calon sampai saat ini baru sekedar persyaratan administrasi belaka. Walaupun sempat dilakukan debat kandidat yang menguji kualitas visi dan misi para calon. Namun keterpilihan mereka lebih banyak tidak bersumber dari baik-buruknya visi mereka dimata masyarakat pemilih.

Guna menghasilkan proses pembangunan yang lebih baik sehingga sebuah wilayah kabupaten atau kota mampu mencapai keadaan sesuai visi Indonesia maka mengkaitkan substansi visi dengan keharusan implementasinya jika terpilih nanti merupakan suatu upaya positif. Aturan yang mengatur masalah itu harus kian dipertegas. Harus ada evaluasi berkala dari legislatif terhadap progres dan capaian visi dan misi seorang bupati atau walikota terpilih. Dengan demikian ukuran-ukuran keberhasilan pencapaian visi akan tersusun secara akurat dan jelas. Evaluasi kinerja menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama sekali terhadap para petahana. Akan terhindar dari penilaian yang bias dan isu-isu tak bertanggungjawab yang dapat merugikan dirinya jika ingin mencalonkan diri kembali. Sebaliknya dapat pula diberberkan ketidak berhasilannya dengan lugas walau itu sedikit menyakitkan. Ontah lah ?!

*“Terwujudkah visi dan misi yang
dulu dicetuskan ?. Sepertinya
jauh panggang dari api. Sejak
lima tahun terakhir pertumbuhan
ekonomi Riau justru berada
dibawah pertumbuhan ekonomi
nasional.”*

AKHIR HAYAT VISI RIAU 2020

Tanpa terasa waktu berjalan dan masa bergulir tiada peduli pada sesiapa yang ada, sesiapa yang merasa ataupun yang kebas akan perisa. Ianya tak kan berhenti walaupun ada yang terlindas. Ada yang tegak dan berjalan tegak ke depan ada yang tertatih-tatih menghela penderitaan. Namun pada dasarnya ada ruang dan kesempatan untuk berbuat dan mengisi relung waktu. Untuk memperbaiki diri dan membekalinya bagi kehidupan esok yang lebih baik. Atas kesempatan itulah perlu adanya tatanan dan tuntunan yang jelas. Mau dibawa kemana dan dalam bentuk seperti apa keadaan yang ingin diwujudkan pada beberapa waktu yang akan datang.

Itulah visi yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa misi sebagai chosen tracks dalam mengejar visi dimaksud. Wikipedia menjelaskan;...a mission statement is a short statement of why an organization exists, what its overall goal is, identifying the goal of its operation: what kind of product or service I provides, its primary customers or market, and its geographical region of operation. It may include a short statement of such fundamental matters as the organization's value or philosophies, a business's main competitive advantages, or a desired future state-the "vision".

Di fase awal reformasi, Riau yang tidak ingin menjadi provinsi “kaleng-kaleng” dan merasa selama ini telah tergerus oleh “kezoliman” pemerintah pusat, bercita-cita ingin menjadi provinsi terkemuka. Untuk merealisasinya maka dimulai dengan menentukan provinsi seperti apa dan masyarakat yang bagaimana yang akan diwujudkan paling tidak dalam dua puluh tahun mendatang. Lalu dirumuskanlah sebuah visi ke depan yang setelah melakukan perdebatan panjang dituangkan dalam Perda Nomor 36 Tahun 2001 yang berbunyi; Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. Sebuah situasi dan kondisi yang sungguh apik bila itu dapat direalisasikan.

Apa landasan berfikir ketika itu ? Adanya otonomi daerah merupakan dasar utama bagi Riau untuk memperoleh kesempatan membuat wilayah ini lebih mandiri dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya. Teori menyatakan bahwa semakin partisipatif kebijakan pembangunan diputuskan dan dilakukan maka semakin mendekati hasilnya keinginan dan kebutuhan stakeholdersnya. Kemudian, otonomi daerah ditindaklanjuti pula dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Aturan ini memungkinkan Riau mendapat bahagian dari sumber-sumber alam yang dieksploitasi di wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung jumlah dana bagi hasil yang dapat dinikmati.

Meskipun itu belumlah sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun jika dirata-ratakan hampir Rp 33,5 triliun Riau menerima kucuran dana bagi hasil setiap tahunnya, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Jika dikalkulasikan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 ini maka total dana implementasi kebijakan perimbangan keuangan untuk Riau telah berjumlah hampir mencapai Rp 670 triliun. Sebuah jumlah yang fantastis untuk merubah Riau menjadi sebuah pusat perekonomian yang modern dan terkemuka. Alasan lain adalah kondisi geografis Riau yang berada ditengah poros perekonomian dunia dan lalu-lintas transportasi, baik nasional maupun internasional.

Termasuk masih tersedianya sumber-sumber perekonomian yang potensial dan layak pasar.

Lalu apa yang terjadi ketika kini Riau telah memasuki gerbang waktu tahun 2020 ?.

Terwujudkah visi dan misi yang dulu dicetuskan ?. Sepertinya jauh panggang dari api. Sejak lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Riau justru berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2019 ini saja pertumbuhan ekonomi Riau hanya 2,74 persen. Jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera yang mampu tumbuh sebesar 4,49 persen. Apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Jangankan menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara menjadi lebih baik di Sumatera saja Riau tidak mampu. Sangat kontradiktif sekali ketika bercita-cita ingin menjadi semakin baik lalu yang terjadi malah semakin buruk. Ketika Visi Riau 2020 dicetuskan pertumbuhan ekonomi Riau justru jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih parah lagi, walaupun sudah dua puluh tahun berjalan tingkat kemandirian daerah di Riau belumlah baik. Meskipun mengalami perbaikan namun prosentasenya masih rendah. Pada tahun 2001 tingkat kemandirian daerah pemerintah Provinsi Riau hanya sebesar 25,58 persen. Sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 42,92 persen. Artinya, kucuran dana yang mencapai ratusan triliun belum mampu membuat Riau berdiri tegak atas kemampuan sendiri. Masih terdapat 490.720 jiwa penduduk miskin atau 7,08 persen dimana 314.790 jiwa diantaranya hidup di pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka 5,97 persen yang merupakan nomor tiga tertinggi di Sumatera setelah Kepri dan Aceh. Lapangan pekerjaan utama penduduk adalah di sektor pertanian yakni 37,88 persen dan profesi utama yang dominan adalah sebagai buruh atau karyawan yang mencapai 43,41 persen. Parahnya lagi adalah kisaran tingkat inflasi yang masih cukup tinggi yakni mencapai 4,02 persen. Dengan Nilai Tambah Petani (NTP) yang rendah keadaan tersebut akan semakin memperdalam dan memperparah kemiskinan rakyat.

Lalu mengapa semua itu bias terjadi ? Pertama, sejak otonomi dan desentralisasi fiskal diterapkan semakin tidak terjadi sinergi kebijakan pembangunan di Riau. Antara provinsi dan kabupaten kota tidak membangun suatu kesepahaman pembangunan bersama yang akan mengungkit kesejahteraan rakyat secara lebih kuat. Masing-masing bergerak secara parsial sehingga multiplier effect nya rendah dan pembangunan daerah tidak berlansung secara holistic. Kedua, Riau tidak kunjung terlepas dari ketergantungan terhadap alam dan segala isinya. Eksploitasinya dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengawasan yang tegas. Muaranya adalah kerusakan lingkungan, baik karena PETI dan KARHUTLA. Tidak ada kesadaran bersama untuk membangun inovasi dan kreativitas tanpa merusak alam. Justru dengan bernuansakan irama politik yang tercipta adalah memenuhi keinginan jangka pendek yang mengharu-birukan.

Ketiga, uang yang diperoleh dari kebijakan otonomi dan desentralisasi tidak digunakan dengan baik. Seakan-akan uang itu tidak memperoleh berkah. Dana sekitar Rp 670 triliun yang sudah dicurahkan ke Riau tidak menghasilkan output pembangunan yang bermanfaat tinggi. Marginal cost nya ternyata lebih tinggi dari marginal revenue nya. Oleh karena itu tidak mampu mengungkit kesejahteraan rakyat secara signifikan. Pemanfaatan dana tidak diarahkan pada ekonomi kesejahteraan. Arahnya lebih kepada pencitraan dan lebih bernuansa “penggelapan” oleh aparaturnya pelaksana. Sampai saat ini persoalan transportasi dan air bersih, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan tidak terselesaikan secara memadai dan tepat. Listrik pun masih mengandung masalah yang tak kunjung usai.

Keempat, orientasi pembangunan Sumberdaya Manusia tidak dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran. Ada beasiswa untuk generasi penerus namun arah pemberiannya tidak pada kebutuhan sumberdaya manusia seperti apa yang perlu dipacu agar Riau kian berkhidmat pada kemajuan manusia seutuhnya. Pendidikan tinggi kurang disentuh hanya atas dasar berlainan kewenangan. Riset-ristik unggulan tidak diciptakan untuk membangun inovasi masyarakat dan kewirausahaannya.

Kelima, pintu gerbang ekonomi dunia yang menganga di Riau tidak dimanfaatkan untuk melakukan diversifikasi nilai tambah ekonomi. Ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas telah menyebabkan ekonomi Riau sangat rentan oleh dinamika ekonomi global. Sawit dan karet serta komoditas pertambangan tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang untuk mengurai ketergantungan. Harus ada inovasi untuk menggarap sektor-sektor sekunder dan tersier secara lebih terencana dan serius. Bila tidak maka Riau tetap saja akan menjadi “bulan-bulanan” asing dan aseng.

Gapura tahun 2020 telah dibuka dan Riau mau atau tidak harus melangkah ke dalamnya. Akhir hayat Visi Riau 2020 telah tiba. Mimpi itu ternyata terlalu indah. Begitu lama terlena dengan mimpi itu sehingga Riau bukannya menjadi vocal point Asia Tenggara, malah menjadi bincit di Sumatera. Bagaimanapun, kita harus tetap membangun cita-cita. Tidak sepatutnya mengulang kesalahan. Itu hanya membuat kita jadi Keledai. Merumuskan harapan adalah sebuah kepatutan dan menggapai harapan adalah sebuah keharusan. Semua itu membutuhkan kebersamaan bukan sekedar kepentingan kawan-kawan. Segeralah berbenah. Ontah lah yuang...!!!

“Bak kata pameo tentulah masyarakat di kampung itu sudah merupakan “lauk dalam belanga” ketika pemilu tiba nantinya. Tapi apa hasilnya, tokoh masyarakat kampung tersebut yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif justru kalah telak di kampungnya sendiri yang selama ini dibawah binaannya.”

MENJUAL CALEG

Musim kampanye tiba. Para caleg akan bersaing untuk merebut hati rakyat agar pilihan jatuh pada mereka. Pemilu legislatif di Riau diikuti oleh sekitar 1.466 orang calon legislatif (caleg) dari 12 partai peserta kontestan pemilu guna merebut kursi di DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tentu tidak gampang meengajak masyarakat untuk menentukan pilihannya sesuaidengan keinginan caleg. Rakyat sekarang sudah lebih mengerti menggunakan hak pilihnya dan lebih paham lagi memanfaatkan suasana menjelang pemilu tersebut.

Berkaca pada berbagai pemilihan yang berlangsung sebelumnya, seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan walikota, maupun pemilihan anggota legislatif sebelumnya rakyat telah menikmati pesta demokrasi tersebut dalam persi dan persepsi masing-masing. Cara-cara caleg meyakinkan rakyat sebelum ini juga telah mendidik masyarakat untuk memainkan peranan. Walaupun masih banyak terlihat peranan-peranan tersebut justru berlawanan dengan arti penting demokrasi tetapi keikutsertaan rakyat dalam pemilu adalah wujud partisipasi mereka menentukan siapa yang akan memimpinnya ke depan. Diharapkan mereka juga ikut bertanggungjawab terhadap

hasil pilihannya.

Tingkat partisipasi pemilih dari potensi suara yang seharusnya menggunakan hak pilihnya memang masih relatif rendah. Keadaan ini mengindikasikan masyarakat juga sudah mulai jenih dengan pesta demokrasi karena hasilnya memang tak memberikan pengaruh yang signifikan pada aspirasi dan harapan-harapan rakyat. Mungkin rakyat beranggapan bahwa calon yang mau dipilih tidak memenuhi kriteria mereka sehingga mereka enggan memberikan hak pilihnya untuk seorang kontestan tertentu. Mereka menjadi masyarakat yang “masa bodoh” atau apatis dengan berbagai pemilu yang diselenggarakan negara. Siapa pun yang menang nantinya penrangainya tak akan berubah dari yang sudah-sudah sehingga rakyat merasa lebih baik tidak memilih atau golput dari pada harus ikut terlibat menentukan pemimpin yang tidak akan amanah dengan suara rakyat.

Rakyat menikmati kampanye hanya karena ingin berhura-hura semata dan menerima berbagai atribut yang disediakan para caleg. Tidak jarang mereka mendapat berbagai cendera mata dari berbagai kunjungan para caleg ke kampung mereka. Pengurus kampung juga tidak ketinggalan memanfaatkan situasi itu untuk membuat para caleg bersedia memperbaiki berbagai sarana di kampung mereka. Suatu ketika ada seorang calon legislatif yang telah bertungkus lumus memperbaiki prasarana jembatan di suatu desa karena ingin merebut hati masyarakat desa tersebut. Tidak sedikit pengorbanan yang dikucurkan untuk itu. Pada saat pemilihan ternyata masyarakat kampung tersebut sangat sedikit yang menjatuhkan pilihan pada caleg tersebut.

Seorang calon bupati di suatu kabupaten juga pernah bercerita bahwa untuk merebut hati rakyat di suatu desa ia pernah ditawarkan proposal masyarakat desa tersebut untuk membantu mereka memperbaiki tempat pemakaman umum desa tersebut. Merasa permintaan tersebut masuk akal untuk kepentingan masyarakat sang calon bupati pun meluluskannya dan mencairkan uang yang cukup besar bagi perbaikan TPU desa tersebut. Pada saat pemilihan berlangsung tragisnya tidak satupun suara yang didapat calon bupati

dari desa tersebut.

Kisah lain muncul dari salah satu caleg yang berasal dari suatu kampung. Merasa bahwa kampungnya sendiri maka sewajarnya ia memberikan berbagai fasilitas untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat kampung tersebut. Dibuatlah kelompok-kelompok peternakan dan dibantulah masyarakat untuk memelihara ternak dengan harapan nanti akan meningkatkan pendapatan rakyat.

Bak kata pameo tentulah masyarakat di kampung itu sudah merupakan "lauk dalam belanga" ketika pemilu tiba nantinya. Tapi apa hasilnya, tokoh masyarakat kampung tersebut yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif justru kalah telak di kampungnya sendiri yang selama ini dibawah binaannya.

Lantas, dari berbagai kisah tersebut timbul pertanyaan; penipu kah rakyat? Setelah menerima berbagai fasilitas dari para caleg dan bahkan sampai pada saat hari penyelenggaraan pemilu masih mendapatkan fasilitas (dalam bahasa politik disebut money politic) tetapi tidak memilih caleg tersebut. Jawaban rakyat sungguh singkat; "kami tidak menjanjikan memilih mereka, kami hanya mengatakan insyaallah!, dan bukan kami yang meminta, justru para caleglah yang menawarkan agar kami menyampaikan berbagai proposal ini dan itu. Kami hanya akan menentukan pilihan sesuai hati kami yang terdalam. Fenomena di atas sungguh sesuatu yang sangat kontra produktif bagi terciptanya pesta demokrasi yang berkualitas dan signifikan bagi keberlangsungan perbaikan kemakmuran rakyat. Partisipasi politik seharusnya dilakukan dengan pendekatan hati dan fikiran nan jernih. Bukannya memanfaatkan situasi untuk "menangguk di air nan keruh".

Rakyat menjadikan pesta demokrasi dalam pemilu sebagai sarana melepaskan kekesalan dan kekecewaan terhadap pemerintah. Ujung nyata dari semua itu adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Mereka cenderung golput dan malah memanfaatkan hari pemilihan untuk berlibur. Bagi mereka, khususnya kelas menengah siapapun yang akan terpilih takkan beranjak lenggang dari ketiak. Kita memilih orang-orang yang jika terpilih nanti hanya akan mengeruk keuntungan sendiri dan kroni politiknya. Korupsi tetap saja meraja lela. Bahkan

makin menjamur untuk mengganti biaya kampanye.

Dalam suasana demikian tentu perlu strategi menjual caleg untuk meraup suara pemilih. Rakyat pemilih masih punya hati yang jernih secara individu ketika menentukan pilihan dalam bilik suara. Kampanye secara besar-besaran nampaknya bukan pilihan yang tepat untuk lebih dikedepankan. Rakyat rindu pendekatan persuasif. Hanya saja perlu hati-hati berkunjung untuk menghindari kesan glamor, apalagi pamer. Dimensi kekeluargaan menjadi menarik untuk dicoba. Ketika masyarakat merasa seperti kehilangan tali kekerabatan maka caleg yang mampu masuk sebagai unsur perekat akan menjadi pilihan masyarakat.

Lebih menarik untuk mampu mengedepankan solusi dari masalah-masalah rakyat ketimbang tebar pesona dan politik uang. Namun demikian, harus dipilah kelompok sasaran pada segmennya masing-masing, seperti kelas dan usia. Pada segmen-segmen tertentu para caleg mau tidak mau juga harus berkorban untuk tetap mengedepankan cara-cara yang sedikit berbau materialistik. Jadi, kesimpulannya; kenali pemilih dengan baik untuk dapat memuaskan hasrat memilihnya sehingga bisa diajak untuk menentukan pilihan dalam bilik suara pada diri anda sebagai caleg. Pemilih harus mengenal caleg secara baik supaya ia tidak salah menusuk diantara banyaknya daftar caleg dalam bilik suara. Namun, menang atau kalah adalah retak tangan yang sudah digariskan sebelumnya bahwa memang anda terpilih sebagai anggota legislatif atau tidak. Berbenahlah untuk menata kehidupan berikutnya sepanjang kesempatan untuk itu masih ada. Selamat berkampanye...!

*EKONOMI
PEMBANGUNAN*



Bagian 2

“... Adakah rakyat yang sudah melakukan konversi minyak tanah ke gas akan memperoleh manfaat tambahan dari dana penghematan triliunan rupiah tersebut ? Jika rakyat tau dan merasakan dampak positifnya tentulah tidak sulit untuk mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan anak bangsa ini. Semoga !”



DANA PENGHEMATAN KONVERSI GAS UNTUK SIAPA ?

Melonjaknya harga minyak di pasaran internasional membuat Indonesia kian limbung mengelola energinya. Termasuk dampak ikutan yang menyertainya dan permainan-permainan politik yang mengemuka dibalik persoalan tersebut. APBN jelas akan sangat terbebani mengingat kenaikan satu dolar harga minyak/ICP di atas asumsi APBN berpotensi menambah kebutuhan subsidi sebesar Rp 3,2 triliun. Sedangkan tambahan pendapatan yang akan diperoleh hanya sekitar Rp 2,7 triliun. Berarti setiap kenaikan satu dolar harga minyak berpotensi menimbulkan tambahan beban APBN sebesar Rp 0,5 triliun.

Asumsi harga minyak/ICP dalam APBN adalah US\$ 80,- dan di pasaran internasional harga sudah mencapai US\$ 116,-. Artinya, sudah berselisih US\$ 36,- di atas asumsi APBN sehingga Indonesia membutuhkan dana untuk subsidi penyediaan kebutuhan BBM dalam negeri sebesar Rp 18 triliun. Jumlah ini tentu sangat besar mengingat dengan asumsi harga US\$ 80,- saja dana subsidi yang dibutuhkan sudah mencapai Rp 89 triliun.

Indonesia masih terperangkap dalam kungkungan trio energy yakni minyak bumi, gas dan batu bara. Ketiga sumber energy ini selain

cadangannya yang kian berkurang, dihadapkan pula oleh masalah harga yang kian meroket. Kebutuhan teknologi untuk mengekstraksinya juga semakin canggih sehingga biaya produksinya kian melambung. Repotnya lagi Indonesia konsumsi energinya makin naik dengan pola pemakaian yang tidak efisien.

Kerugian ekonomi akibat kegagalan dalam menata system transportasi saja diperkirakan mencapai Rp 6 triliun setiap tahunnya. Lebih dari 63 persen penduduk Jakarta terkuras pendapatannya mencapai 20-30 persen hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Maklum, sebanyak 11,92 persen dari 59,4 juta unit sepeda motor yang ada di Indonesia tertumpah di Jakarta dan 2,8 juta unit atau 23,73 persen mobil dari 11,8 juta mobil yang ada di Indonesia berseliweran di Jakarta. Akibatnya, kemacetan menjadi ciri khas kota Jakarta dan uang yang terbuang percuma untuk itu sangat besar.

Gebrakan untuk menanggulangi pemborosan energy dan penanganan tata kelola energy di Indonesia memang bukan persoalan yang sederhana. Penanganannya haruslah melibatkan multi pihak dan membutuhkan tingkat kesadaran dan kepedulian semua stakeholder secara sadar dan bertanggungjawab. Pemecahan masalahnya tidak mungkin dilakukan secara sepotong-sepotong karena satu dengan lainnya saling berkait. Tidak mungkin mengurangi pemborosan energy dalam transportasi tanpa ada penataan ruang, khususnya diperkoataan yang konsepsional dan konsisten. Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai dengan moda-moda yang efektif serta bersifat masal sangat urgen dibuat.

Grand strategi energy Indonesia hendaknya mengarah pada upaya pemanfaatan energy-energi biru dan terbaharukan. Sumberdaya seperti matahari, panas bumi, angin, kandungan minyak dalam tanaman, potensi air sungai dan laut merupakan pilihan-pilihan strategis yang segera direalisasikan. Target komposisi pasokan energy nasional tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara mendasar. Minyak bumi, Gas, dan Batu Bara yang masih ditargetkan dalam Perpres tersebut mencapai 83 persen masih sangat memprihatinkan

dari sisi harapan-harapan untuk terciptanya pengelolaan energy yang efisien dan berkelanjutan. Sumber energy matahari, bahan bakar nabati, energy baru dan terbaharukan harus didorong agar mampu memasok lebih dari 35 persen. Bila tidak Indonesia akan tetap dalam perangkat kesemrawutan dan cengkeraman krisis energy dengan dampak-dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian alam, kesehatan dan secara ekonomi semakin tidak efisien.

Berkenaan dengan konversi minyak tanah ke gas memang merupakan alternative yang cukup signifikan. Meskipun hanya sebahagian kecil dari scenario penghematan energy Indonesia, program ini telah menunjukkan hasil-hasil yang positif. Sejak diluncurkan tahun 2007 yang lalu sampai dengan tahun 2010 sudah dapat dikonversi minyak tanah tidak kurang dari 5,2 juta kilo liter dengan beralih pada pemakaian gas sebesar 3,5 juta ton. Sampai tahun 2010 program ini telah berhasil menurunkan konsumsi minyak tanah mencapai 6,2 juta kilo liter. Penghematan netto subsidi energy yang mampu direalisasikan mencapai Rp 13,7 triliun.

Program konversi minyak tanah ke gas ternyata juga telah membuka peluang kerja baru. Pabrik tabung gas yang tumbuh tidak kurang dari 34 buah dengan investasi mencapai Rp 3 triliun dan menghasilkan tabung gas hingga 44 juta buah. Tenaga kerja yang terserap dari investasi sector hulu ini mencapai 100.000 orang. Bila dikaitkan dengan pendistribusiannya serta penyediaan komponen-komponennya maka nilai tambah ekonomi yang tercipta dari multiplier effect program ini tentunya lebih besar.

Letupan gas yang masih terdengar di berbagai tempat tentu tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebagai dampak negative dari program ini. Persoalannya bukanlah terletak pada kegagalan program melainkan masih perlunya penanganan-penanganan yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan program. Walaupun secara statistik tidak ada tabung gas yang meledak, namun letupan gas yang terjadi akibat kebocoran perangkat memasak masyarakat harus tetap menjadi referensi dalam menemukan proses implementasi yang lebih optimal dalam program konversi minyak tanah ke gas ini.

Pertama, memperkuat koordinasi antar institusi. Baik dalam hal pendistribusian maupun dalam hal pengawasan. Tidak bias dibiarkan adanya spekulasi-spekulasi yang ingin menanggung di air keruh karena risikonya sangat fatal. Pengoplosan minyak tanah, pencongkolan tabung gas 3 Kg untuk dimasukkan ke tabung gas 12 Kg sebagai upaya mencari keuntungan dari disparitas harga harus diawasi secara ketat. Termasuk pembuatan tabung gas dan peralatan-peralatannya yang tidak memenuhi standar oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab harus ditindak tegas.

Kedua, mempertajam upaya penyuluhan guna meningkatkan pemahaman rakyat menggunakan perangkat dan peralatan kompor gas dan segala risiko yang dapat timbul serta tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi risiko. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang belum mendukung terhadap perubahan pola hidup memerlukan terapi penyuluhan yang tepat dan meluas. Intensitas dan keberagaman media penyuluhan harus diperhatikan dengan menggunakan kearifan-kearifan local sebagai jembatannya.

Ketiga, memilih sasaran strategis agar program dapat menjangar secara baik. Bila yang menjadi sasaran utama adalah kelompok masyarakat marginal yang tinggal di gang-gang sempit dan tata ruang yang kurang memadai maka ada kecenderungan letupan-letupan gas akan sering terjadi. Kelompok masyarakat ini rentan terhadap resiko karena kepedulian mereka terhadap keamanan dan kondisi tempat tinggal mereka memang kurang memungkinkan untuk itu. Sasaran strategis yang tepat adalah masyarakat pedesaan yang masih memiliki ruang terbuka sehingga bila ada kebocoran gas tidak berpotensi untuk meledak.

Keempat, jaminan distribusi yang kontinyu dan memudahkan rakyat untuk memperolehnya. Kelangkaan gas yang terkadang masih terjadi dimana-mana menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program ini berkurang. Mereka pada akhirnya kembali menginginkan minyak tanah yang pada dasarnya juga sudah langka.

Kelima, Sanksi hukum yang tegas terhadap orang-orang yang

tidak bertanggungjawab, baik bagi pengoplos minyak tanah yang masih banyak dijumpai, maupun pada produsen-produsen tabung gas dan peralatan-peralatannya yang tidak memenuhi standar keamanan yang disyaratkan. Akhirnya, lebih penting untuk diperhatikan adalah masalah transparansi. Konversi minyak tanah ke gas jelas butuh anggaran dan hasil konversi ini pun juga sudah mampu menghemat anggaran mencapai Rp 13,7 triliun.

Rakyat perlu tau dan memahami ini dengan baik dari transparansi pemerintah uang sebesar itu dari mana dan untuk digunakan pada program apa ? Adakah rakyat yang sudah melakukan konversi minyak tanah ke gas akan memperoleh manfaat tambahan dari dana penghematan triliunan rupiah tersebut ? Jika rakyat tau dan merasakan dampak positifnya tentulah tidak sulit untuk mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan anak bangsa ini. Semoga !

*“Apa mungkin karena yang
korupsi di jajaran birokrat itu
adalah “atuk-atuk” mereka atau
kerabat-kerabat dekat mereka
juga.”*

HARUSKAH HARGA BBM NAIK ?

Aksi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM intensitasnya kian meningkat. Berbagai elemen masyarakat mengadakan gerakan menentang kenaikan harga tersebut. Entah mereka mengerti atau tidak apa yang mereka perjuangkan, yang pasti mereka tidak mau adanya kenaikan harga BBM karena mereka menilai selama ini dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Meskipun masyarakat itu sendiri menerima kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Kalangan wakil rakyat pun menengarai masalah tersebut dengan tingkat politisasi yang sangat tinggi. Rapat berhari-hari dengan biaya yang tidak sedikit perdebatan justru semakin alot dan belum memberikan solusi terbaik bagi rakyat. Pertanyaan krusial tentunya tetap seputar harga BBM, haruskah naik ?



Perspektif Subsidi

Jika dianalisis dari aspek subsidi BBM tentunya harus diletakkan pada harga keekonomian sehingga tanpa subsidi APBN tidak dibebani oleh anggaran untuk menekan harga penjualan BBM dalam negeri. Dengan harga Rp 4.500,- per liter dana subsidi yang harus disediakan adalah Rp 123,6 triliun. Itupun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 90 per barel. Dengan harga ICP yang sudah mencapai US\$ 105 per barel maka beban subsidi ini semakin membengkak menjadi Rp 178,67 triliun.

Jumlah ini sangat besar, dan pada posisi itu, jika harga jual BBM di dalam negeri dinaikkan menjadi Rp 6.000,- per liter maka subsidi BBM dapat ditekan menjadi Rp 137,38 triliun. Artinya, dana subsidi yang dibutuhkan untuk menjaga APBN tetap besar. Sakitnya, dana tersebut diperuntukkan bagi memenuhi pelayanan terhadap orang-orang kaya atau kelas menengah ke atas. Sebanyak 53 persen dana terserap untuk kepentingan pemilik mobil pribadi atau sebesar Rp 72,81 triliun. Selebihnya untuk mensubsidi konsumsi BBM pemilik sepeda motor sebesar 40 persen atau sekitar Rp 54,95 triliun. Kendaraan umum hanya menikmati 7 persen saja atau Rp 9,62 triliun.

Melihat kenyataan alokasi subsidi seperti itu tentunya merupakan suatu keadaan yang sangat timpang dari aspek keadilan. Orang kaya menikmati subsidi demikian besar sementara subsidi bagi masyarakat miskin sangat kecil. Artinya, dana lebih banyak digerogeti oleh orang-orang yang sepatutnya justru menyadari betapa pentingnya dana itu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal jika harga BBM diletakkan pada harga keekonomiannya maka harga jual BBM dalam negeri untuk menghapus subsidi adalah sebesar Rp 10.950,-. Masih jauh lebih rendah dari harga BBM di kampung-kampung yang terkadang mencapai Rp 15.000,- per liter.

Pada harga ini APBN tidak harus dibebani oleh keperluan mensubsidi harga sebesar Rp 178,67 triliun. Artinya, dana ini dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih efektif bagi rakyat, misalnya membangun pembangkit listrik tenaga surya yang mampu

menghasilkan tenaga sebesar 54 MGW hanya dibuthkan dana Rp 1,3 triliun. Dengan dana tanpa subsidi BBM sebesar Rp 178,67 triliun dapat dibangun sebanyak 137 pembangkit listrik tenaga surya dengan produksi listrik mencapai 7.421 MGW. Hal ini juga akan mengurangi subsidi listrik yang dalam APBN sudah mencapai Rp 65 triliun.

Dari perspektif subsidi maka menaikkan harga BBM nampaknya merupakan sebuah keharusan demi tercapainya keadilan rakyat. Hanya saja pemerintah hendaknya mampu mengantisipasi dampak-dampaknya. Hal pertama yang terpengaruh adalah naiknya angka inflasi. Walaupun dalam skenario hanya akan meningkat sebesar 1,2 persen namun dalam kenyataannya bias dua kali lipat dari itu. Inflasi pada barang-barang kebutuhan pokok rakyat berdasarkan pengalaman selama ini naik melebihi 50 persen. Inilah yang menjadi momok bagi rakyat dan mengapa mereka menolak kenaikan BBM. Pemerintah sepertinya belum punya kemampuan menanggulangi dampak lanjutan yang timbul. Organisasi angkutan saja sudah berencana untuk menaikkan ongkos angkut sebesar 30 persen.

Perspektif Alternatif Kebijakan

Dalam kerangka menyelamatkan APBN dari defisit yang membengkak akibat kenaikan harga minyak di luar negeri solusi yang ditempuh tentulah tidak satu. Disinilah para politisi saling berdebat. Alternatif kebijakan yang lain dapat ditempuh selain menaikkan harga BBM, seperti penjadwalan proyek-proyek pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas, penjadwalan utang Negara, khususnya utang luar negeri dan tentunya dengan memberantas korupsi secara lebih tegas dan efektif. Kebijakan lainnya adalah pada posisi penerimaan dengan menaikkan penerimaan pajak, hasil-hasil laba BUMN dan peningkatan produktivitas dalam negeri untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat pada tingkat harga yang lebih ekonomis sebagai substitusi impor.

Posisi utang Negara sampai Januari 2012 mencapai Rp 1.837 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp 1.214 triliun

HARUSKAH HARGA BBM NAIK ?

atau 66 persen dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 623,- triliun atau 34 persen. Ini berarti melakukan penjadualan utang luar negeri takkan mampu menombok deficit APBN. Menaikkan utang dari menerbitkan surat berharga Negara keleluasaannya kian menyempit. Jumlahnya sudah sangat besar dan beban tetap yang harus dibayar pemerintah dari bunganya juga sudah sangat memberatkan. Saat ini saja pembayaran bunga utang sudah mencapai Rp 122,2 triliun. Artinya, dari perspektif ini dalam jangka pendek, maka kebijakan menaikkan harga BBM masih lebih memungkinkan. Menambah utang Negara, baik melalui pinjaman luar negeri maupun dengan menerbitkan surat berharga Negara sulit dilakukan.

Solusi lain yang dapat ditempuh adalah melakukan efisiensi anggaran dan memberantas korupsi secara tegas dan berkesinambungan. Sinyalemen selama ini, dana yang dihabiskan untuk kepentingan pelayanan birokrasi pemerintah dan para wakil rakyat mendekati 49 persen dalam struktur APBN. Ini berarti dari total belanja pemerintah Rp 1.435,4 triliun separohnya lari ke kepentingan birokrasi dan wakil rakyat atau sekitar Rp 703,35 triliun. Sisanya, sebesar Rp 732,05 diperuntukkan sebagai dana pembangunan untuk rakyat. Sayangnya berdasarkan kajian dari Transparansi Internasional Indonesia diperkirakan dana tersebut masih mengalami kebocoran mencapai 30 persen yang kalau dirupiahkan menjadi sebesar Rp 219,6 triliun. Ditambah dengan kemampuan menghemat biaya pelayanan aparatur sampai 30 persen pula atau sebesar Rp 211,01 triliun. Jadi dengan kedua cara ini maka dana yang mungkin dihemat mencapai Rp 427,61 triliun.

Jumlah dana dari penghematan belanja APBN melalui efisiensi anggaran birokrasi dan pemberantasan korupsi sebetulnya sangat cukup untuk membiayai pembangunan Negara. Meskipun harga minyak dunia naik maka tak perlu mencabut subsidi dengan menaikkan harga BBM dalam negeri. Persoalannya sekarang adalah sulitnya memberantas korupsi di Indonesia dan mengefisienkan anggaran birokrasi, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Kalaulah para aktivis dan politisi focus perjuangannya tertuju pada

masalah ini maka dana untuk kesejahteraan rakyat makin besar dapat dianggarkan. Pada akhirnya, dalam jangka pendek nampaknya kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri lebih ideal dapat diterima untuk dilakukan. Kita memang masih lebih senang memanjakan para birokrat dan koruptor. Pergerakan mahasiswa, buruh dan masyarakat pun tidak massif dalam menengarai persoalan ini seperti cara-cara yang mereka lakukan dalam menolak kenaikan harga BBM.

Apa mungkin karena yang korupsi di jajaran birokrat itu adalah “atuk-atuk” mereka atau kerabat-kerabat dekat mereka juga.

Alternatif kebijakan lainnya adalah melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri. Sumbernya yang utama adalah dari pajak dan non-pajak. Dari penerimaan pajak saat ini mampu dihimpun sebesar Rp 1.032,6 triliun atau 12,7 persen dari PDB dan penerimaan non pajak sebesar Rp 278 triliun atau 3,4 persen dari PDB. Ini berarti jika dibutuhkan dana untuk menutupi subsidi BBM sebesar Rp 178,67 triliun maka kita harus mampu menaikkan pendapatan sebesar Rp 41,29 triliun lagi untuk menutupi kekurangan dana subsidi yang terjadi akibat kenaikan harga minyak dunia.

Persolannya, mampukah penerimaan pajak dinaikkan sebesar 4 persen lagi. Atau pendapatan non pajak ditingkatkan. Hasil renumerasi yang tinggi terhadap pegawai pajak yang belum juga mampu menaikkan kinerja hasil pajak dan kilah serta kelakuan para pembayar pajak yang selama ini selalu ingin menghindar dari pajak tentulah membuat kebijakan ini tetap tidak mampu menjadi solusi dalam jangka pendek. Dari aspek fiscal kebijakan memperbesar pajak mungkin bukan solusi yang menarik bagi dinamika sector riil. Peningkatan pajak membuat para investor enggan menanam modal di Indonesia sehingga percepatan untuk membuka lapangan pekerjaan kian terseot-seot.

Pada akhirnya, menaikkan harga BBM masih merupakan jalan pahit yang mesti ditempuh dalam waktu dekat ini ketimbang melakukan kebijakan lain yang masih diangan-angan. Tapi, itu bukan jalan yang selalu harus ditempuh. Kita memang harus sesegera

HARUSKAH HARGA BBM NAIK ?

mungkin keluar dari jerat energy ini, baik BBM mapun listrik. Sumber-sumber energy alternative yang hemat BBM harus diwujudkan dan penghematan konsumsi BBM harus dilakukan. Sambil berjalan, pemberantasan korupsi dan efisiensi birokrasi yang telah begitu banyak menghambur-hamburkan uang rakyat harus semakin keras kita perjuangkan. Jangan-jangan kebijakan menaikkan harga BBM hanyalah sebuah trik politik pengalihan isu dari banyaknya para koruptor yang mulai terkuak belangnya pada akhir-akhir ini. Entahlah...!!!



“Manajemen pemerintahan kita memang menganut teori tambal sulam sehingga kualitas antisipasi strategisnya sangat rendah. Rakyat lebih banyak terimbas dari kebobrokan manajemen itu sendiri ketimbang mekanisme pasar yang sesungguhnya dapat terjadi.”



MENYIASATI KENAIKAN BBM

Beban subsidi BBM membengkak sejalan dengan naiknya harga minyak dunia yang telah mencapai harga 120 dolar AS per barel, padahal asumsi harga APBN hanya 90 dolar per barel. Walau sudah dikunci dengan undang-undang untuk tidak menaikkan harga minyak dalam negeri, kondisi terkini menyebabkan kebijakan itu harus diubah. Pemerintah mulai mengancam kenaikan BBM bersubsidi dari 4500 rupiah per liter menjadi 6000 rupiah per liter.

Isu kenaikan itu pun mulai di gulirkan dan berbagai tanggapan pun bermunculan. Para wakil rakyat mendapat wadah baru untuk saling berseteru antara setuju dan tak setuju. Dilapangan para spekulasi langsung pasang kuda-kuda. Bagi mereka kenaikan bias jadi ajang menikmati rente baru. Rakyat yang kurang mampu mulai merasakan dampaknya. Harga-harga merangkak sedikit demi sedikit. Padahal keputusan jadi atau tidak harga BBM naik masih menunggu hasil APBN Perubahan 2012.

Manajemen pemerintahan kita memang menganut teori tambal sulam sehingga kualitas antisipasi strategisnya sangat rendah. Rakyat lebih banyak terimbas dari kebobrokan manajemen itu sendiri ketimbang mekanisme pasar yang sesungguhnya dapat terjadi.

Kenaikan BBM bersubsidi sebesar 1000 rupiah menurut para ahli akan berdampak pada inflasi sekitar 1,2 persen. Ini berarti kenaikan sebesar 1500 rupiah seperti yang direncanakan secara teoritis akan berpengaruh pada naiknya angka inflasi sebesar 1,8 persen. Bila sebelum kenaikan BBM bersubsidi inflasi di Pekanbaru mencapai 1,28 persen maka setelah kenaikan harga BBM diperkirakan mencapai

2,48 persen. Dalam kenyataannya sering terjadi kenaikan harga-harga barang di pasar dapat jauh lebih tinggi dari yang dikalkulasi secara teoritis tersebut. Hal itu terjadi karena alat kendali pasar oleh pemerintah sangat tidak memadai dan cirri ekonomi kapitalistik yang sangat dominan.

Kenaikan inflasi dapat menyebabkan tekanan makin berat bagi penduduk miskin. Apalagi bagi Riau yang pada posisi Maret 2011 s/d September 2011, menurut data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Pada bulan Maret 2011, P1 Provinsi Riau sebesar 1,21, naik menjadi 1,36 pada September 2011, sedang P2 nya pada Maret 2011 sebesar 0,29, naik menjadi 0,39 pada September 2011. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin bergerak menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin makin besar. Bila inflasi semakin tinggi maka masyarakat miskin kian tercekik. Kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup makin berkurang dan menimbulkan dampak kesengsaraan hidup yang makin berat.

Bagaimana seharusnya hal ini disiasati. Pemerintah pada dasarnya dihadapkan pada sebuah dilemma yang sebenarnya tidaklah terlalu rumit. Selama ini subsidi BBM memang sngat tidak adil. Selama ini orang kaya lah yang menikmati subsidi BBM. Menurut kajian Irwan Andri A dan Birny B (Gatra, No.16, 23-29 Februari 2012) mobil pribadi milik para orang-orang kaya menyedot 53 persen jatah BBM bersubsidi. Sepeda motor menghabiskan sekitar 40 persen dan angkutan umum hanya 7 persen. Kuota di APBN sebesar 21,2 juta kilo liter per tahun dengan asumsi harga 90 dolar AS maka orang-orang kaya pemilik mobil pribadi menikmati kebijakan subsidi ini mencapai 65,5 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang tidak kecil yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin. Bila ditambah dengan subsidi yang dihisap untuk sepeda motor sebesar 49,4 triliun rupiah maka pemerintah memiliki kesempatan menggunakan anggaran sebesar 114,9 triliun rupiah. Jumlah yang sebenarnya sangat ideal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

bila dilakukan dengan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Ada tiga aspek yang sebenarnya amat penting dilakukan pemerintah, yakni membenahan system dan moda transportasi umum. Prasarana dan sarana transportasi yang mampu mengurangi pemborosan menjadi mendesak dilakukan agar kebutuhan pemakaian BBM dalam negeri dapat dikurangi sehingga Indonesia tidak menjadi net oil importer. Disamping itu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang mengarah pada mutu dengan biaya murah haruslah secara tegas diimplementasikan. Hal ini akan sangat berdampak pada menurunkan beban pengeluaran rakyat.

Aspek lainnya adalah intervensi pasar terstruktur dan bertanggungjawab dalam aspek mematahkan kiat-kiat spekulasi dan para pemburu rente yang bermain dalam kisruh mekanisme pasar, khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok. Harga-harga yang tidak wajar harus mampu diantisipasi, baik melalui penegakan hukum maupun dengan menjaga kelancaran arus lalu lintas barang. Pemerintah harus berfikir dan bekerja keras dalam masalah ini mengingat tantangan lain diluar persoalan BBM juga mengancam, yakni perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu ketersediaan bahan pokok rakyat.

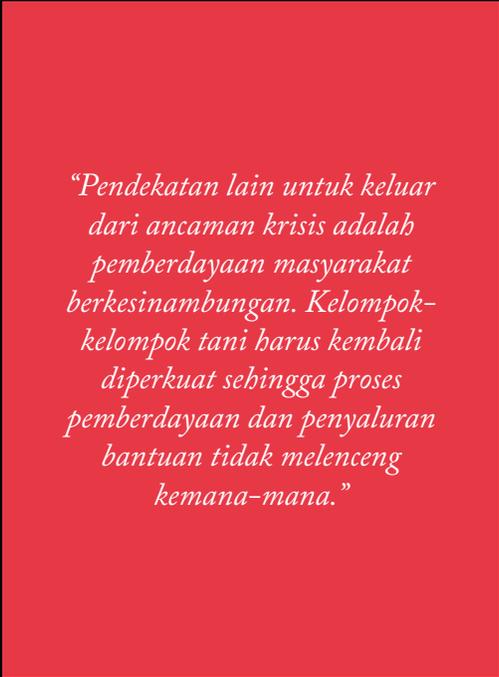
Masyarakat sebagai orang yang terkena dampak dari kenaikan BBM bersubsidi ini tentunya harus menata ulang strategi alokasi pendapatannya. Hal-hal yang bersifat konsumtif harus dikurangi dan pengeluaran yang berkaitan dengan aspek transportasi harus dibatasi. Skala prioritas pengeluaran rumah tangga semakin dipertajam dan sinergi antar sesama harus kian ditingkatkan. Dalam keadaan seperti ini solidaritas antar sesama sangat dibutuhkan sehingga beban yang ditanggung semakin terasa ringan. Melakukan hal-hal yang kurang konstruktif tentunya akan semakin memperkeruh suasana dan tidak memberi dampak pada perbaikan kualitas kehidupan. Emosi pasti meningkat intensitasnya, namun melalui pengendalian yang terukur, kebersamaan dapat dibangun untuk menghasilkan hal-hal yang produktif yang selama ini diabaikan akibat dimanjakan oleh subsidi.

MENYIASATI KENAIKAN BBM

Bagaimanapun rakyat harus tetap waspada mengawasi dan menuntut pemerintah agar dana subsidi BBM yang sekarang bakal dicabut dengan menaikkan harga BBM dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Bukan untuk memperbaiki gedung-gedung DPR dan berbagai fasilitas fantastis yang ada didalamnya. Bukan pula untuk membiayai proyek-proyek mercu suar yang kait kelindannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sangatlah minim. Apalagi untuk dikorupsi bagi memperbesar pundi-pundi pejabat yang sangat menghimpit rasa keadilan di masyarakat.

Bagi Riau sendiri tentunya harus lebih antisipatif. Apalagi Riau sangat sensitive kenaikan laju infalsinya dari aspek kenaikan harga barang kebutuhan pokok rakyat. Riau sangat tergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari luar sehingga gangguan dalam aspek distribusi sangat berpengaruh pada peningkatan harga-harga. Selain menghadapi musim hujan yang cenderung menghasilkan banjir gangguan distribusi juga dapat muncul dari kelalian menjaga kualitas prasarana transportasi yang ada selama ini. Diberbagai wilayah kabupaten rakyat menjerit akibat buruknya kondisi jalan dan jembatan. Keadaan ini dapat mengancam produktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas hidup mereka.

Harus ada kebijakan khusus yang ditempuh mengantisipasi persoalan ini. Tentunya harus lebih serius dari upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan PON. Urgensi perbaikan dinamika dan lalu-lintas barang dan orang di Riau memerlukan sentuhan terstruktur dan sistematis serta berkesinambungan. Kebijakan yang dilakukan tidak bisa sepotong-sepotong tetapi harus komprehensif mengingat daya dukung prasaranan yang sangat minim sedangkan sarana transportasi dan kebutuhan akan sarana transportasi yang layak dan memadai meningkat dengan pesat. Dalam jangka pendek pengendalian pasokan melalui pintu-pintu impor dan sentra-sentra produksi harus semakin kondusif bagi memudahkan masyarakat mengakses segala kebutuhan pokoknya. Semoga....!!!



“Pendekatan lain untuk keluar dari ancaman krisis adalah pemberdayaan masyarakat berkesinambungan. Kelompok-kelompok tani harus kembali diperkuat sehingga proses pemberdayaan dan penyaluran bantuan tidak melenceng kemana-mana.”

FINANCIA



L CRISIS

KRISIS BELUM USAI

Target kinerja ekonomi Indonesia kembali harus direvisi. Dinamika ekonomi global belum menjanjikan adanya perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi 2009 pada awalnya diprediksikan sebesar 6 persen harus dilakukan penyesuaian ke angka 4-4,5 persen. Nilai tukar Rp 9.400 menjadi Rp 11.000,- dan kemudian bertahan pada kisaran Rp 10.200,-. Pergerakan harga minyak di pasaran Internasional kembali meningkatkan harga hingga ke level 58,6 dolar AS. Pada posisi ini pemerintah terpaksa membayar subsidi BBM mencapai Rp 2 triliun.

Bila harga minyak menembus angka 60 dolar AS jumlah subsidi kian membengkak. Di pasaran internasional pada akhir-akhir ini justru harga kian melonjak mencapai 72 dolar AS. Ini berarti beban subsidi kian berat dan pemerintah semakin terbatas kemampuannya melaksanakan pembangunan. Rakyat bakal menghadapi tantangan baru. Meski ada statemen pemerintah harga BBM dalam negeri belum akan dinaikkan tetapi itu tentu hanya mungkin bertahan sampai selesai Pilpres. Jika harga minyak melonjak terus maka harga BBM tidak mungkin dipertahankan terus, kecuali pemerintah mau ambil risiko bayar subsidi dalam jumlah besar.

Krisis dan berbagai dampaknya memang belum usai. Walaupun telah ada kenaikan harga-harga komoditas pertanian, seperti CPO di pasaran internasional tetapi kini mulai melorot lagi. Petani kembali dihadapkan pada risiko tidak tertutupnya biaya produksi dan pemasaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebun-kebun sawit bisa kembali terlantar tidak mendapatkan perawatan yang baik. Akibatnya produksi menjadi tidak memadai, baik dari segi mutu maupun kuantitasnya. Keadaan ini menjadi unsur penekan kesejahteraan petani. Dua masalah besar yang saling berkait membuat petani kian terpuruk, yakni turunnya harga dan turunnya kuantitas dan kualitas hasil produksi.

Dampak langsung dari berkurangnya kemampuan pemerintah melakukan pembangunan dan terpuruknya kesejahteraan petani perkebunan adalah kian mandeknya dinamika sektor riil. Daya beli masyarakat melorot karena pendapatan terkoreksi tajam. Nilai belanja di pasar-pasar menyusut dan para pedagang yang kekurangan pembeli jika kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Nilai transaksi tak mampu melahirkan keuntungan yang memadai bagi menutup biaya tetap sehingga kerugian menganga didepan mata dan harus ditelan betapapun pahitnya.

Berharap ada dorongan bergeraknya sektor riil dari belanja pemerintah ternyata juga sulit. Keterbatasan memperbesar dana pembangunan akibat besarnya cicilan hutang dan beban subsidi membuat dana pembangunan kian seret. Masyarakat kurang memiliki kesempatan mendapat peluang kerja dari proyek-proyek pemerintah yang kian terbatas. Seharusnya pemerintah berperan lebih besar ketika variabel ekonomi lainnya mandek. Investasi pemerintah harus mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan. Proses selanjutnya adalah bergeraknya sektor ekonomi lain karena adanya konsumen berbagai produk.

Mencermati pergerakan ekonomi dunia dan variabel-variabel non ekonomi lainnya krisis ekonomi nampaknya belum akan usai. Perekonomian Amerika dan menurunnya pertumbuhan ekonomi

China memberikan gambaran perekonomian yang masih labil. Harga minyak kembali membengkak dan harga komoditas pertanian yang memburuk memberi sinyal belum adanya konsumen yang konsisten mampu berbelanja sebagaimana mestinya. Keterbatasan konsumen membuat permintaan turun. Dinamika ekonomi masih akan lambat.

Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 235 juta jiwa persoalan ekonomi hendaknya diletakkan pada visi dan perilaku yang jelas. Sebagai negara yang banyak dikaruniai sumber-sumber alam seharusnya Indonesia dapat mengatasi krisis ini dengan cepat. Konsumsi dalam negeri terhadap produk dalam negeri harus terus didorong agar ketergantungan ekonomi pada asing dapat dikurangi. Dana pembangunan lebih difokuskan pada upaya-upaya mendorong produktivitas masyarakat dan mengangkat daya beli. Inflasi dijaga agar tidak menguras kemampuan masyarakat membeli barang. Jaringan distribusi diperlancar.

Pengendalian terhadap impor perlu dilakukan agar industri dalam negeri memiliki waktu bernafas untuk memperbaiki kualitas dan daya saing. Tekanan pada peningkatan mutu dan kemampuan pasar terhadap industri dalam negeri harus secara tegas diberlakukan. Tidak mungkin mempertahankan proteksi dalam kurun yang lama sejalan dengan derasnya arus globalisasi.

Pendekatan lain untuk keluar dari ancaman krisis adalah pemberdayaan masyarakat berkesinambungan. Kelompok-kelompok tani harus kembali diperkuat sehingga proses pemberdayaan dan penyaluran bantuan tidak melenceng kemana-mana.

Subsidi sebaiknya diberikan pada aspek produktivitas. Mereka yang mampu menghasilkan kedele misalnya diberi insentif yang sepadan sehingga gairah untuk menanam kedele berkualitas kian meningkat.

Penyelesaian aspek otonomi daerah dalam aspek pengawasan menuju manfaat yang lebih tinggi juga sangat krusial peranannya dalam mempercepat Indonesia menjadi negara yang mandiri. Dana-dana pembangunan banyak yang terbuang percuma akibat sistem pengawasan yang tidak memadai. Aparatur penegak hukum di daerah

menjadi kunci suksesnya. Bila penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka kualitas kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan secara sinergis. Mutu pembangunan didaerah relatif rendah dipicu oleh lemahnya sumberdaya manusia dan rendahnya kualitas penegakan hukum.

Dalam aspek sumberdaya manusia kemampuan perencanaan perlu ditingkatkan agar penajaman prioritas makin baik. Terkait dengan itu maka pendataan yang akurat sangat diperlukan. Memberdayakan sistem administrasi desa dan perangkat-perangkatnya merupakan hal penting dilakukan. Infrastruktur pendataan tersebut diperbaiki sejalan dengan pemberdayaan orangnya. Insentif terhadap mereka dapat diberikan sesuai dengan kinerja pendataan mereka terhadap warganya. Diperkotaan, aparat hukum harus ikut membantu menumbuhkan keteraturan administrasi warga sehingga tidak ada rumah atau masyarakat yang melecehkan arti dari pendataan. Proses ini selanjutnya akan memudahkan proses-proses yang lain, seperti politik, bantuan sosial dan evaluasi kesehatan. Termasuk menjaga keamanan dari ancaman-ancaman teroris serta mengurangi biaya yang harus ditanggung untuk pelacakan bagi pelaku-pelaku kejahatan. Korupsi dengan sendirinya juga dapat diminimalisir. Semoga !!!

*“...penduduk miskin Riau sampai
September 2013 mencapai
522.530 jiwa atau 8,42 persen
dari jumlah penduduk. ...Artinya,
jumlah orang miskin kian
membludak ditengah-tengah
pertumbuhan ekonomi yang
demikian tinggi.”*

PENDUDUK MISKIN RIAU

Data BPS sampai September 2013

MENCAPAI
522.530
ATAU
8,42%



MENINGKAT 41.220 JIWA

RIAU MENUJU NEGERI BUSUNG LAPAR ?

Pertumbuhan ekonomi Riau selama ini senantiasa diagungkan sebagai pertumbuhan yang lebih tinggi dari nasional. Sampai tahun 2013 perekonomian Riau memang masih tumbuh 6,01 persen, walaupun lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Persoalan krusial perekonomian Riau memang bukan pada masalah pertumbuhan. Kerencuannya ada pada siapa yang menikmati kue ekonomi tersebut. Artinya, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau ?

Mengacu pada ukuran yang dipakai oleh BPS salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk adalah data konsumsi kalori dan protein per kapita. Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein per kapita sehari. Menurut Widya Pangan dan Gizi (dalam Berita Resmi BPS, TW IV 2014) norma kecukupan gizi yang dianjurkan per kapita per hari adalah penyediaan energi 2.500 kalori dan protein 55 gram. Di samping itu FAO (Food and Agriculture Organization) menganjurkan bahwa bagi Indonesia untuk mencapai kecukupan gizi

yang seimbang dapat digunakan pola penyediaan pangan harapan dengan kecukupan energi dari padi padian 50 persen, umbi umbian 5 persen, pangan hewani 15 20 persen, lemak dan minyak 10 persen, biji berminyak/kacang kacangan 8 persen, gula 67 persen dan sayur sayuran 5 persen.

Lantas bagaimana dengan Riau ? Sebagaimana dilansir BPS bahwa penduduk miskin Riau sampai September 2013 mencapai 522.530 jiwa atau 8,42 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini meningkat sebanyak 41.220 jiwa dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Artinya, jumlah orang miskin kian membludak ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang demikian tinggi.

Garis yang dipakai untuk menentukan penduduk tergolong dalam kategori miskin adalah rerata pengeluaran per kapita per bulan. Untuk Riau selama periode September 2012 sampai dengan September 2013 adalah sebesar Rp 350.129,- yang terbagi ke dalam komponen Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 258.100,- dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 92.029,- Dengan demikian bila pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi seseorang dibawah standar tersebut dapat dikatakan miskin. Terutama bila belanja kebutuhan makanannya tidak mencapai angka Garis Kemiskinan Makanan maka orang tersebut tidak saja dapat dikatakan miskin tetapi juga secara perlahan mengarah pada keadaan kekurangan gizi yang pada akhirnya menjadi busung lapar.

Data statistik di Riau untuk mereka yang tergolong miskin dengan jumlah mencapai 8,42 persen ternyata juga dihadapkan pada kondisi menuju ketidak cukupan gizi atau busung lapar. Konsumsi kalori makanan secara rerata masyarakat Riau ternyata kian menurun. Pada tahun 2005 kecukupan kalori sudah lebih rendah dari batas standar kecukupan penyediaan energi 2.500 kalori per kapita per hari, yakni sebesar 2.083,38 dan pada tahun 2008 turun menjadi 2.144,21. Sedangkan pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi 1.932,53 dan pada tahun 2010 semakin rendah lagi, yakni hanya sebesar 1.903,59 kalori per kapita per hari. Untuk tahun 2013 keadaan

ini kian akan menciut mengingat tingginya tingkat inflasi di Riau.

Data ini menunjukkan bahwa akses masyarakat miskin terhadap kecukupan kalori untuk mampu produktif semakin menyempit. Rakyat miskin Riau kian terjebak pada lingkaran setan yang tak berujung pada kebaikan. Ketidacukupan gizi menyebabkan mereka semakin rentan terhadap tekanan eksternal dan akan gampang terserang penyakit. Disisi lain masyarakat seperti itu akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Energi dan protein yang tidak memadai akan melemahkan kerja otak sehingga penduduk Riau yang sebahagian besar berusia 0-19 tahun akan kekurangan kemampuan membekali diri dengan keahlian dan wawasan kedepan. Pada akhirnya kelompok masyarakat seperti ini tidak akan mampu masuk ke dunia kerja yang profesional dan mandiri. Mereka akan tetap miskin karena gizinya tak baik, kesehatannya buruk, pengetahuan dan keterampilannya rendah, serta pendapatannya tidak memadai.

Lingkaran kemiskinan seperti itu diperburuk lagi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terstruktur dengan baik. Artinya, secara struktural masyarakat dimiskinkan oleh kebijakan pemerintahnya yang kurang berpihak. Dorongan untuk memperbaiki keadaan buruk yang menimpa masyarakat tak dipicu oleh kebijakan dan regulasi pemerintah. Bahkan ketika dorongan untuk perbaikan itu muncul dari masyarakat justru tidak jarang pemerintah malah mementahkannya melalui berbagai aturan main dan ketentuan-ketentuan yang mematikan kreativitas rakyat. Penganggaran publik yang tidak partisipatif dan minim manfaat bagi rakyat semakin menyebabkan masyarakat terkungkung oleh persoalan-persoalan struktural.

Setiap tahun selama hampir satu bulan masyarakat Riau diterpa bencana jerabu asap. Ini adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak taat azas dan taat hukum. Generasi muda Riau sudah sejak tahun 2000 senantiasa diselimuti asap yang menyesakkan. Akibatnya dalam jangka pendek adalah terkena ISPA dan dalam jangka panjang akan lebih menyakitkan lagi yakni adanya ancaman kanker dan

menurunnya fungsi otak. Masa depan yang buruk akan dialami oleh generasi Riau di masa yang akan datang. Secara ekonomi mereka akan tetap bergelimang kemiskinan dan serba ketidakcukupan dan secara sosial akan banyak muncul masyarakat yang berkeadaan cacat (disabilities) baik secara mental maupun physical.

Untuk itu tentunya tidak mudah memberikan solusi. Bila para pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif hanya terfokus pada bagaimana memenangkan pertarungan politik merebut kekuasaan pada tahun 2014 ini maka penanganan masalah tersebut hanya akan bersifat temporer dan tidak strategis. Sebelum ini pemerintah Riau lebih banyak terjebak pada kebijakan futuristi yang tidak membunmi sehingga berbagai program pembangunan hanya bersifat sahawat sesaat. Begitu banyak sumberdaya yang terbuang tetapi ternyata tidak membuat rakyat ian sejahtera. Malah selain didera kemiskinan mereka juga sedang menuju jurang ketidakcukupan asupan kalori atau menggelinding kearah busung lapar. Padahal tantangan yang dihadapi kian rumit dan berat.

Ke depan diperlukan upaya komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan rakyat, khususnya yang ada di pedesaan. Namun pemerintah tidak dapat melakukan pendekatannya secara sporadis, apalagi spontan. Pendekatan strategis harus dilakukan meskipun akan kurang populer secara politis dan harus pula berbenturan dengan pengendali-pengendali kekuasaan ekonomi. Basisnya harus berasal dari potensi yang ada pada masyarakat dan pemerintah mendorong motivasi produktif masyarakat melalui proses pemberdayaan yang berkesinambungan dan pemerataan aset ekonomi yang transparan dan memihak. Jangan sampai masyarakat malah terjebak oleh pesona pembangunan yang pada dasarnya tidak bersentuhan dengan proses transformasi mereka ke arah perbaikan kesejahteraan. Semoga...!

*“Problema tenaga
ketenagakerjaan di Riau tidak
sejalan dengan perkembangan
perekonomian yang saat ini
terjadi. Bila pengangguran di
Riau semakin besar justru
pertumbuhan ekonomi semakin
membaik dan berada pada level
yang tinggi.”*

RIAU; NEGERI RIBUAN PENGANGGUR

Badan Pusat Statistik Riau merilis data pengangguran di Riau untuk Agustus 2010. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,72 persen. Keadaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2009 yang hanya sebesar 8,56 persen. Naiknya angka pengangguran didorong oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencapai 5,16 persen. Sampai Agustus 2010 angkatan kerja bertambah 116.632 jiwa dimana pada Agustus 2009 baru sebanyak 2.260.862 jiwa maka pada Agustus 2010 naik menjadi 2.377.494 jiwa.

Pesatnya kenaikan angkatan kerja ternyata tidak sebanding dengan naiknya kesempatan kerja nyata atau jumlah orang yang bekerja. Pada Agustus 2009 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.067.357 jiwa sedangkan tahun 2010 naik menjadi 2.170.247 jiwa atau meningkatnya hanya 4,98 persen. Tidak seimbangna kenaikan angkatan kerja dengan kesempatan kerja inilah yang menyebabkan Riau menjadi negeri yang dipenuhi ribuan penganggur.



Jumlahnya pada tahun 2010 mencapai 207.247 jiwa dengan peningkatan mencapai 7,1 persen jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009.

Persoalan pengangguran di Riau tidak sebatas pengangguran terbuka semata. Masyarakat yang setengah menganggur juga tidak sedikit jumlahnya. Mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau pengangguran tak kentara pada Agustus 2010 mencapai 821.918 jiwa atau 37,87 persen dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja. Ini berarti penduduk yang benar-benar bekerja hanya 62,13 persen. Sisanya akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan memerlukan perhatian tertentu dari pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan social tertentu dalam dinamika dan kehidupan masyarakat.

Selain aspek pengangguran terbuka dan pengangguran tak kentara. Riau juga dihadapkan persoalan banyaknya masyarakat yang bekerja di setor pertanian. Walau porsinya sedikit menyusut namun pada Agustus 2010 masih terdapat 44,6 persen penduduk yang bekerja di sector pertanian. Pada satu sisi merekalah yang sebenarnya menjadi penganggur tak kentara namun pada posisi lain dapat menjadi potensi yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sector-sector lain. Mereka yang bekerja disektor pertanian cenderung menggunakan sedikit waktu dan masih tersisa banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain. Industri rumah tangga dapat didorong produktivitasnya dengan menggunakan tenaga kerja pertanian diberbagai pedesaan. Apalagi sebahagian besar masyarakat petani adalah mereka yang bekerja di sub-sektor perkebunan.

Diamati dari status pekerjaan maka sebahagian besar penduduk bekerja sebagai buruh di sector pertanian ini. Mereka menjadi tenaga-tenaga perkebunan dan biasanya bukan berasal dari penduduk tempatan. Walaupun sector perdagangan dan jasa masih merupakan sector yang banyak menampung tenaga kerja diluar sector pertanian namun bila dilihat dari aspek status pekerjaan hanya 2,3 persen dari mereka yang bekerja berstatus sebagai pekerja bebas di luar pertanian.

Hanya terdapat 42,8 persen penduduk yang bekerja disektor

formal yang terdiri dari mereka-mereka yang berusaha dibantu oleh buruh tetap sebanyak 4,8 persen dan mereka yang berstatus sebagai buruh atau karyawan sebanyak 38 persen. Keadaan ini juga bakal menyulitkan daerah dari aspek penataan ruang dan keindahan tata kelola spasial, khususnya untuk wilayah perkotaan. Banyak pekerja disektor non-formal menimbulkan masalah-masalah kesemrawutan diberbagai pojok kota. Baik karena terganggunya jalan dan kelancaran arus transportasi maupun masalah-masalah rendahnya kebersihan yang akan berkorelasi dengan menurunnya sanitasi dan kesehatan. Persoalan pemberdayaan juga menjadi rumit karena usaha-usaha non-formal sulit diberdayakan dan diberi dukungan permodalan melalui kredit dari institusi-institusi keuangan formal.

Problema tenaga ketenagakerjaan di Riau tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian yang saat ini terjadi. Bila pengangguran di Riau semakin besar justru pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan berada pada level yang tinggi.

Pada triwulan ketiga 2010 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 7,88 persen. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan September 2010 mampu tumbuh sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 11,22 persen, namun sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,89 persen. Dari aspek penggunaan sumber pertumbuhan banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 3,32 persen. Proporsinya dalam struktur perekonomian Riau mencapai 53,07 persen.

Ironisme perekonomian Riau dikaitkan dari aspek tenaga kerja menunjukkan gejala ketimpangan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ternyata banyak didorong oleh konsumsi masyarakat sementara pada sisi lain kue ekonomi masih banyak terpusat pada para konglomerat yang berkolaborasi dengan aparatatur penguasa yang kurang memadai dari aspek kinerja dan moralitas kenegarawanannya. Kedepan kualitas perekonomian Riau hendaknya diperbaiki melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memihak. Pertama, upaya-upaya redistribusi asset ekonomi harus semakin diprogramkan secara jelas dan terukur.

Pemusatan sumber-sumber ekonomi pada para pengusaha besar harus kian dialihkan dan likuiditas ekonomi harus dialirkan keberbagai sector dan usaha ekonomi rakyat.

Kedua, mendorong terciptanya usaha-usaha formal dengan pemberdayaan dan pendataan yang valid dan program-program yang memihak mereka. Usaha-usaha masyarakat yang produktif didorong untuk makin mampu masuk ke sector formal agar semakin dapat diandalkan untuk membuka peluang kerja. Disamping itu menformalkan usaha-usaha masyarakat akan kian memudahkan pihak perbankan memberikan dukungan permodalan. Dari aspek social kemasyarakatan upaya ini dapat mendukung terciptanya proses berusaha yang transparan, bertanggungjawab dan berkesinambungan.

Ketiga, melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pekerja disektor pertanian. Pelatihan-pelatihan yang mampu menciptakan tenaga trampil akan mendorong mereka untuk memanfaatkan waktu kerja yang tersisa setelah bekerja sebagai petani. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan petani yang arahnya pada peningkatan konsumsi dan perbaikan kualitas hidup mereka. Produktivitas daerah akan semakintinggi dan industry dapat kian bergerak pada penciptaan produk-produk substitusi import maupun produk-produk unggulan ekspor. Riau yang strategis dalam aspek letak geografis harus mampu menangkap terbukanya peluang pasar internasional.

Keempat, perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan dan air bersih. Dukungan aliran listrik bagi masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tenaga kerja tidak lari ke perkotaan. Beriringan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan ketersediaan listrik desa akan mendorong pembukaan usaha-usaha produktif masyarakat. Ini berarti akan membuka peluang kerja pedesaan tanpa meninggalkan basis ekonomi pertanian yang selama ini digelutinya. Dukungan transportasi akan semakin menghubungkan mereka dengan sentra-sentra pasar dan sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan ini akan bersinergi dengan upaya-upaya pemeratakan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

rakyat.

Kelima, meningkatkan profesionalisme pemerintah mulai dari level bawah sampai ke level pengambil kebijakan sehingga tercipta suasana pelayanan masyarakat yang prima. Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi biaya tinggi dan semakin menciptakan kepastian usaha ditengah-tengah masyarakat. Pola-pola birokrasi yang menghambat investasi dan menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat harus dikikis habis agar likuiditas perekonomian semakin mengalir pada setiap sisi kehidupan masyarakat.

Keenam, perbaiki berbagai aturan perundang-undangan yang selama ini kurang memihak rakyat. Banyak aturan pemerintah yang tidak kondusif bagi terselenggaranya perekonomian masyarakat. Untuk itu, upaya reformasi dan restrukturisasi berbagai kebijakan pemerintah harus kian diarahkan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Termasuk berbagai kebijakan pendanaan APBD yang selama ini cenderung pro-aparat harus diubah menjadi pro-rakyat dan pro-poor.

Terakhir, menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berusaha. Premanisme yang marak dimana-mana harus diberangus agar rakyat dapat berusaha dengan tenang. Berbagai pungutan yang tidak jelas peruntukannya dan status pemungutnya harus dihentikan. Pemerintah harus senantiasa mengembangkan suasana bisnis yang etis dan bermutu sehingga kemampuan rakyat menghadapi persaingan global makin memadai. Tanpa semua itu maka Riau dan masyarakatnya hanyalah menunggu waktu untuk tergilas oleh lajunya percaturan persaingan global.





“Ironisme ini menunjukkan adanya pemiskinan pada masyarakat petani meskipun nilai tambah ekonomi yang dapat dihasilkan oleh sektor ini sangat besar.”

PEMISKINAN PETANI RIAU

Penduduk Riau umumnya bekerja sebagai petani. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Riau tahun 2013 mencapai 581.520 ribu. Mereka yang mengusahakan tanaman pangan 109.380 rumah tangga, hortikultura 88.510 rumah tangga, perkebunan 517.170 rumah tangga, peternakan 124.950 rumah tangga dan sisanya sebanyak 55.112 rumah tangga mengusahakan perikanan dan kehutanan. Berdasarkan data yang dilansir BPS Riau jumlah petani yang memang bekerja di sektor pertanian hanya sebanyak 684.570 orang dan sebahagian besar adalah bekerja di sub-sektor perkebunan yakni 573.050 orang.

Data ini memberikan sinyal bahwa tidak semua rumah tangga yang mengusahakan pertanian adalah bekerja sebagai petani atau pekebun. Artinya, hanya 29,43 persen yang betul-betul sebagai pekerja pertanian, khususnya perkebunan. Mungkin mereka-mereka adalah para cukong atau justru para pejabat negara yang menjelma menjadi petani berdasi dan menguasai lahan untuk dieksploitasi demi mengeruk keuntungan. Fenomena ini menyeruakkan bahwa dalam dunia pertanian Riau terjadi aglomerasi yang tinggi sehingga mampu mengendalikan segala aspek bisnis yang berkaitan dengan petani. Muaranya adalah pengendalian harga, penguasaan sarana dan prasarana produksi dan penentuan upah secara sepihak serta eksploitasi manusia. Jamak terjadi pada suasana seperti itu adalah pemiskinan

rakyat secara sistematis dan berkesinambungan. Mereka cenderung menjadi tumbal atau dikorbankan untuk melindungi para pemodal dari proses-proses hukum yang terjadi.

Jika diasumsikan semua rumah tangga tersebut memang merupakan rumah tangga petani dan tidak memiliki pekerjaan diluar itu serta memiliki empat orang anggota keluarga maka jumlah jiwanya akan mencapai 2.326.080 jiwa. Keadaan ini menunjukkan beban tanggungan yang cukup tinggi bagi setiap pekerja pertanian. Satu orang pekerja pertanian akan menanggung beban sebanyak 3-4 orang. Untuk dapat hidup layak maka seorang pekerja pertanian harus mampu menghasilkan uang sekitar Rp 90.400,- per hari atau Rp 2.712.000,- setiap bulannya. Bila kurang dari itu maka rumah tangga petani tadi akan terperangkap dalam kategori rumah tangga miskin bila didekati dari sudut pandang pendapatannya.

Pada satu sisi, nilai tambah yang dihasilkan para pekerja pertanian ini relatif besar yakni mencapai Rp 96,15 triliun atau 18,41 persen dari total nilai tambah ekonomi yang dihasilkan Riau tahun 2013. Jika di rata-rata untuk seorang pekerja pertanian maka berarti mereka mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 140.445.311,- per orang per tahun. Setiap bulan setiap petani mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 11.703.775,97. Berdasarkan perkiraan ini maka sangat mudah sebenarnya mensejahterakan petani bila tidak terjadi aglomerasi ekonomi pada para pemodal. Hanya memberikan pendapatan layak berdasarkan standar PBB sebesar US\$ 2,- per hari maka pengelolaan usaha pertanian masih menyisakan kontribusi margin sebesar 99,23 persen. Artinya, melalui likuiditas nilai tambah yang diperoleh dari usaha sektor pertanian masih sangat memungkinkan dilakukan upaya-upaya memberantas kemiskinan secara masif.

Usia para pekerja pertanian berkisar antara 35-44 tahun yakni sebanyak 32,66 persen. Pekerja pertanian masih berada pada usia yang relatif muda. Mereka yang berusia antara 25-35 tahun di pedesaan juga banyak yang terlibat dalam usaha ini. Pekerja usia muda masih memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan profesionalitasnya. Untuk

meningkatkan produktivitas daerah dengan sendirinya tidak harus mengubah struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Akselerasi pekerja ke sektor industri justru cenderung menyesakkan wilayah-wilayah perkotaan. Bahkan pada akhirnya mereka yang bermigrasi ke kota malah menambah beban wilayah perkotaan dan menimbulkan persoalan-persoalan sosial tertentu. Pemberdayaan pekerja muda pertanian untuk mampu menghasilkan komoditas-komoditas unggulan, baik pangan dan buah-buahan atau pun sayur-sayuran merupakan isu strategis yang semestinya menjadi perhatian pemerintah Riau.

Data penduduk miskin Riau tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan di wilayah pedesaan. Sampai September 2013 penduduk miskin Riau di wilayah pedesaan masih sebanyak 359.820 jiwa. Jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja sebagai petani yang pada umumnya memang berada atau tinggal di pedesaan maka jumlah ini mencapai 52,56 persen. Berarti lebih separoh dari pekerja petani Riau masuk dalam kategori penduduk miskin yang pendapatannya tidak mencapai standar US\$ 2 per hari.

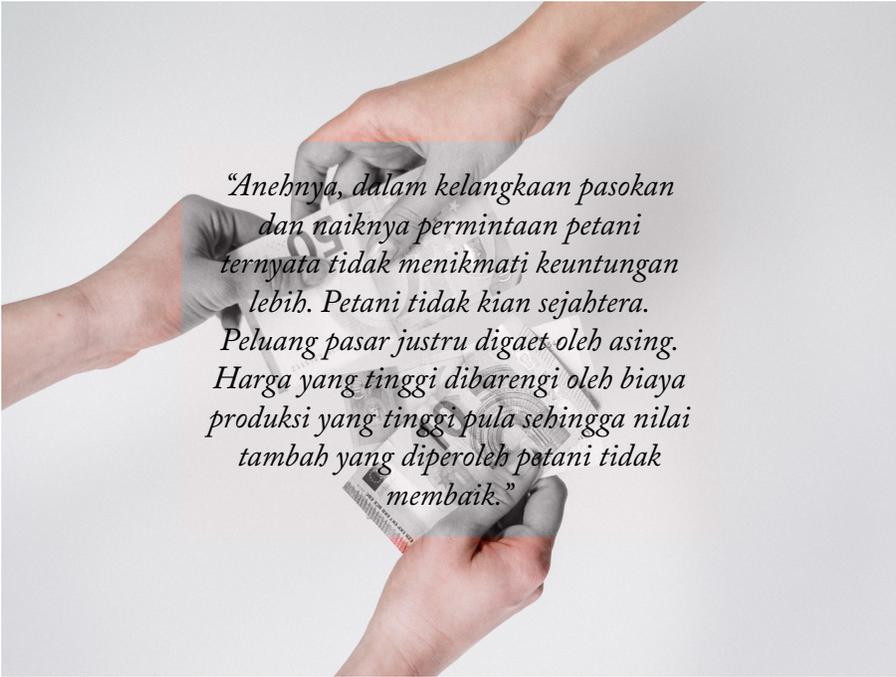
Ironisme ini menunjukkan adanya pemiskinan pada masyarakat petani meskipun nilai tambah ekonomi yang dapat dihasilkan oleh sektor ini sangat besar.

Dominansi perkebunan dalam struktur pertanian Riau sangat kentara sehingga proses pemiskinan yang terjadi pada masyarakat petani menjadi jelas bergelombang pada mereka-mereka yang bekerja sebagai petani perkebunan. Jumlahnya untuk tahun 2013 mencapai 573.050 jiwa dan bila 52,56 persen diantaranya miskin maka bisnis perkebunan di Riau telah memeras keringat dan darah petani yang jumlahnya tidak kurang dari 301.195 orang. Sungguh ironis jika selama ini usaha perkebunan, khususnya sawit dianggap memberikan kontribusi yang positif dalam mengurangi masyarakat miskin di Riau. Namun, data ini menyiratkan pula bahwa dengan menarik sebahagian kecil saja keuntungan yang dinikmati para pemodal perkebunan dan industri hilirnya, mungkin hanya sekitar satu persen dari kontribusi margin yang mereka telan saat ini, maka jumlah masyarakat petani

miskin di sub-sektor perkebunan langsung dapat dientaskan. Ini berarti dari total penduduk miskin Riau sebesar 522.300 jiwa tahun 2013 bisa dikurangi sampai hanya sebanyak 272.855 jiwa sehingga prosentase penduduk miskin Riau hanya akan tinggal 4,22 persen saja. Sungguh sebuah upaya yang spektakuler dan memberi multiplier effect yang besar.

Rakyat Riau memang sedang menunggu gebrakan-gebrakan nyata dari pemerintah untuk bisa mengubah keadaan. Kemiskinan yang menggelembung di pedesaan dan pada umumnya terjadi pada masyarakat petani memerlukan sentuhan-sentuhan khusus dengan keberanian mengambil kebijakan yang mungkin kurang populer bagi para investor atau pemodal. Namun untuk memacu kesejahteraan bersama dan mengurangi konflik-konflik yang selama ini kian menjamur maka perbaikan kesejahteraan petani pedesaan mutlak dilakukan. Pemerintah tak mungkin melakukan itu sendiri dan bila dibiarkan hanya akan memperparah keadaan. Sinergi kebijakan dan program diperlukan untuk memastikan hasil yang optimal.

Isu utama membangun desa memang harus diletakkan pada perbaikan kesejahteraan petani. Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan kebijakan ini akan bersentuhan langsung dengan pengelolaan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah. Masyarakat miskin nan menumpuk di desa dapat dientaskan dengan eskalasi mata pencaharian mereka sebagai petani. Nilai tambah sektor pertanian justru akan semakin tinggi dan ketergantungan pada produk-produk impor akan menurun. Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai itu antara lain dengan memelihara fungsi lahan pada sub-sektor yang saling berimbang, meningkatkan penguasaan teknologi produksi pertanian, mengembangkan keterampilan pasca panen, memperluas akses pasar dalam wilayah dengan produk yang mampu menjadi substitusi impor, dan memperkuat kelembagaan di tingkat petani pedesaan. Lebih penting dari itu adalah perbaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi desa. Bila tidak maka membangun desa hanya akan menjadi ajang tebar pesona politik belaka.

A close-up photograph of a hand holding a stack of Indonesian Rupiah banknotes. The hand is positioned at the top right, and the banknotes are fanned out, showing various denominations. The background is a plain, light-colored surface.

“Anehnya, dalam kelangkaan pasokan dan naiknya permintaan petani ternyata tidak menikmati keuntungan lebih. Petani tidak kian sejahtera. Peluang pasar justru digaget oleh asing. Harga yang tinggi dibarengi oleh biaya produksi yang tinggi pula sehingga nilai tambah yang diperoleh petani tidak membaik.”

TEKANAN CABE MERAH DAN DAGANG UANG ASING

Dewasa ini ada dua hal yang menarik diamati di Indonesia dari aspek ekonomi. Hiruk pikuk soal cabe merah dan makin tergadainya bangsa ini terhadap pemodal asing. Rakyat kecil diseluruh pelosok Indonesia kelimpungan oleh naiknya harga kebutuhan pokok, khususnya cabe merah. Harga cabe yang semula hanya Rp 12.000,- per kilogram sekarang melenjit ke angka Rp 70.000,- bahkan sempat menembus harga Rp 86.000, di beberapa pasar. Bahkan Menteri Perdagangan RI sempat sewot dengan adanya keinginan Riau untuk mengimpor cabe dari Thailand dan Filipina. Betapa fatalnya bangsa ini karena menangani persoalan cabe saja tidak mampu dan rakyat tetap saja dirugikan.

Ini juga menyangkut persoalan harga diri dan telah begitu banyak kebutuhan pokok rakyat yang tak mampu disuplai sendiri. Mulai dari beras, gula, kacang kedelai, buah-buahan, sampai pada masalah bumbu-bumbuan ternyata tak mampu dikelola dengan baik sehingga harus menggantung penyediaan kebutuhannya pada bangsa lain. Istana presiden sempat dikepung pengrajin tahun tempe karena langkanya

kacang kedelai Indonesia. Persoalan ini terjadi karena ketidakmampuan Indonesia menghasilkan kacang kedelai dan adanya kartel dalam bisnis impor.

Anehnya, dalam kelangkaan pasokan dan naiknya permintaan petani ternyata tidak menikmati keuntungan lebih. Petani tidak kian sejahtera. Peluang pasar justru digaget oleh asing. Harga yang tinggi dibarengi oleh biaya produksi yang tinggi pula sehingga nilai tambah yang diperoleh petani tidak membaik.

Dikacaukan oleh persoalan musin dan ketidakpahaman petani menghadapi perubahan musim yang tak menentu menyebabkan mereka hanya menggigit jari menyaksikan keuntungan orang asing dalam entitas mereka. Lahan kehidupan mereka tetap saja tak member harapan bagi perbaikan taraf hidup. Lebih mngenaskan lagi, kini Indonesia tak dapat disebut sebagai surge dunia diwilayah Timur. Nusantara yang subur ternyata tidak memberi kemakmuran bagi anak bangsanya.

Salah urus bangsa Indonesia sehingga dalam aspek pangan mulai mengalami krisis sudah lama diingatkan berbagai kalangan. Pemerintah yang tidak biasa bekerja keras dan lebih menyukai kebijakan instan telah menempatkan Indonesia dalam tiga krisis yang kian genting; krisis, energy, krisis air dan krisis pangan. Sebenarnya pemerintah dibentuk untuk menjadi perwakilan rakyat dalam mengelola ketiga aspek tersebut agar tidak terjadi kelangkaan dan saling bentur merebut sumber-sumbernya. Sayangnya, manajemen Negara dan permainan politik di dalamnya telah mengenyampingkan amanat rakyat yang penting ini. Cita-cita kemerdekaan justru terletak pada terpenuhinya ketiga kebutuhan ini secara berkualitas, murah dan berkesinambungan.

Persoalan energy sudah sejak lama menggelinging. Mulai dari bahan bakar minyak sampai pada persoalan listrik. Sudah beberapa kali pemerintahan berganti namun sumber-sumber energy Indonesia kian dicengkram pemodal asing. Dari aspek pasar pun barang langka ini tak mampu dikelola secara efisien dan menguntungkan. Lebih 80 persen pengelola bisnis Migas dikuasai kontraktor asing. Indonesia malah

tertekan sehingga mengatur cost recovery pun tak bisa lepas dari intimidasi para pemburu rente.

Bicara soal listrik lebih memprihatinkan. Disamping akupansinya yang masih terbatas, bagi mereka yang telah teraliripun juga tidak kunjung lepas dari masalah. Pagi hidup siang mati dan malam sebentar hidup dan banyak matinya. Biaya yang harus dibebankan pada anak bangsa juga kian membengkak. Padahal sumber-sumber energy listrik di Indonesia sangat banyak. Akibat pengelolaan yang tak baik, manajemen energy yang amburadul, penuh dengan intik dan korupsi maka segala karunia yang melimpah itu justru hanya mendatangkan kesengsaraan.

Termasuk soal air, di Riau cakupan pelayanan air bersih hanya mencapai 7,72 persen. Bila ditelusuri lebih dalam ternyata yang telah terjangkau pelayanan pun masih berhadapan dengan kualitas dan kesinambungannya. Artinya, secara neto pelayanan air bersih untuk masyarakat mungkin hanya mencapai 3 sampai 4 persen saja. Tidak ada perusahaan air minum yang memiliki kinerja yang baik. Dana APBD maupun APBN sudah dicurahkan untuk menengarai masalah ini. Namun dari aspek jumlah belum mencukupi dan aspek pengelolaannya sekali lagi syarat dengan kepentingan.

Mungkin saja terjadi buruknya pengelolaan air bersih oleh Negara akibat menjamurnya air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan sehingga menekan pengelola Negara untuk tidak menyediakan kebutuhan air bersih rakyat secara memadai dan layak. Bila rakyat sudah dapat dipenuhi ketersediaan air bersihnya maka pengelola air minum isi ulang dan air dalam kemasan bisa gulung tikar. Prasangka seperti ini tentunya kurang layak ditujukan kepada para pengusaha yang menangkap adanya peluang bisnis seperti itu. Indonesia memang kian aneh. Begitu banyak sungai dan sumur namun begitu banyak pula pabrik air dalam kemasan. Berbeda dengan Negara Singapura yang relative tidak ada sungai-sungai tetapi tak memiliki air isi ulang dan air minum dalam kemasan.

Apakah Indonesia Negara yang kian tidak menarik ? Pertanyaan ini menjadi terjawab bila kita amati dari masuknya modal asing ke

Indonesia melalui pasar uang dan pasar modal. Investor asing ternyata memburu peluang investasi saham dan surat uatang Negara (SUN) Indonesia. Meskipun dipicu oleh krisis di Amerika dan Eropa maka Indonesia ternyata menjadi tempat yang menarik bagi investor di wilayah Asia. Pada sesi perdagangan terakhir justru IHSG mampu menembus level 3000 dan menjadi indeks saham tertinggi sepanjang sejarah. Saham-saham yang mendongkrak IHSG adalah saham-saham perusahaan pertambangan, perkebunan dan infrastruktur. Artinya ekspektasi investor pada perusahaan-perusahaan yang mengolah sumber-sumber alam di Indonesia kian menguat karena masih prospektifnya sumberdaya ini.

Batubara dan Migas masih bisa diekstraksi dan secara politik bisnis para pelaku ekonomi di sector ini masih mampu memegang peranan dan bahkan masih mampu mendikte pemerintah untuk kepentingan bisnis mereka. Termasuk perusahaan-perusahaan perkebunan melalui kartel-kartel CPO masih memiliki kekuatan mengendalikan pasar dan pemerintahan. Disinyalir adanya penambangan Uranium di Papua yang tidak melalui prosedur yang sesungguhnya menandai kemampuan para pelaku bisnis pertambangan mengendalikan pemerintah Indonesia melalui lobi-lobi dan kolusi yang mereka bangun.

Menguatnya pasar saham lebih pada persoalan eksistensi perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor tertentu di Indonesia. Bukan pada aspek fundamental ekonomi Indonesia secara makro. Investor asing akan sangat paham bila ada arus balik modal keluar Indonesia maka kerangka makro ekonomi Indonesia bisa jadi ambruk. Bagi mereka itu bukan persoalan krusial karena keuntungan jangka pendek melalui strategi kick and run yang mereka gunakan akan mampu menutupi kerugian modal yang mereka akan hadapi jika seandainya terjadi kontraksi negative dalam perekonomian Indonesia.

Kembali pada persoalan krisis pangan dan melambungnya harga cabe diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Kemajuan apapun yang akan dicapai bila gejala krisis pangan mulai menguat maka kehancuran bangsa sudah diambang pintu. Kerusakan-

kerusakan social yang bakal bermunculan karena rakyat berebut pangan akan menghancurkan secara seketika segala kecanggihan-kecanggihan duniawi yang dibangun dengan modal besar dan biaya tinggi. Kenderaan mewah terbakar, gedung-gedung dan pasar-pasar diambukkan dan segala fasilitas modern didalamnya tak kan berarti bila sebegitu banyak orang telah memutuskan lebih baik mati melawan ketidakadilan ketimbang harus mati tak makan.

Kesenjangan demi kesenjangan di negeri ini harus secara dini diamputasi melalui kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat. Pemerintah harus memangkas biaya-biaya yang tidak sejalan dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Sentilan presiden soal besarnya porsi anggaran rutin dari anggaran pembangunan harus ditindak lanjuti untuk mengubahnya. Laju percepatan penggunaan lahan untuk kepentingan diluar pertanian yang menjadi tulang punggung penyediaan kebutuhan pokok rakyat harus dihentikan. Prinsip pembangunan pemukiman tumbuh ke atas memang tak terelakkan sehingga luasan lahan untuk pertanian tidak makin tergerus.

Pengelolaan energy yang efisien dan pengalihan pada sumber-sumber terbaharukan harus kian digesa dan investasi kearah itu dialokasikan atas dasar benefit untuk rakyat. Bukan semata keuntungan untuk pengusaha apalagi penguasa. Persoalan air bersih harus menjadi prioritas utama agar rakyat dapat terlayani secara efektif untuk mengurangi timbulnya masalah-masalah kesehatan dan kerawanan soaial lainnya.

Strategi utama pembangunan bangsa hendaknya dikembalikan kepada grand vision Indonesia yakni mensejahterakan rakyat lahir dan bathin. Ini bukan persoalan kecanggihan tekhnologi yang kian memeloroti moral anak bangsa. Ini hanya persoalan sederhana, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dalam lingkungan yang nyaman dan aman. Sudah saatnya kita berhenti terjebak dengan jargon-jargon global yang justru kian menyesakkan, membingungkan dan menyengsarakan. Bangsa ini dan tanah air ini milik rakyat dan selayaknya dikelola untuk rakyat dengan prinsip kesejahteraan untuk semua. Semoga...!!!!

“...Sekitar 35.000 rakyat Pulau Padang sebenarnya tidaklah harus sendiri berfikir. Mereka punya wakil rakyat, mereka punya pemerintah daerah yang kesemuanya digaji dari peluh rakyat. Sepantasnya lah mereka mendapat solusi yang adil mengingat merekalah yang sebenarnya memiliki kedaulatan negeri ini sesuai UDD 1945...”





DARAH RAKYAT PULAU PADANG; SIAPA PEDULI ?

Darah dari aksi jahit mulut yang dilakukan warga Pulau Padang di depan Istana Negara secara jelas dapat menggambarkan betapa rakyat telah begitu terzolimi oleh kebijakan Negara yang tidak memihak pada keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa hanya sebatas retorika dan pemanis citra. Undang-undang Dasar 1945 seperti hanya sebagai alat untuk memperkokoh tameng penguasa. Apalagi jika bicara soal Negara kesatuan RI maka makna yang dirasakan masyarakat hanyalah pengkaplingan demi pengkaplingan tanah untuk kepentingan pemburu rente.

Pemerintah dalam mengambil keputusan tidak lagi berhitung untung rugi bagi rakyat tetapi hanya berdasarkan pada kepentingan memperbesar pundi-pundi penerimaan dalam ukuran-ukuran ekonomi yang sangat materialistic, seperti produk domestic bruto (PDB atau PDRB), peningkatan ekspor, profitabilitas, dll. Ukuran-ukuran kemanusiaan seperti dikesampingkan. Padahal apapun aliran ekonomi yang dianut, dengan cara pencapaian yang berbeda-beda, tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. PBB sendiri sudah mengkoreksi tujuan pembangunan yang sesungguhnya dari sekedar mencapai

kesejahteraan rakyat kepada dimensi yang lebih luas, yakni kebahagiaan rakyat. Artinya, apa pun proses yang dilakukan dengan berbagai ukuran-ukuran kinerjanya haruslah melekat aspek kebahagiaannya yang ditimbulkannya pada rakyat.

Rakyatlah yang perlu dikedepankan dalam perspektif kebahagiaannya pada setiap proses dan kebijakan pembangunan. Jadi hutan tak perlu diolah untuk ekspor dan segala macam bila rakyat tak bahagia karena itu. Ekspor bisa saja menjadi tujuan antara tetapi bila dalam mencapainya menimbulkan penderitaan bagi rakyat maka proses itu selayaknya dihentikan. Tidak ada artinya kinerja-kinerja ekonomi kuantitatif diperoleh bila secara kualitas hidup rakyat harus menderita, terbebani dan kehilangan kesempatan mendapatkan suasana hidup yang nyaman dan harmonis.

Kepedihan rakyat Pulau Padang makin terasa menyesakkan ketika pimpinan daerah Riau seakan tak peka dalam masalah tersebut. Dalam pernyataannya di media masa (Riau Pos, Senin, 26 Desember 2011, hal 32) Gubernur Riau menyatakan bahwa Pulau Padang telah dilimpahkan ke pemerintah pusat. Menurut Gubernur; rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Bupati dan Gubernur dalam penerbitan izin tidak mutlak dijadikan acuan. Apakah ini yang disebut dalam pepatah kita “lempar batu sembunyi tangan”. Apakah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan memang mendahulukan kepentingan rakyat Pulau Padang ? Atau malah rekomendasi-rekomendasi itu hanya berisi pembenaran-pembenaran bagi Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan izin. Apakah dasar yang digunakan oleh Dinas Kehutanan Riau dan Kabupaten dalam melahirkan rekomendasi gubernur sudah berpijak pada kepentingan rakyat dan keberlangsungan harmonisasi kehidupan rakyat dan lingkungannya ? Atau malah hanya sekedar memenuhi persyaratan perundang-undangan yang konon khabarnya undang-undang tersebut juga dibuat untuk dan atas kepentingan pengusaha atau pemburu rente.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya sangat sulit dijawab oleh rakyat Pulau Padang dari perspektif keadilan dan rasa kemanusiaannya. Meskipun pada dasarnya amat mudah untuk

didedahkan, walaupun harus dengan menggunakan kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Melalui analogi yang sederhana saja sebenarnya sudah bias dicari dasr pijak keputusan yang bijak. Bila diamati bisnis perusahaan-perusahaan kayu yang beroperasi di Riau maka tingkat keuntungan yang diterimanya sudah sangat memadai sehingga perluasan-perluasan produktivitasnya belumlah perlu untuk ditingkatkan.

Dari aspek ekspor industry perkayuan sudah memegang peranan penting, kontribusi ekonomi ke daerah masih memadai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia PT. RAPP saja telah member multiplier ekonomi dalam aspek output bagi Riau sebesar 2,29 dan Kabupaten Pelalawan 1,19. Dalam aspek pendapatan bagi Riau sebesar 2,36 dan Pelalawan 1,5 serta dalam aspek tenaga kerja multipliernya bagi Riau sebesar 5,7 dan bagi Pelalawan sebesar 4,7.

Sayangnya beberapa pertanyaan yang tak terjawab (atau tak ingin dijawab) dalam penelitian ini masih saja diabaikan, seperti berapa pengorbanan rakyat Riau selama ini untuk mendapatkan output, pendapatan dan serapan tenaga kerja sebesar itu ? Berapa kerusakan-kerusakan lingkungan atau deplesi sumberdaya alam yang ditimbulkan bagi Riau dalam proses mendapatkan nilai multiplier sebesar itu ? Berapa peluang-peluang rakyat ke depan yang hilang (opportunity costs) dari investasi yang menghasilkan sebesar itu ?

Pertanyaan penting yang sebenarnya perlu dijawab adalah apakah keberadaan bisnis ini memiliki kontribusi yang sama jika dibandingkan dengan keberadaan bisnis sejenis ditempat lain, seperti di Brazil, Finlandia, dll ? Atau dibandingkan dengan entitas bisnis yang lain, memadaikah kontribusi sebesar itu ? Dengan besaran investasi sebesar itu (baik investasi rakyat dalam arti yang sesungguhnya atau investasi pemilik modal) pantaskah rakyat Riau menerima kontribusi sebesar itu ? Inilah yang harus dijelaskan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan terdekat dengan rakyat.

Melalui perangkat-perangkatnya yang ada, baik Dinas Kehutanan maupun Bappeda hendaknya dapat melakukan kajian komprehensif bagi keberadaan suatu entitas bisnis (private sector) bagi kebahagiaan

DARAH RAKYAT PULAU PADANG; SIAPA PEDULI ?

rakyat (society). Dalam domain good government pemerintah (state) adalah wasit yang harus berbuat adil dan menjadi penengah yang baik (good governance) dalam tarik-menarik antara rakyat dan pemilik modal. Bukannya malah menjadi “penikmat” dalam koncah konflik tersebut. Pemerintah daerah harus punya data kongkrit tentang berbagai dampak sebuah entitas bisnis beroperasi didaerahnya, baik dampak positif maupun dampak negative. Data tersebut tentunya tidak sekedar ukuran-ukuran kuantitas ekonomi semata tetapi juga lebih ditekankan pada kualitas kebahagiaan hidup masyarakat secara holistik.

Fenomena Pulau Padang tentu tidak mungkin muncul secara sederhana hanya karena adanya sekelompok orang yang tidak setuju dengan pemberian izin 41.000 hektar lahan HTI PT. RAPP di pulau tersebut.

Sekitar 35.000 rakyat Pulau Padang sebenarnya tidaklah harus sendiri berfikir. Mereka punya wakil rakyat, mereka punya pemerintah daerah yang kesemuanya digaji dari peluh rakyat. Sepantasnya lah mereka mendapat solusi yang adil mengingat merekalah yang sebenarnya memiliki kedaulatan negeri ini sesuai UDD 1945.

Sampai kapan dan harus berapa banyak darah dari mulut rakyat Pulau Padang harus menetes dan seberapa lama air mata mereka berurai ? Siapa yang peduli ? Mari kita renungkan dan berbuat untuk apa yang seharusnya diperoleh rakyat untuk kebahagiaannya. Semoga...!!!

“Bagi masyarakat sendiri dalam situasi perekonomian yang berfluktuasi yang paling penting diperhatikan adalah mengelola cashflow secara baik. Jangan sampai ketika uang masuk banyak pengeluaran semakin dibengkakkan dan ketika uang masuk menyusut menjadi kelimpungan.”





RIAU DALAM GELIAT SUKU BUNGA THE FED

Federal Reserve memangkas suku bunga. Ini untuk yang ketiga kalinya di tahun 2019. Sejak Oktober kemaren suku bunga Bank Sentral Amerika itu dipangkas sebesar 25 basis points menjadi hanya 1,50-1,75 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi gejala ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri Amerika. Donald Trump masih meradang dengan penurunan sebesar itu. Dia ingin suku bunga The Fed mencapai titik nol atau bahkan negatif. Ini tentu berkaitan dengan kepentingan kampanyenya untuk kembali menduduki singgasana presiden pada pemilu yang akan datang sarannya adalah angkatan kerja yang kian bertambah jumlahnya sementara kesempatan kerja tidak banyak berkembang. Bila pengangguran meningkat maka kesempatan untuk meraup suara dari para pekerja akan berkurang dan pengangguran akan menjadi isu politik yang seksi dalam kampanye lawan.

Dalam pandangan Gubernur The Fed penurunan sebesar itu sudah merupakan kebijakan yang ideal untuk mengantisipasi adanya pengaruh buruk dinamika ekonomi global yang memang kian melambat. Pertumbuhan ekonomi amerika masih mampu

dipertahankan walaupun secara global ekonomi melambat. Saat ini perekonomian Amerika masih mampu bertahan pada level 1,9 persen walaupun jauh lebih rendah dari keinginan presiden yang mengadagadag perekonomian mampu bergerak pada kisaran pertumbuhan sebesar 3 persen. Ekspansi ekonomi yang terlalu jauh menurutnya justru akan membuat daya tahan ekonomi dalam negeri rentan dari tekanan eksternal. Koreksi suku bunga sebesar itu sudah sangat memadai bagi mempertahankan pertumbuhan dan menampik risiko perlambatan ekonomi global. Saat ini ada momentum membaik yang dapat menjadi alasan seperti mulai adanya tanda-tanda resolusi perang dagang Amerika dan China, angka inflasi yang relatif terjaga pada kisaran 2 persen, dan perekonomian masih tumbuh pada tingkat pertumbuhan 1,9 perse.

Dari respon The Fed terhadap perekonomian global tentu perlu ada yang dicermati oleh Riau sebagai entitas ekonomi yang sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global. Jangan sampai rekasi ekonomi sesaat diterjemahkan dalam kebijakan skala Panjang dan luas. Pergerakan ekonomi pada tataran global masih mengandung ketidakpastian yang tinggi. Harga tandan buah segar sawit saat ini memang telah menaik. Pendapatan petani tentu mengalami peningkatan. Biasanya perekonomian Riau akan menggeliat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumahtangga petani sawit. Hilirnya adalah inflasi dan menghangatnya tensi perekonomian. Konsekwensinya adalah kembalinya pergerakan pada arah yang negatif. Oleh karena itu manajemen cashflow rumah petani sawit seharusnya dapat ditata untuk menjaga momentum positif berlangsung lebih lama.

Perekonomian Riau pada Triwulan III 2019 ini menggeliat cukup bagus. Dibandingkan dengan Triwulan II 2019 pertumbuhannya lebih tinggi yakni sebesar 4,16 persen dengan migas dan 5,82 persen tanpa migas. Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya maka pada Triwulan III 2019 ini maka PDRB Riau dengan migas mampu tumbuh sebesar 2,74 persen dan tanpa migas sebesar 5,22 persen. Sektor yang menonjol jika dilihat secara triwulan adalah Usaha Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang

tumbuh sebesar 10,6 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,29 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen. Secara tahunan pada Triwulan III 2019 sektor yang menonjol adalah Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 18,35 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,65 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 10,83 persen.

Melihat kecenderungan perkembangan PDRB tersebut maka Riau dengan sendirinya akan berhadapan dengan pengaruh global yang sangat peka. Setahun terakhir perekonomian banyak didominasi pertumbuhannya oleh sektor-sektor konsumtif yang berkait erat dengan dinamika global atau paling tidak berskala nasional dan regional. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengemuka sejalan dengan berkembangnya rumah sakit swasta dan menjamurnya klinik-klinik perawatan medis. Hal tersebut tentunya berkait dengan perkembangan pengadaan listrik dan gas dalam memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga ataupun usaha-usaha masyarakat. Menarik untuk dicermati adalah geliat sektor Informasi dan komunikasi yang tentunya dipicu oleh membaiknya pendapatan rumah tangga petani, khususnya rumah tangga para pekebun sawit. Kenaikan harga TBS yang kini telah mencapai kisaran 45 persen akan memberi dampak pada menguatnya konsumsi rumah tangga. Pengaruhnya terhadap sektor-sektor ketiga terutama jasa-jasa akan meningkat.

Eratnya kaitan ekonomi Riau dengan percaturan ekonomi global membuat perlunya kewaspadaan terhadap dinamika yang terjadi. Penurunan suku bunga The Fed dilakukan untuk mengantisipasi akan adanya krisis ekonomi pada tataran global. Ini berarti bagi Riau harus pula diantisipasi dampak-dampaknya, baik positif maupun negatif. Melemahnya rupiah (jika factor lain tidak berubah) biasanya akan menaikkan harga TBS karena harga di pasaran ekspor dalam dollar akan lebih murah dan daya saing meningkat. Mendapatkan sedikit dolar akan memperoleh rupiah lebih banyak sehingga mampu membeli dalam rupiah yang lebih banyak. Namun bila gejala pasar membuat permintaan jadi terkoreksi maka harga dapat langsung anjlok sehingga para petani sawit akan kekurangan

permintaan produk dan pendapatan secara mendadak menjadi turun.

Mengantisipasi gonjang-ganjing ekonomi global dan rentannya perekonomian Riau terhadap permasalahan tersebut baik pemerintah, pihak pengusaha dan masyarakat hendaklah mengantisipasinya dengan pola-pola dan strategi tersendiri. Pemerintah melalui penerang aparaturnya yang dimilikinya harus senantiasa mengarahkan kebijakan anggaran yang dapat menurunkan beban biaya rumah tangga rakyat. Caranya bukan dengan memberi subsidi yang konsumtif. Subsidi dapat diberikan melalui teknik produktif yang mendorong pengurangan konsumsi impor dan eksploitatif. Produsen dan masyarakat didorong untuk menciptakan produk-produk substitusi impor atau bila memungkinkan menciptakan produksi yang sama dengan menggunakan komponen dalam negeri. Membangun infrastruktur yang mampu mengurangi komponen biaya produksi dan delivery sehingga harga jual oleh pemasok dapat diturunkan. Termasuk memangkas biaya-biaya siluman yang menyebabkan inefisiensi ekonomi. Kepastian usaha dan kemudahan yang bertanggungjawab dalam investasi digalakkan agar barang-barang keperluan masyarakat dapat diproduksi dan lapangan pekerjaan tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Para pengusaha harus menengarai pergerakan ekonomi global tersebut dengan tetap memantau arah dan konsekuensi perilakunya. Kecanggihan teknologi yang semakin memudahkan komunikasi dan serapan informasi harus dimanfaatkan untuk menentukan langkah-langkah logis yang mesti dibuat. Jangan sampai terlambat bertindak dalam pergerakan perekonomian yang berubah cepat. Biaya yang tidak patut dibelanjakan harus dikikis untuk meningkatkan efisiensi usaha. Sinergi dibangun untuk membuat adanya tanggung renteng penanggulangan risiko dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Biasakan melakukan inovasi atas skill dan ketekunan sendiri dari hasil observasi pasar yang lengkap dan memadai. Jangan mengecewakan konsumen dengan cara-cara bisnis yang kurang etis. Arus kepedulian konsumen melintas dengan cepat namun dapat ditunakkan dengan membangun kepercayaan melalui hubungan bisnis yang harmonis.

Bagi masyarakat sendiri dalam situasi perekonomian yang berfluktuasi yang paling penting diperhatikan adalah mengelola cashflow secara baik. Jangan sampai ketika uang masuk banyak pengeluaran semakin dibengkakkan dan ketika uang masuk menyusut menjadi kelimpungan.

Perencanaan pengeluaran rumah tangga yang lebih terarah harus dibuat dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti ada rasa malu untuk bekerja bersama dalam rumah tangga. Anak-anak seperti dimanjakan orang tua tanpa diajarkan hidup produktif dan ekonomis sejak dini. Menjadi malu menghasilkan uang dengan bekerja sejak muda. Padahal dari situ akan diperoleh dua manfaat utama dalam diri anak-anak, yakni menghargai uang yang dimiliki dan berfikir produktif untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain.

Produktivitas semua anggota rumah tangga harus dipupuk paling tidak untuk menghasilkan sendiri segala kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Jangan sampai membeli sayur ditengah-tengah lahan tertinggal yang dapat ditanam sayur. Beternak dua pasang ayam kampung sudah dapat memperoleh dua telur ayam setiap harinya dan itu mampu memberi sarapan bergizi untuk dua orang anak. Begitu banyak waktu yang tersisa, ruang yang tersedia dan pasar yang terbuka untuk sebuah kreativitas kecil yang mampu menyelesaikan banyak sumber masalah. Sebuah langkah kecil untuk menghasilkan sesuatu jauh lebih baik dari mendiskusikan sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu. Padahal kebutuhan akan sesuatu itu adalah sumber dari sesuatu yang tidak menentu bila tidak mampu memenuhi segala sesuatu. Ontah lah....!!!

“...Manusia tidak mungkin survive tanpa bermitra dengan manusia lain secara inovatif, terbuka, akuntabel, dan tentunya dengan jujur. Ontablab...!!!”

UPAYA PEMULIHAN EKONOMI RIAU PASCA COVID 19

Dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian Riau memang mengesankan. Pada Triwulan I 2020 ini terkoreksi mencapai minus 3,47 persendengan Migas dan Tanpa Migas minus 4,08 persen. Inilah dampak nyata dari penyebaran Covid 19 tersebut dan amburadulnya kebijakan penanganannya pada masyarakat. Pelaksanaan PSBB ternyata telah benar-benar mematikan perekonomian Rumah Tangga Masyarakat. Dalam struktur perekonomian Riau Konsumsi Rumah Tangga terkoreksi dengan pertumbuhan minus 1,00 persen. Padahal kontribusinya mencapai 30,22 persen. Artinya perekonomian masyarakat tidak berjalan sama sekali akibat adanya pembatasan-pembatasan yang tidak mengedepankan kalkulasi yang matang ini.

Kontraksi terbesar justru terjadi pada konsumsi pemerintah yang terkoreksi sampai minus 16,53 persen. Ini terjadi akibat tidak berjalannya anggaran pemerintah yang mampu mendorong perekonomian Riau. Refocusing yang dilakukan tidak mampu memberi efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Mungkin karena kurang tepat sasaran dan pola alokasinya. Pembagian masker misalnya, tidak dilakukan dengan memberdayakan industri rumah

tangga sebagai produsen masker yang sempat langka sebelumnya. Dapur umum yang sempot heboh untuk memberikan makanan terhadap masyarakat terdampak tidak dilakukan atas basis ekonomi wilayah pada satuan terkecil tetapi terkesan seperti proyek-proyekan. Itu mungkin menjadi sebab refocusing anggaran tidak memiliki multiplier effect terhadap perekonomian Riau. Kasarnya, kita mencampakkan uang untuk memperbaiki kondisi buruk kita. Akibatnya seperti gali lobang tutup lobang.

Kalau diamati dari sisi produksi perekonomian Riau berkontraksi hampir pada 17 sektor. Hanya 4 sektor yang pertumbuhannya positif. Sektor-sektor dominan dan berkaitan dengan perekonomian masyarakat untuk pertama kalinya sejak tahun 2001 berkontraksi atau tumbuh negatif. Sektor Pertanian berkontraksi menjadi minus 0,94 persen dan Industri Pengolahan berkontraksi minus 1,19 persen padahal kedua sektor ini lah yang mendominasi perekonomian Riau. Parahnya lagi di sektor perdagangan besar dan eceran pertumbuhannya juga mengalami kontraksi sebesar minus 14,22 persen. Sektor-sektor tersier yang selama ini mulai menggeliat dalam perekonomian Riau tidak luput dari terpaan bencana Covid 19 ini sehingga kini menjadi rontok semuanya.

Jika pun bencana Covid 19 ini mampu diatasi dan berakhir paling cepat bulan Juli 2020 mendatang maka tekanan terhadap perekonomian Riau tentunya akan semakin terasa dan kinerja ekonomi pasti akan semakin terpuruk. Termasuk periode untuk me-recovery-nya akan semakin sulit. Untuk itu pemerintah Riau seharusnya sudah mulai melakukan reorientasi kebijakan. Pertama tentunya memetakan mana sektor ekonomi yang terdampak lebih dalam atau lebih sulit dan mana yang ringan. Selain itu harus diasesmen mana sektor yang membutuhkan jangka waktu lama dan mana yang lebih pendek. Lalu memetakan mana yang memiliki multiplier effect yang besar dan mana yang sifatnya lebih parsial. Paling penting adalah menentukan secara tepat masyarakat sasaran yang ada didalam setiap sector yang benar-benar harus menjadi tanggungjawab pemerintah atau secara undang-undang memang harus menjadi beban pemerintah.

Kedua, memfokuskan pemanfaatan anggaran sebagai stimulus. Bukan bertindak sebagai “malaikat pemberi” dengan segala beban pencitraan yang ada di dalamnya. Perilaku ekonomi ke depan jika pandemi Covid 19 ini selesai akan sangat berbeda dengan sebelumnya.

Basis pergerakannya sangat dipengaruhi oleh teknologi. Skill dan kemampuan memanfaatkan teknologi akan menjadi kekuatan utama untuk mampu tumbuh dan bertahan. Disektor pertanian sekalipun, basis teknologi informasi akan menjadi pilar utama dinamikanya. Apalagi disektor jasa dan perdagangan. Mungkin sudah saatnya tidak perlu membangun pasar atau Mall secara fisik untuk perdagangan sebab semua pasar dan Mall sudah ada dalam Smartphone masing-masing konsumen. Gudang dan jasa pengiriman dengan sendirinya akan menjadi basis penting untuk mendukung sistem perekonomian virtual di masa depan.

Ketiga adalah membangun sinergi antar stakeholder. Pemerintah tidak bisa lagi menjadi penguasa dengan mengandalkan perundang-undangan yang mementingkan penguasa. Rakyat maupun Lembaga-lembaga ekonomi sudah akan membentuk jejaringnya sendiri dan setiap kebijakan pemerintah yang tidak produktif akan dimentahkan melalui sinergi dan kekuatan teknologi informasi. Perubahan yang terjadi sangat cepat dan berlangsung secara terus-menerus. Pemerintah harus berfungsi sebagai mitra pengatur yang aturan itu merupakan resultan dari semua kepentingan stakeholder. Disinilah diperlukan adanya sinergi sehingga produktivitas ekonomi dapat meningkat secara eksponensial.

Keempat adalah keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif akan menjadi bahan olok-olokan masyarakat jika dalam mengemban amanah tidak transparan dan akuntabel. Baik karena kecepatan data dan informasi sampai kepada masyarakat pada waktu yang bersamaan maupun akibat kalkulasi-kalkulasi dan perhitungan masyarakat yang lebih canggih metode dan formalasinya dari yang digunakan pemerintah tersebut. Untuk itu proses partisipasi rakyat harus disegerakan dan menjadi mutlak adanya dalam setiap pengambilan keputusan dengan mengedepankan

transparansi dan akuntabilitas.

Ego kelompok, kesamaan latar belakang, dan perkongsian kampung akan menjadi basi karena orang akan lebih fokus pada perkongsian kepentingan untuk saling membahagiakan. Era revolusi industri 4.0 ke depan sepertinya semakin mengalami percepatan implementasinya sebagai konsekuensi dari dampak Covid 19 ini. Sangat diperlukan perubahan cara berfikir yang dengan terpaksa harus mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Orang-orang secara sosial akan makin berfikiran positif untuk bersama saling menyejahterakan demi kepentingan bersama yang lebih baik dan lebih luas. Intrik-intrik hanya akan menjadikan seseorang terisolasi dalam ketertinggalan.

Manusia tidak mungkin survive tanpa bermitra dengan manusia lain secara inovatif, terbuka, akuntabel, dan tentunya dengan jujur. Ontablah...!!!

“Indonesia menjadi pasar yang seksi bagi praktek-praktek keuangan illegal ini karena peluang pasarnya sangat gemuk.”



FENOMENA INVESTASI BODONG

Warisan Charles Ponzi asal Italia yang menciptakan “arisan berantai” pada tahun 1920 ternyata masih dipelihara sampai saat ini. Walau diganjar dengan hukuman 150 tahun penjara ternyata apa yang diprakatekkan Ponzi yang lebih dikenal dengan skema ponzi tidak membuat jera para pemburu rente untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat yang didorong oleh nafsunya memperoleh keuntungan tanpa batas dan seakan bebas risiko. Betapa menggiurkan bila ada investasi yang menghasilkan bunga 50 persen dalam 45 hari dan menjadi 100 persen dalam 90 hari. Menjual gagasan seperti itu Ponzi mampu meraup dana dari pesertanya mencapai US\$ 222 juta. Namun pada akhirnya ia harus terhutang sampai US\$ 7 juta dan meninggal di penjara Rio de Janeiro Brazil setelah menjalani 14 tahun penjara.

Di berbagai belahan dunia cara-cara yang dipraktek Ponzi tidak kunjung usai dipraktekan dengan model-model dan pola-pola yang semakin disempurnakan. Masyarakat yang terbabitpun tak berkurang. Sebut saja apa yang dilakukan Bernard Maddof melalui perusahaan investasinya Bernie Maddof mampu menggondol dana mencapai US\$ 17,3 milyar. Sama halnya dengan R. Allen Stanford

yang juga mampu meraup dana dari 28.000 nasabah sebanyak US\$ 7 milyar. Thomas Petters ditangkap tahun 2008 dan dinyatakan bersalah dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang mencapai US\$ 3,6 milyar. Pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 50 tahun.

Kasus-kasus investasi bodong ini di Indonesia juga marak terjadi. Banyak korban yang menderita kerugian. Pola dan mekanismenya makin canggih. Sejalan dengan perkembangan financial technology dan dinamika perekonomian yang kian deras investasi-investasi illegal ini tumbuh bak cendawan dimusim hujan. Masyarakat tak merasa kapok karena perilaku keuangan (financial behavior) yang muncul ditengah-tengah masyarakat kian tak rasional. Permainan skema investasi ini tidak hanya ada pada system keuangan konvensional. Ada pula perusahaan-perusahaan berbendera Syariah terkait dengan pengelolaan keuangan yang illegal ini. Sebenarnya secara institusi perusahaan ini masih memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mungkin mereka tidak memiliki izin pendirian perusahaan. Hanya saja izin usaha secara teknik dan spesifik tidak ada sehingga dapat dianggap illegal.

Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 297 buah fintech illegal yang menerapkan pinjaman online berbentuk fintech peer to peer lending. Sampai dengan tahun 2019 Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup sebanyak 1773 fintech lending illegal. Basis servernya tidak saja di Indonesia tetapi ada yang berbasis di Amerika sekitar 15 persen, China 6 persen, Singapore 8 persen. Bahkan sekitar 42 persen perusahaan belum diketahui basis servernya. Semua perusahaan keuangan ini memainkan skema-skema yang berpijak pada apa yang dilansir Ponzi. Kerugian masyarakat tak dapat terelakkan karena orang-orang yang direkrut berinvestasi pada usia permainan semakin lama semakin kecil kemungkinan memperoleh keuntungan.

Indonesia menjadi pasar yang seksi bagi praktek-praktek keuangan illegal ini karena peluang pasarnya sangat gemuk.

Kelas menengah rakyat Indonesia makin banyak karena jumlah penduduk yang besar. Kehidupan kelas menengah ke atas yang lebih

baik dari hasil pendapatan di sektor primer namun Pendidikan dan pemahaman akan investasi keuangan yang masih rendah menjadi pasar sasaran yang sangat empuk. Pelaku UMKM yang secara kebetulan mampu memperoleh keuntungan yang memadai cukup rentan untuk terbabit dalam system investasi illegal ini. Bagaimana pun perbaikan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDB) membuat perilaku konsumsi masyarakat Indonesia berubah. Termasuk dorongan mereka untuk melakukan investasi yang menjanjikan keuntungan lebih.

Kerugian akibat investasi bodong di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir sudah mencapai Rp 88,8 triliun rupiah. Bayangkan saja perusahaan Pandawa Group dengan bisnis travel Umrah nya tetapi dikelola dengan gaya skema ponzi mampu memakan korban sebanyak 549.000 orang dengan kerugian mencapai Rp 3,8 triliun. PT. Cakrabuana Sukses Indonesia melibatkan sekitar 170 ribu orang menimbulkan kerugian mencapai Rp 1,6 triliun. Dream Freedom bahkan menyebabkan kerugian mencapai Rp 3,7 triliun dengan korban sebanyak lebih kurang 700.000 orang. Bahkan arisan ibu-ibu di Serang pun mampu menimbulkan kerugian mencapai Rp 5 milyar. Kasus terakhir adalah investasi bodong dengan menggunakan aplikasi Memiles di Jawa Timur yang dilakukan PT.Kam and Kam hanya dalam waktu beberapa bulan beroperasi mampu meraup dana mencapai Rp 750 milyar. PT. Krisna Alam Sejahtera (KAS) di Klaten meraup dana sebesar Rp 17 milyar dengan korban mencapai 1000 orang lebih.

Pada dasarnya investasi bodong paling banyak dalam bentuk forex dan perdagangan saham serta reksa dana. Indonesia memang sedang demam dengan intervensi perusahaan-perusahaan investasi ini. Masyarakat banyak yang tergiur karena piawinya para marketer nya menawarkan investasi dengan keuntungan atau imbal hasil yang besar dan seakan-akan bebas risiko. Masyarakat menjadi terjebak dengan permainan aplikasi yang menggambarkan seolah-olah keuntungan yang nyata akan diperoleh dengan investasi ini dalam jangka waktu yang pendek. Tanpa lebih teliti menyibak izin usahanya secara cermat

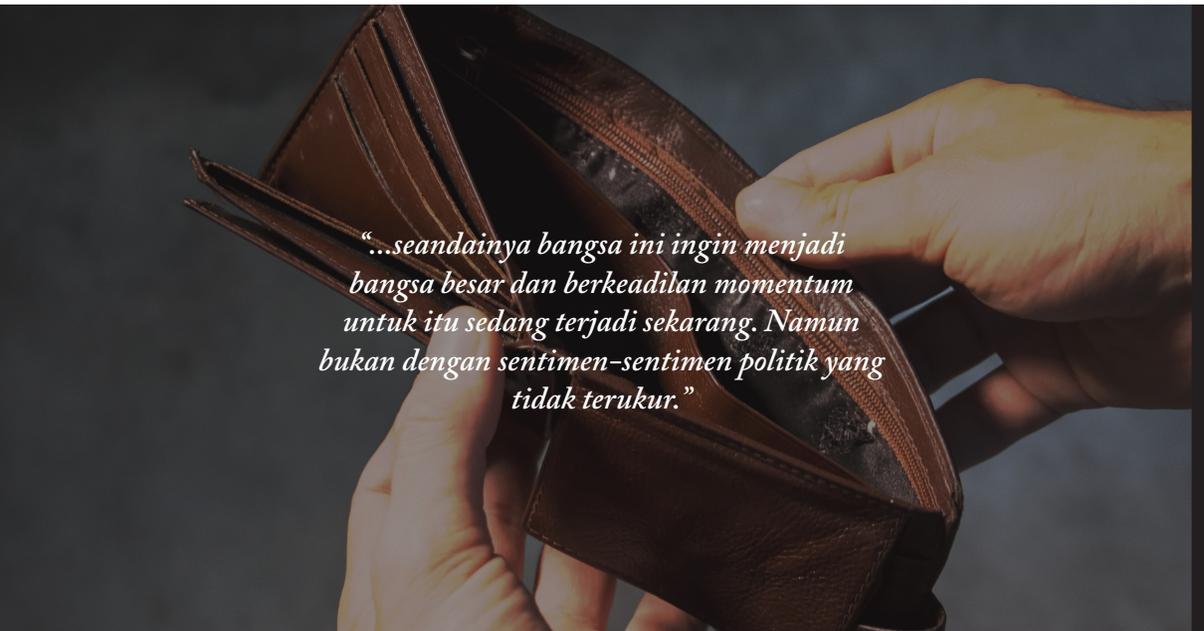
dan teliti masyarakat terdorong dan terperangkap dalam cengkraman perusahaan ilegal atau yang beroperasi tanpa izin usaha resmi. Berbekal pengetahuan dan pemahaman yang tidak memadai tentang keuangan atau financial product and institution financial behavior masyarakat tanpa ragu menanamkan dananya tanpa kalkulasi yang matang.

Anehnya, masyarakat yang terkena bukan hanya golongan bawah tetapi masyarakat golongan atas yang justru jadi penggerak pula bagi masyarakat bawah tersebut. Bagi masyarakat kelas uang yang digunakan bisa saja uang lebih atau bahkan uang haram. Akibat perilaku mereka timbul magnet bagi masyarakat kelas bawah untuk ikut-ikutan mengharapkan keuntungan segera. Begitu menggiurkan dan bukan tidak ada orang yang beruntung mendapatkan hasil lebih dalam jangka pendek. Sialnya bagi yang lain sangat menyakitkan. Ada orang yang investasinya berulang-ulang dan pada periode ke periode menanamkan uang kian besar pad akhirnya justru berujung pada tenggelamnya semua uang yang diinvestasikan.

Menghadapi fenomena ini tentunya sudah bukan waktunya untuk menganggap enteng. Dampak-dampak sosial yang bakal muncul sebagai muara akhirnya sangat mencemaskan. Pemerintah harus lebih antisipatif dengan melakukan deteksi dini untuk tidak memberi izin bagi adanya usaha-usaha ekonomi dengan pola yang sangat berisiko merugikan masyarakat. Perlu ada kebijakan khusus dan selektif melalui persyaratan-persyaratan tertentu sebelum mereka meluncur ke pasar. Sosialisai dan edukasi berkenaan dengan financial technology dan program inklusi keuangan harus lebih massif dan intensif. Literasi digital tentang investasi mutlak diperbanyak dengan melibatkan berbagai institusi masyarakat. Perlu dilakukan ekstensifikasi atau perluasan pasar bagi pelaku ekonomi bidang keuangan, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberi ruang dan peluang masyarakat berinvestasi. Guna memupuk pengendalian diri masyarakat untuk menggunakan uang yang dimiliki secara benar perlu penyadaran berkelanjutan akan kemanfaatan uang tersebut. Inilah fungsi sinergi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, tindakan tegas bagi pelaku-pelaku bisnis ilegal harus ditingkatkan untuk menghambat menjamurnya usaha ini. Bagi investor sendiri yang masih tergiur untuk berinvestasi pada usaha-usaha itu harus pula diciptakan efek jera. Tak mungkin pemerintah akan mengganti kerugian terhadap perilaku-perilaku masyarakat yang kurang pantas. Tidak sulit sebenarnya masyarakat mendeteksi perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi bodong ini. Ciri khasnya adalah menawarkan keuntungan atau imbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu pengembalian yang pendek. Kemudian biasanya mereka menawarkan produk abstrak dengan melakukan rekrutan pemasar secara berjenjang dengan menawarkan bonus yang berlipat sesuai jenjang pemasarnya.

Secara makro kiranya perlu ada perbaikan dalam kualitas pertumbuhan ekonomi agar ada pemerataan ekonomi yang meluas dan berkelanjutan. Menciptakan kepemilikan saham berimbang sehingga tidak ada pemusatan ekonomi yang dapat mengurangi kesempatan rakyat berinvestasi dan berusaha ekonomi produktif secara meluas. Mendorong timbulnya inovasi produksi yang beragam untuk mengembang potensi-potensi ekonomi yang tersedia untuk membuka lapangan kerja dan usaha-usaha bernilai tambah ekonomi yang efisien dan efektif. Ontah lah !!!



“...seandainya bangsa ini ingin menjadi bangsa besar dan berkeadilan momentum untuk itu sedang terjadi sekarang. Namun bukan dengan sentimen-sentimen politik yang tidak terukur.”

RAKYAT KEMBALI TERANCAM MISKIN ?

Bank Dunia merilis sebuah kajian ataupun laporan dengan judul *Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class*. Inti laporan tersebut pada dasarnya menyatakan keberhasilan Indonesia memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya sejak 50 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi terjaga pada kisaran 5,6 persen. Dari jumlah mereka yang miskin pada tahun 1993 sebanyak 80 persen tidak lagi miskin. Satu diantara lima orang Indonesia ekonominya ada dalam posisi aman. Jumlahnya mencapai 52 juta orang. Kelas menengah inilah yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Sejatinya ada 115 juta orang yang telah mampu keluar dari kemiskinan namun masih rentan untuk kembali jatuh miskin. Di Indonesia bahagian ini dalam laporan tersebut yang menjadi seksi dan kemudian diolah sedemikian rupa menjadi komoditas politik. Kata rentan diterjemahkan sebagai ancaman yang serius. Aspek positif dan upaya-upaya untuk menjaga itu seperti dikesampingkan. Padahal World Bank ingin mengingatkan bahwa majunya Indonesia dan harapannya untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi akan tergantung pada bagaimana mengelola umat yang 115 juta ini ke

depannya. Bayangkan saja, sejak 2002 konsumsi kelompok ini tumbuh rerata 12 persen setiap tahunnya.

Untuk itulah, menurut World Bank Acting Country Director untuk Indonesia, Roland Pryce diperlukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi makin baik. Caranya adalah menciptakan suasana dimana kelas menengah yang telah mentransformasi diri berubah dari masyarakat miskin semakin memiliki mobilitas ekonomi yang tinggi. Ini akan berdampak pada bertambahnya kelas menengah yang baru. Infrastruktur yang memadai serta Pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan perkembangan jaman menjadi prasyarat mutlak untuk itu. Termasuk jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas, air bersih dan sanitasi yang baik, dan tentunya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga rakyat merasa bahwa pemerintah menjadi mitra yang sinergis bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Bila diresapi sinyal ini dengan sadar maka
seandainya bangsa ini ingin menjadi bangsa besar dan berkeadilan momentum untuk itu sedang terjadi sekarang. Namun bukan dengan sentimen-sentimen politik yang tidak terukur.

Kebijakan pembangunan yang terarah sesuai prasyarat yang dianjurkan World Bank tadi akan menjadi penting diimplementasikan. Tidak gampang mengubah orang dari miskin menjadi tidak miskin. Apalagi kemiskinan itu adalah kemiskinan kultural. Namun di Indonesia kemiskinan struktural lah yang dominan sehingga terapi untuk penyelesaiannya lebih pada bagaimana negara dikelola semakin efisien dan efektif dan rakyat tidak dibawa ke dalam suasana yang secara politik makin menjadi miskin, khususnya secara moral dan produktivitas.

Di Riau selama periode 2011 sampai dengan 2019 pengurangan penduduk miskin sangat tidak signifikan. Prosentase penduduk miskin pada bulan Maret 2011 adalah sebesar 8,47 persen. Sedangkan pada posisi Maret 2019 prosentase penduduk miskin masih sebesar 7,08 persen. Artinya, selama delapan tahun terakhir kita hanya mampu memperkecil prosentase penduduk miskin hanya sebesar 1,39 persen.

Keluar-masuknya penduduk dalam batas garis kemiskinan masih tinggi atau lebih rentan. Padahal kenaikan Garis Kemiskinan hanya sekitar 4,31 persen per tahunnya. Untungnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Riau semakin menurun. Pada Maret 2018 tingkat kedalaman kemiskinan di Riau sebesar 1,2 sedangkan Maret 2019 turun menjadi 1,13 dan tingkat keparahan kemiskinan turun dari 0,30 menjadi 0,20. Artinya, pintu untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan cukup leluasa untuk dimasuki karena jarak pendapatan rakyat miskin dari garis batas kemiskinan sudah makin dekat dan disparitas pendapatan antar penduduk miskin relatif rendah.

Riau sangat dinamis dalam aspek mobilitas penduduk sehingga diperlukan sinergi kebijakan antar daerah dalam menangani penyediaan kebtuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan ekonomi daerah yang lebih berkualitas menjadi tantangan utama. Keterkaitan pembangunan antar wilayah sehingga memberi efek yang lebih efisien harus ditumbuhkan dengan kepiawian pemerintah provinsi mengembangkan kebersamaan dan sinkronisasi program. Baik antar sektor maupun antar wilayah. Fungsi dan kewenangan masing-masing level pemerintahan diselaraskan satu sama lain sehingga pada akhirnya membentuk kesatuan program yang saling melengkapi.

Dulu penanggulangan kemiskinan diarahkan pada wilayah pedesaan melalui upaya-upaya pengurangan pengeluaran rumah tangga, penyediaan MCK dan sumur-sumur air bersih Bersama guna meningkatkan sanitasi, mendorong perbaikan gizi rakyat dengan sumber bahan pangan yang mandiri. Selanjutnya pemberantasan kemiskinan diarahkan pada rekayasa sosial dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang diharapkan mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan secara tanggung-renteng, menumbuhkan perekonomian desa guna meningkatkan pendapatan masyarakatnya dengan menggali sumber-sumber ekonomi desa yang produktif dan marketable, dan memberikan kredit kepada pelaku-pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah agar lebih produktif dan memiliki skala usaha yang lebih besar sehingga mampu membuka

lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peran organisasi-organisasi non pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pada era milenial dewasa ini program pengentasan kemiskinan tentu perlu pula adanya penyesuaian. Perkembangan teknologi dan mobilitas informasi yang amat deras harus menjadi pertimbangan yang signifikan. Masyarakat akan mudah jatuh kembali miskin hanya karena ketidaksiapan berhadapan dengan dinamisnya era digital. Literasi digital menjadi mutlak diperlukan agar pondasi struktur penanggulangan kemiskinan yang dibangun sebelumnya tidak runtuh sia-sia. Bayangkan saja, hanya dalam waktu singkat akibat permainan judi online, arisan online, dan pinjaman-pinjaman online masyarakat menjadi terhempas dalam kerugian dan membuat mereka kembali dalam cengkeraman dan kesengsaraan kemiskinan.

Dalam laporan Bank Dunia tersebut disarankan bahwa ke depan bagi pemerintah Indonesia perlu adanya reformasi untuk kontrak sosial baru yang mengikat negara dan warganya yang semakin makmur ke dalam pengaturan yang saling menguntungkan. Inisiatif oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih berkualitas sehingga mampu menciptakan jalur untuk mobilitas ke atas melalui pekerjaan yang lebih baik. Ketahanan ekonomi dijaga melalui perlindungan sosial yang lebih kuat. Pendapatan pajak yang meningkat akan diperlukan guna memelihara kesinambungan program pembangunan. Ini berarti perlu ada kehati-hatian dalam menentukan kebijakan agar masyarakat tidak terdorong menunjukkan perilaku baru yang justru kotraproduktif terhadap pembangunan sebagai akibat adanya perbaikan pendapatan. Perubahan pendapatan akan mendorong adanya perubahan konsumsi dan secara sosial akan menampilkan perubahan perilaku pula.

Pada sisi lain semakin dituntut pula adanya redistribusi aset ekonomi. Masyarakat yang kian berdaya akan semakin menuntut adanya peningkatan pelayanan dan media untuk mereka menjadi semakin eksis. Pemahaman terhadap hak-hak sosial dan ekonomi semakin tinggi. Ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang selama ini seperti dipelihara akan semakin sensitif dan dapat menjadi sumber

kerawanan sosial. Tuntutan akan kesamaan hak dimata hukum akan meningkat. Pemerintah harus kian menyadari akan peranannya sebagai wasit yang adil. Secara berkesinambungan pemerataan ekonomi dan keadilan harus makin ditumbuhkan melalui kebijakan-kebijakan yang jelas dan tegas.

Penguasaan aset ekonomi berlebihan yang menumbuh suburkan hegemony ekonomi harus dipangkas. Ekonomi kemitraan yang membangun perbaikan kesejahteraan bersama hendaklah dipupuk dengan baik. Pemerintah harus mendorong kelas menengah ke atas menjadi pemicu timbulnya kesejahteraan bersama. Apakah itu melalui penumbuhan usaha bersama yang berjejaraing, sharing saham ataupun saham unjuk, dan memperbesar program CSR guna meningkatkan skill dan martabat rakyat. Pada dasarnya rakyat tidak takut miskin karena memang itu sudah menjadi perasaianya selama ini. Namun bersama-sama hidup sejahtera di Indonesia ini tentunya akan lebih nyaman dan membahagiakan, baik bagi si kaya maupun yang masih dalam lingkaran kemiskinan. Ontah lah !

*“Kinerja bank di suatu wilayah
maupun negara dapat
dinyatakan baik bila mampu
mendorong pertumbuhan
ekonomi dan sekaligus menjaga
kualitas pertumbuhan tersebut
melalui pemerataan dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat.”*

EKSPANSI KREDIT PERBANKAN DI RIAU

Perekonomian suatu wilayah tentunya tidak hanya didorong oleh pemerintah saja. Agar perekonomian tumbuh dan bergerak semakin membaik peran dari berbagai institusi sangat menentukan. Salah satu diantaranya adalah perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi berperan dalam menghubungkan antara pemegang kelebihan likuiditas dengan orang atau lembaga yang membutuhkan likuiditas. Seseorang ataupun institusi yang memiliki kelebihan uang akan menempatkannya di bank, baik dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Bank memberikan jasa dalam bentuk bunga (interest). Selanjutnya bank akan mendistribusikan likuiditas atau uang yang telah dikumpulkannya dari para deposan dalam bentuk pinjaman kepada siapa saja yang membutuhkannya dan mengenakan bunga juga yang akan menjadi pendapatan bagi bank tersebut. Semakin lancar perputaran uang dari yang berkelebihan kepada yang membutuhkan melalui bank maka perekonomian menjadi berjalan semakin dinamis. Oleh karena itu kredit yang diberikan bank kepada para pengusaha dan rumah tangga akan mendorong pertumbuhan investasi maupun konsumsi masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Di Indonesia peran kredit perbankan dalam perekonomiannya ternyata masih sangat kecil. Kredit perbankan belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari perbandingan atau rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dewasa ini rasionya baru pada kisaran 31 persen. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 115 persen, Vietnam 111,6 persen, dan Thailand sebesar 131,9 persen. Artinya peran perbankan dalam mendorong tumbuhnya perekonomian di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk menjamin terselenggaranya perekonomian yang lebih efisien dan produktif.

Riau sendiri peranannya lebih tinggi dari Indonesia yakni sebesar 35,27 persen. Apalagi jika dimasukkan alokasi kredit dari perbankan yang ada di luar Riau namun dimanfaatkan di Riau rasionya menjadi lebih tinggi yakni 53,69 persen. Total kredit berdasarkan lokasi bank di Riau sampai Triwulan II Tahun 2019 mencapai Rp 66,991 triliun sedangkan menurut lokasi proyek sebesar Rp 101,996 triliun. Artinya terdapat kredit sebesar Rp 35,01 triliun atau 32,36 persen yang dananya berasal dari luar Riau. Baik untuk investasi, modal kerja maupun untuk kepentingan konsumsi. Rerata pertumbuhan kredit di Riau mencapai 7,5 persen.

Proporsi penyaluran kredit terbesar di Riau adalah untuk kebutuhan investasi yakni mencapai Rp 37,52 triliun atau 36,79 persen. Hanya saja penyaluran dari perbankan yang berlokasi di Riau cuma sebesar Rp 16,85 triliun atau sekitar 44,91 persen dari total kredit investasi yang tercurah ke Riau. Artinya, perbankan yang beroperasi di Riau belum begitu optimal mendorong kebutuhan pendanaan investasi yang berkembang di Riau. Proporsinya pun relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi kredit untuk modal kerja dan untuk konsumsi. Bank yang beroperasi di Riau lebih banyak mengalokasikan kredit untuk kepentingan konsumsi yakni sebesar Rp 29,34 triliun atau 43,8 persen dari total kredit yang diluncurkannya ke Riau.

Kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp 24,53 triliun dengan pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit yakni sebesar 8,76 persen. Proporsi kredit

UMKM dalam struktur kredit perbankan di Riau mencapai 36,62 persen. Alokasi kredit UMKM tertinggi adalah untuk usaha kecil yang mencapai Rp 9,63 triliun atau 36,26 persen. Sedangkan untuk usaha mikro sebesar Rp 7,92 triliun dan usaha menengah sebesar Rp 6,99 triliun. Bank Perkreditan rakyat juga telah memainkan peranan yang cukup signifikan. Meskipun porsi kredit yang disalurkaninya masih relatif kecil yang baru sebesar Rp 1,01 triliun namun pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan total kredit yakni sebesar 8,94 persen.

Persoalan kredit perbankan di Riau nampaknya bukan dalam aspek ekspansi semata. Jika didekati dari ukuran Loan to Deposit Ratio (LDR) kadar ekspansi kredit di Riau baru mencapai 85,23 persen. Masih terdapat ruang untuk memperbesar porsi itu. Jalannya bisa melalui upaya meningkatkan pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau cukup dengan memperluas jangkauan penyaluran produk-produk perbankan kepada masyarakat. Indonesia memang masih sangat rendah literasi dan akupansi keuangannya. Sekitar 50 juta orang yang berpenghasilan dibawah dua dolar per hari belum memiliki akses sama sekali ke perbankan. Meskipun saat ini pendapatan mereka sangat kecil namun melalui sentuhan produk-produk perbankan akan muncul daya ungkit tertentu dalam perekonomian rumah tangganya. Lebih memprihatinkan lagi bahwa masih terdapat sekitar 60 juta pengusaha jenis mikro, kecil, dan menengah belum tersentuh jasa layanan perbankan.

Kinerja bank di suatu wilayah maupun negara dapat dinyatakan baik bila mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan tersebut melalui pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum perbankan bersama semua stakeholder perekonomian, guna menjaga ketahanan ekonomi bangsa, hendaknya secara konsisten mampu memelihara daya beli masyarakat tetap kuat. Pada gilirannya kekuatan daya beli ini akan mempertahankan pula kontinuitas produksi nasional. Selain itu, pengendalian inflasi yang stabil dan tidak terlalu tinggi harus dilakukan agar perekonomian tidak memanas pada tataran moneter. Pada sisi lain, pemerintah khususnya,

harus menciptakan kebijakan yang mampu mendorong investasi. Bukan malah menjejali investor dengan berbagai gaya dan kebijakan yang mendistorsi pertumbuhan investasi itu sendiri.

Di Riau sendiri pendalaman industri perlu dilakukan secara terencana dengan baik melalui pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada selama ini. Sumber-sumber bahan baku yang baru mampu dipasarkan dalam bentuk barang mentah dan barang setengah jadi dapat diolah ke hilirnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Termasuk membuka peluang kerja baru guna menyerap angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat. Usaha-usaha menengah dibina untuk menjadi mitra usaha mikro dan kecil dengan memberi peluang kepada mereka dalam mengolah sumber-sumber ekonomi pedesaan yang lekat dengan kehidupan ekonomi rakyat. Industri hilir sabut kelapa misalnya, dapat dikembangkan lebih dalam untuk menjadi produk-produk yang sangat marketable dan memiliki peluang pasar yang besar. Baik untuk pasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu lebih meningkatkan sinergi nya dan dengan institusi-institusi terkait lainnya, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Memperluas jangkauan pelayanan perbankan masih menjadi tugas yang amat strategis mengingat masih minimnya cakupan pelayanan tersebut. Perlu untuk mendorong perbankan yang beroperasi di Riau menciptakan inovasi-inovasi pelayanan terutama sekali layanan bagi rakyat miskin. Memang secara unit produk, bagi perbankan keuntungannya relatif kecil, tetapi dalam jumlah layanan yang besar, keuntungan tersebut akan menjadi besar pula. Bahkan daya tahan bank dapat meningkat karena diversifikasi pasar dan produk layanan yang makin luas dan beragam.

Kehatiahatian dalam ekspansi kredit memang harus tetap dijaga. Bank yang beroperasi untuk memberikan pelayanan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Riau relatif lebih tinggi risikonya. Kualitas aktiva untuk produk-produk yang diluncurkan ke UMKM dan oleh BPR jauh lebih rendah. Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah dari kredit yang disalurkan oleh BPR sudah mencapai 13,3

persen. Sedangkan kredit UMKM sebesar 4,74 persen. Walaupun secara keseluruhan NPL kredit perbankan di Riau masih rendah yakni sebesar 2,99 persen. Kenyataan ini membutuhkan uluran tangan pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong masyarakat bawah lebih dapat dipercaya lagi terhadap produk-produk perbankan yang dinikmatinya.

Selain itu harus ditumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat produktif yang dapat dipertautkan dengan dunia perbankan. Literasi keuangan ditingkatkan guna mencapai tingkat perilaku keuangan (banking habit) yang semakin efisien. Masyarakat yang memiliki usaha berkelompok dan melekat perbankan akan menjadi peluang pasar yang seksi bagi produk-produk perbankan. Pada gilirannya akan tercipta sinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan ekonomi wilayah pun akan lebih kuat. Budaya tanggung-renteng yang tercipta di masyarakat akan membuat usaha ekonomi rakyat lebih mampu menangkal cabaran dan penetrasi global. Di Riau produk-produk perbankan untuk usaha kecil dan mikro dapat diarahkan pada produktivitas rakyat yang mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan mampu mensubstitusi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini didatangkan dari luar daerah dan sangat rentan memicu inflasi serta memelihara kemiskinan. Ontah lah...!!!



“Laporan perekonomian Riau yang dirilis Bank Indonesia Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi Riau Oktober 2019 hanya 2,74 persen. Lebih rendah dari kondisi Oktober 2018 yang tumbuh sebesar 2,94 persen.”

EKONOMI RIAU 2020; BEGELEMAKPEAK ?

Banyak pakar memperkirakan perang dagang antara Amerika dan China sudah akan usai tahun 2020 ini. Paling tidak tensi dan tekanannya terhadap perekonomian berbagai negara akan menurun. Ciutan Trump memberi sinyal positif untuk itu. Pelaku ekonomi pun mempersepsikan itu sebagai momentum untuk perbaikan. Bagi Indonesia sendiri nampaknya sudah mulai agak kebal dengan perseteruan tersebut. Nilai tukar rupiah dalam resonansi ekonomi global justru sedikit membaik. Mungkin pelaku ekonomi mulai yakin akan ekonomi kekinian dan prospeknya dimasa yang akan datang. Carut marut politik bukan untuk diseduh sepanjang musim. Mesin ekonomi harus diputar supaya pundi-pundi dana tidak terkuras dan bankrupt. Pebisnis harus tetap berfikir keras agar tetap eksis meskipun harus banting strategi atau bahkan berpindah-pindah lapangan usaha.

Bagi Riau, baik pelaku usaha maupun masyarakat prospek ekonomi tahun 2020 memang masih penuh tanda tanya. Setahun terakhir perekonomian Riau diliputi kinerja yang sedikit mencekam. Pada triwulan ketiga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Riau justru lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Laporan perekonomian Riau yang dirilis Bank Indonesia Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi Riau Oktober 2019 hanya 2,74 persen. Lebih rendah dari kondisi Oktober 2018 yang tumbuh sebesar 2,94 persen.

Melemahnya perekonomian Riau menjadi tantangan besar untuk bangkit merebut peluang ke depannya.

Lebih menyakitkan lagi pada sisi lain justru tingkat inflasi lebih tinggi. Pada Oktober 2018 tingkat Inflasi di Riau hanya sebesar 2,45 persen. Masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi ketika itu. Berbeda dengan kondisi pada Oktober 2019 inflasi meningkat menjadi 3,5 persen padahal pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,74 persen. Ini berarti tekanan kehidupan ekonomi rakyat semakin berat dan dapat kian memperparah kemiskinan. Harga-harga yang lebih mahal tentunya akan semakin sulit dijangkau dengan perolehan nilai tambah ekonomi yang tidak memadai. Implikasinya adalah pada penurunan daya beli rakyat. Muaranya akan Nampak kembali pada kemerosotan ekonomi karena selama ini pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi penggunaan banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi ini akan makin memberatkan bila harga-harga komoditas unggulan Riau tidak dapat didongkak.

Pada sisi lain, untuk menggerakkan perekonomian dapat juga dilakukan melalui intermediasi perbankan dalam bentuk pengucuran kredit pada para pelaku usaha dan masyarakat. Baik untuk kredit investasi, modal kerja dan konsumsi. Data Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan berdasarkan lokasi proyek jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Oktober 2018 kredit mampu tumbuh 21,78 persen sedangkan pada Oktober 2019 mengkerut karena hanya tumbuh sebesar 2,22 persen. Ini terbukti dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang memang lebih rendah. Pada Oktober 2019 LDR turun menjadi 81,83 persen dari yang semula sebesar 83,24 persen. Ini artinya ekspansi kredit untuk membiayai usaha-usaha produktif rakyat dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat guna menaikkan daya beli kian melemah.

Parahnya lagi, kualitas aktiva bank justru makin memburuk. Posisi Oktober 2018 Non Performing Loans (NPLs) perbankan di Riau sebesar 2,73 persen sedangkan Oktober 2019 naik menjadi 2,95 persen. Meskipun masih dibawah standar yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun NPLs yang memburuk adalah cerminan perekonomian yang kurang baik. Kekhawatiran terhadap ini kian kentara jika kita amati apa yang dialami Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan yang berfokus untuk melayani kelompok in the bottom of the pyramid ini, yakni kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, masyarakat pinggiran, maupun masyarakat dengan usaha-usaha ekonomi yang mikro dan kecil, performanya juga mencemaskan. LDR meningkat dari 91,12 persen pada Oktober 2018 menjadi 98,31 persen pada Oktober 2019. Sakitnya kualitas aktivitya juga semakin memburuk dimana pada posisi yang sama NPL nya naik dari 11,72 persen menjadi 13,09 persen.

Pada sisi lain yang lebih mencemaskan adalah perspektif dan harapan para pengusaha sendiri yang menjalankan bisnisnya di Riau. Survey yang dilakukan Bank Indonesia Pekanbaru pada Triwulan III tahun 2019 justru memberi sinyal betapa kian pesimisnya para pelaku usaha di Riau selama satu tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan turunnya Saldo Bersih Likuiditas Perusahaan dari 30,59 persen pada TW III 2018 menjadi hanya sebesar 25,47 persen pada TW III 2019. Saldo Bersih Tertimbang Kegiatan Usaha melorot dari 19,17 persen menjadi 14,3 persen. Kemampuan perusahaan mencetak laba merosot dari 27,41 persen menjadi 23,41 persen dan para pengusaha merasa bahwa setahun terakhir ini kemudahan mengakses kredit justru semakin sulit yang ditandai dengan penurunan indeks dari 6,89 persen tahun 2018 menjadi hanya 4,8 persen di tahun 2019.

Perlambatan tersebut justru terjadi pada usaha-usah di sektor yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam struktur perekonomian Riau dan lekat dengan sumber kehidupan rakyat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perdagangan, serta

hotel dan restoran. Di sektor pertanian dalam arti luas tersebut ke depan justru diperkirakan akan terjadi kontraksi karena melemahnya permintaan akan komoditas di pasar dunia. Akibatnya, pengangguran akan meningkat, pendapatan masyarakat kian menurun dan persoalan-persoalan sosial akan marak pula.

Mengamati kondisi-kondisi masa lalu tersebut sudah sewajarnya pemerintah semakin berperan dalam menstimulus perekonomian di Riau secara terencana dan konsisten. Bila tidak maka peluang-peluang ekonomi yang terbuka, baik di tataran global maupun nasional tidak akan mampu ditangkap secara optimal. Apalagi senakin besar peluang maka semakin besar pula tantangan untuk memanfaatkannya. Setiap return yang diharapkan senantiasa diikuti risiko yang dihadapi untuk merealisasinya. Pertama, pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan yang senantiasa berubah-ubah tanpa alasan yang jelas justru akan membingungkan pelaku bisnis dan masyarakat. Kedua, setiap kebijakan haruslah tidak lepas dari pendekatan proporsional dan professional agar ada rasa kepastian dari rakyat.

Ketiga, pemerintah harus memberi proteksi (*protection policy*) untuk usaha-usaha khusus yang menyangkut kepentingan masyarakat umum agar ada keterjangkauan secara efisien dan efektif. Keempat, perlu senantiasa dilakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap pelaku-pelaku bisnis yang saat ini masih lemah namun memiliki prospek yang menjanjikan. Kelima, memupuk dan menumbuhkan inovasi rakyat untuk menciptakan produk-produk unggulan daerah yang marketable dan berkesinambungan. Keenam, pengembangan jejaring ekonomi melalui adanya kerjasama (*cooperation*) multi pihak untuk mendapatkan kenerja yang lebih tinggi.

Ketujuh, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan (*skill and knowledge*) rakyat secara terkait dengan prosepk usaha yang tersedia. Kedelapan, pengembangan usaha yang beraneka ragam (*diversity*) agar ada portfolio usaha yang dapat menjamin adanya pengalihan risiko. Selama ini selalu saja Riau bergantung pada satu

komoditas. Lepas dari minyak bumi masuk ke minyak sawit. Tidak beragam hasil usaha rakyat yang dikembangkan sehingga Riau terperangkap dalam persoalan meletakkan telur dalam satu keranjang. Kesembilan, adanya framework yang benar dan disepakati Bersama dalam membuat dan melakukan kebijakan serta program pelaksanaannya. Usaha coba-coba dan tanpa adanya rencana yang baik maka hasilnya tentu tidak akan baik pula.

Untuk melakukan pembangunan daerah di Riau dengan hasil yang lebih optimal dan efisien perlu kiranya disadari secara mendalam bahwa sinergi merupakan kunci penting. Sebagai sebuah proses dimana pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil harus bekerjasama maka kepemimpinan untuk menemukan resultan semua pemangku kepentingan (stakeholder) mutlak diperlukan. Mungkin tidak akan popular dimata beberapa orang atau tim sukses tetapi untuk menjamin semua sumberdaya pembangunan dan kapasitas lokal secara efisien dan efektif hal itu mestilah ditempuh. Pembangunan daerah itu harus bersifat holistic sehingga tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi tetapi juga mencakup aspek social, politik-administratif, dan budaya. Manfaat bersama hanya akan mampu dituai dari implementasi semangat kerjasama dan sama bekerja. Bukannya dengan kebijakan dan keputusan-keputusan yang bekelemakpeak tanpa dapat dibutir nilai manfaatnya.

*“Prospek perekonomian
Riau ke depan tetap
memiliki peluang yang
cerah. Harga-barga
komoditas, khususnya sawit
masih relatif stabil dan
layak bagi peningkatan
daya beli masyarakat.”*



DAYA TAHAN EKONOMI RIAU DI ERA NEW NORMAL

Dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian secara keseluruhan di Riau memang cukup signifikan. Pada Triwulan Pertama Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Riau terkoreksi sangat tajam yakni minus 3,47 persen dengan migas dan minus 4,08 persen dengan migas. Memasuki era new normal ini perekonomian Riau harus bangkit atau tumbuh kembali. Namun, tergantung dari kemampuan serta daya tahan pelaku-pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai konsumen. Daya tahan ekonomi itu sendiri akan tercermin dari daya tahan korporasi dan daya tahan rumah tangganya. Bank Indonesia melalui Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang diterbitkan setiap triwulan memberikan gambaran tentang daya tahan tersebut.

Ketahanan sektor korporasi di Riau nampaknya cukup terganggu akibat Covid 19 tersebut. Pada Triwulan Keempat Tahun 2019 Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Likuiditas Korporasi adalah sebesar 14,29 persen. Sedangkan pada Triwulan Pertama Tahun 2020 turun drastis menjadi hanya sebesar 6,12 persen. Dilihat dari SBT

Rentabilitas juga mengalami hal yang sama. Pada Triwulan Keempat Tahun 2019 nilainya sebesar 11,90 persen dan pada Triwulan Pertama Tahun 2020 anjlok menjadi 8,16 persen. Meskipun masih bernilai positif namun gangguan perekonomian akibat Covid 19 telah membuat daya tahan berbagai pelaku usaha formal menjadi semakin rentan. Margin korporasi pada Triwulan Pertama Tahun 2010 masih positif sebesar 0,05%. Namun keadaan itu terjadi akibat adanya kebijakan efisiensi perusahaan sampai pada tindakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghentian proses produksi. Pendapatan diperoleh dari penjualan hasil produksi yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Melemahnya daya tahan ekonomi Riau juga dapat diamati dari kondisi konsumen rumah tangga yang ada. Berdasarkan survey Bank Indonesia Pekanbaru jumlah konsumen yang berpendapatan cukup tidak banyak berubah dari 91,2 persen menjadi 91,1 persen pada Triwulan pertama Tahun 2020. Artinya, sebahagian besar rumah tangga masih memiliki pendapatan. Hanya saja jika dilihat dari jumlah rumah tangga yang memiliki dana cadangan untuk bertahan hidup mengkonsumsi untuk sebulan berikutnya penurunannya sangat signifikan yakni dari 29,1 persen menjadi hanya 0,3 persen pada Triwulan Pertama Tahun 2020. Artinya, jika pergerakan perekonomian tidak kunjung membaik maka hanya 0,3 persen masyarakat yang akan mampu bertahan menjalankan kehidupan dan sisianya akan menjadi problema baru yang memilukan. Hal lain yang perlu dicatat adalah terdapat 9,9 persen rumah tangga yang dalam masa pandemi Covid 19 ini tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Padahal 69,2 persen dari pendapatan yang ada selama ini digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah menghadapi rentannya daya tahan ekonomi Riau tersebut ? Pertama, memberikan bantuan langsung terhadap masyarakat atau kelompok rumah tangga yang pendapatannya tidak mampu menutupi kebutuhan hidupnya setiap bulan. Bantuan langsung tersebut dapat bersumber dari APBD baik provinsi maupun kabupaten kota maupun dengan menggalian

kepedulian sesama masyarakat yang masih memiliki pendapatan yang cukup atau memadai. Termasuk dari lembaga-lembaga bisnis yang masih eksis memasuki era new normal.

Di Riau terdapat sebanyak 1.674.068 rumah tangga sehingga yang menjadi sasaran dari bantuan langsung ini adalah sebanyak 165.733 rumah tangga. Bila rerata per rumah tangga terdapat empat anggota maka jumlah masyarakatnya akan mencapai 662.931 jiwa. Kebutuhan dana untuk konsumsi satu jiwa di atas Garis Kemiskinan dapat diasumsikan sebesar Rp 600.000,- maka dana yang dibutuhkan untuk program ini akan mencapai Rp 398 milyar. Dana ini tentunya dapat dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tinggal lagi bagaimana caranya supaya bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Bantuan ini akan signifikan bagi mendorong daya beli pada level masyarakat bawah.

Kedua, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada alur pemulihan (recovery). Korporasi dan Rumah tangga yang masih mampu bertahan meskipun tidak memiliki pendapatan yang memadai bagi tersedianya dana cadangan untuk konsumsi bulan berikutnya harus dijaga tetap mampu bertahan dan melanjutkan usahanya. Pemerintah harus menstimulus usaha-usaha tersebut melalui relaksasi cicilan kredit, pengurangan biaya-biaya ekonomi, baik dalam aspek produksi, distribusi, dan administrasi lainnya sehingga efisiensi ekonomi meningkat. Pengurangan biaya-biaya pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan lainnya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta menjaga stabilitas inflasi untuk memperkuat daya beli.

Ketiga, pelaksanaan refocusing APBD harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pada kondisi new normal ini. Banyak bidang usaha baru yang muncul dan berkembang serta tidak sedikit pula usaha-usaha ekonomi yang sempat terhenti dapat hidup kembali dan berproduksi. Pemerintah juga harus mendorong lahirnya kreasi-kreasi kebijakan yang produktif seperti peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memupuk konsumsi masyarakat daerah untuk terciptanya pasar lokal yang

ekonomis serta meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa.

Prospek perekonomian Riau ke depan tetap memiliki peluang yang cerah. Harga-harga komoditas, khususnya sawit masih relatif stabil dan layak bagi peningkatan daya beli masyarakat.

Perekonomian internasional juga akan cenderung membaik karena masing-masing negara akan berupaya untuk memperbaiki dinamika perekonomian negaranya. Konsumsi terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan berbasis kesehatan akan meningkat. Sejalan dengan semakin gencarnya implementasi teknologi dan sistem informasi dalam dunia bisnis maka efisiensi usaha akan meningkat yang pada gilirannya memberi peluang pada munculnya investasi-investasi baru. Pemerintah hendaknya menangkap peluang-peluang tersebut sebagai kanal bagi terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Peningkatan skill dan kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi menjadi lebih utama diprogramkan. Ontahlah...!!!

“Jangan cuma menyalahkan ibu-ibu hamil yang “mencurangi” BPJS Kesehatan dan bapak-bapak yang tega merokok disamping ibu-ibu hamil. Jangan menyesal jika Indonesia nantinya dipenuhi oleh bayi-bayi yang bakal menjadi pecundang yang kecanduan rokok serta gampang dipengaruhi oleh terpaan gelombang buruk asing.”



IBU HAMIL “PENGURAS” DANA BPJS ?

Mengejutkan sekali data yang dilansir Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Riau Pos, Sabtu, 19/10/2019, hal 2) yang memaparkan data bahwa persalinan jadi salah satu jenis layanan kesehatan yang paling banyak menyerap biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya saja penuh dengan trik perilaku yang sangat merugikan dan terkesan kurang etis. Ternyata para ibu hamil baru masuk sebagai anggota pada saat mengetahui dirinya sedang hamil atau ada yang masuk menjadi anggota sebulan sebelum melahirkan. Sayangnya, sebulan pasca melahirkan iuran langsung tak dibayar.

Sebanyak 219.446 Ibu hamil sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBUP) yang dijadikan sampel 64,7 persen menjadi peserta JKN dan, sedihnya, 68 persen diantara mereka memberhentikan pembayaran iuran sebulan pasca mereka melahirkan. Dari sampel ini selama periode kajian diperkirakan dana iuran yang bisa diperoleh sepatutnya dapat mencapai Rp 286,39 miliar namun dengan perilaku tersebut iuran yang terealisasi hanya sebesar Rp 102,62 milyar. Biaya yang harus diemban oleh BPJS Kesehatan untuk melayani para ibu

hamil ini mencapai Rp 309,45 milyar. Jadi, kebocoran soal BPJS ini muncul dimana-mana dan modusnya beragam. Termasuk tingkah para ibu hamil ini.

Kalau dulu, seorang ibu hamil sangat memegang teguh pantang dan larang. Dalam kearifan lokal berbagai daerah di tanah air mereka bahkan dilarang meludah secara serampangan, dilarang duduk di sembarang tempat. Tidak boleh berkata lancang kepada sesiapa yang ditemuinya. Ini dilakukan untuk menjaga agar bayi yang dilahirkan nanti tidak seperti apa-apa yang buruk yang dilihat dan diperlakukannya. Jika hasil kajian BPJS tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka sudah saatnya Indonesia menjadi waspada total untuk mendapatkan bayi yang lahir sebagai calon-calon penipu nantinya. Sejak dalam kandungan ibunya sudah melatihnya untuk melakukan siasat penuh intrik dalam memperoleh manfaat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jumlah itu baru yang terdata. Tentunya masih sangat banyak ibu-ibu hamil di Indonesia dan bila 68 persen diantaranya melakukan perbuatan culas seperti itu maka kerugian negara yang timbul pastilah semakin besar pula.

Pada kenyataannya tidak hanya ibu-ibu hamil yang melakukan hal buruk dalam pengelolaan negara ini. Indonesia sudah jamak menelan kepedihan akibat pengelola negara yang berbuat tidak terpuji. Mereka melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hanya untuk memikirkan kepentingan diri dan keluarga mereka sendiri. Perilaku itu menular kepada rakyat untuk mencari celah-celah masuk guna melakukan penipuan dan keculasan. Termasuk ibu-ibu hamil yang tidak memperdulikan lagi dampak perilaku buruknya terhadap janin yang dikandungnya kelak. Dalam bahasa ketatanegaraan hal seperti inilah yang disebut memiliki kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang tidak memadai. Padahal, dalam suatu negara, guna menciptakan tatanan kemasyarakatan (*civil society*) yang baik dan saling membahagiakan syarat mutlakny adalah adanya masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki *civic competence* yang tinggi.

Menurut Branson (1998) kompetensi kewarganegaraan ini akan meliputi pengetahuan tentang kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skill), sikap kewarganegaraan (civic attitude), nilai-nilai kewarganegaraan (civic values), dan tindakan kewarganegaraan (civic action citizen). Dari kelima hal tersebut akan terbentuk watak kewarganegaraan (civic disposition) sebagai karakter publik dan privat yang sangat penting bagi mengembangkan dan memelihara demokrasi konstitusional. Karakter privat wujudnya adalah tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Sedangkan karakter publik menyangkut kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (role of law), berfikir kritis, dan kemampuan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi.

Bagaimana mungkin melahirkan masyarakat madani bila tingkat pemahaman anak bangsa akan kewarganegaraan atau pemahamannya terhadap keberadaan dirinya sebagai warga negara sangat rendah, tidak memiliki kecakapan akan pelaksanaan fungsi-fungsinya menjadi warga negara, tidak mampu bersikap yang sepatutnya sebagai anggota warga bangsa, dan tidak memiliki nilai-nilai yang wajib dipegang teguh dalam kedudukannya sebagai warga negara. Sehingga tidak jarang kita menemukan tindakan-tindakan warga negara yang tidak mampu menunjukkan watak warga negara yang baik. Karena itu lah saat ini masih umum kita lihat kaum bapak merokok disembarang tempat meskipun itu mengganggu kenyamanan orang lain. Senantiasa kita saksikan dijalanan kendaraan yang saling dahulu-mendahului tanpa menyadari perlunya antrian. Selalu ditemukan adanya tetangga membakar sampah disamping rumahnya yang asapnya masuk ke rumah tetangganya tanpa merasa bersalah. Ibu-ibu hamil pun tidak perduli lagi soal resapan amoral yang dapat masuk ke jabang bayinya sehingga tak lagi merasa sungkan untuk mengkali-kuna iuran BPJS nya.

Tidak gampang menumbuhkan dan membangun civic competence rakyat dalam suatu negara bangsa untuk mewujudkan masyarakat madani yang sesungguhnya. Indonesia yang demikian lama

dijajah bangsa asing yang tidak mengajarkan dan menciptakan rakyatnya memiliki sikap dan perilaku kewarganegaraan dan menikmati kemerdekaan sejak 74 tahun lalu yang bergelimang politik patron-client tak beraturan tentunya akan semakin rumit untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic competence dimaksud. Era milenial dan dalam fase industry revolution 4.0 ini Indonesia semakin dihadapkan pada tantangan eksternal yang tidak kecil. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, secara internal masih berkuat dengan demokratisasi yang kebablasan dan minim aturan, reformasi dan otonomi yang tak memiliki target kinerja yang terukur, serta pemerintah dan penegak hukum yang kurang bermoral maka memperoleh masyarakat yang memiliki civic competence yang tinggi sebagai prasyarat mutlak menciptakan civil society yang baik akan menjadi mimpi kosong belaka.

Jangan cuma menyalahkan ibu-ibu hamil yang “mencurangi” BPJS Kesehatan dan bapak-bapak yang tega merokok disamping ibu-ibu hamil. Jangan menyesal jika Indonesia nantinya dipenuhi oleh bayi-bayi yang bakal menjadi pecundang yang kecanduan rokok serta gampang dipengaruhi oleh terpaan gelombang buruk asing.

Sebelum mereka lahir sikap, perilaku dan watak mereka sudah dibentuk untuk jadi warga negara seperti itu. Kompetensi kewarganegaraan mereka akan menjadi minim dan menumbuhkembangkannya menjadi baik semakin sulit. Kewarganegaraan itu sendiri mengandung elemen identitas, partisipasi, hak, kewajiban, dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial bersama. Aristoteles sebagai seorang filosof Yunani menggariskan kewarganegaraan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Sedangkan Freddy K (2017) menyatakan kewarganegaraan bukan sekedar bertalian dengan relasi negara dan warganya tetapi ia mengacu kepada suatu status yang mengekspresikan bahwa warga negara diharapkan mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk berpartisipasi sebagai anggota negara bangsa yang modern dan beradab.

Guna menghindarkan berkembang biaknya bayi-bayi yang bakal kian merusak bangsa dan masyarakat yang semakin terpolarisasi pada

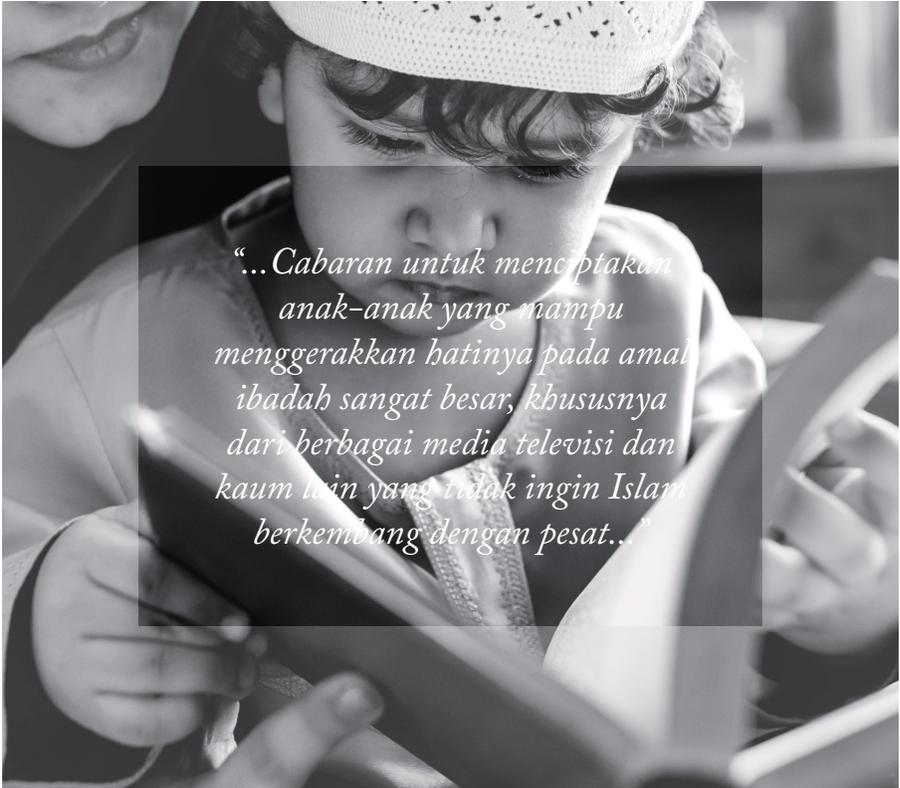
kepentingan masing-masing serta berpotensi menghancurkan keberlangsungan hidup bangsa maka civic competence rakyat sebagai warga bangsa harus ditumbuhkan dengan lebih kuat dan tegas. Pertama, penegakan hukum yang tegas dan istiqomah. Sepanjang hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka tidak mungkin lahir rakyat yang mampu memahami bangsa nya sebagai sebuah entitas bersama dan harus dipelihara dengan baik. Kedua, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jika ibu-ibu hamil tak boleh mempecundangi maka penyelenggara BPJS Kesehatan juga harus bersih dari praktek-praktek tak terpuji yang bernuansa korupsi.

Ketiga, reformasi kurikulum Pendidikan dasar dan menengah yang lebih banyak diarahkan pada pembentukan karakter anak bangsa yang disiplin, partisipatif, menjunjung tinggi nilai-nilai, memiliki tanggungjawab moral, peduli akan sesama sebagai warga bangsa. Keempat, redistribusi aset ekonomi sebagai bentuk pemerataan dan keadilan sehingga basis pemberdayaan dan pembentukan civic competence rakyat dapat berjalan lancar. Tanpa logistik yang memadai sulit bagi rakyat untuk berfikir logis dalam berpartisipasi. Perlu disadari oleh kaum kaya bahwa tidak ada tempat untuk lari dimuka bumi ini dengan harta yang berlimpah bila rakyat miskin sudah muak dan kian memuncak frustasinya. Kelima, awalilah semua yang dilakukan dan dipresentasikan dalam kehidupan dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa alam semesta. Hidup adalah impian yang silih berganti dan bila tak terkendali ia akan menjadi sunyi dan tak berarti. Ontahlah ?

RAMADAN



Bagian 3



“...Cabaran untuk menciptakan anak-anak yang mampu menggerakkan hatinya pada amalan ibadah sangat besar, khususnya dari berbagai media televisi dan kaum lain yang tidak ingin Islam berkembang dengan pesat...”

IRONISME REALITA KEHIDUPAN DI BULAN RAMADAN

Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Timbul perasaan sedih akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah dan dalam hati bertanya-tanya apakah capaian yang diperoleh selama bulan Ramadan memang sesuai dengan kuota yang telah disediakan Allah SWT. Akankah posisi insan yang takwa itu lekat dalam diri ? atau hanya sia-sia belaka menahan lapar dan dahaga. Evaluasi dalam arti yang sesungguhnya menjadi penting dan tekad untuk mengimplementasikan tatanan kehidupan setelah Ramadan adalah sesuai dengan pembekalan yang dilakukan selama bulan Ramadan menjadi lebih penting lagi.

Dalam mengevaluasi realitas kehidupan masyarakat di bulan Ramadan saat ini ternyata ditemukan beberapa fakta yang ironis dan diperkirakan dapat mereduksi nilai-nilai Ramadan itu sendiri sebagai proses penggemblengan untuk menempatkan diri sebagai manusia yang takwa. Dimulai pada saat memasuki bulan Ramadan masyarakat disibukkan dan diajak sibuk untuk memeriahkannya. Konsep memeriahkan tentu saja memiliki nilai dan makna yang tinggi karena manusia akan memasuki suatu masa, selama satu bulan, dimana segala amal ibadah digandakan outcomenya sampai ribuan kali. Meminjam

konsep leverage dalam manajemen keuangan atau konsep elastisitas dalam ilmu ekonomi maka satu unit input yang selama ini menghasilkan sepuluh unit output maka pada bulan Ramadan unit outputnya menjadi berlipat ganda menjadi seribu unit.

Namun ironisnye, fakta dilapangan menunjukkan proses memeriahkan datangnya Ramadan justru berseberangan dengan makna kemeriahan yang seharusnya. Tradisi-tradisi yang dikembangkan malah melenceng dari nilai-nilai keislaman. Kemeriahan diwujudkan dalam bentuk pesta pora, mandi bersama bercampur baur antara lelaki dan perempuan. Bahkan menyiksa binatang. Beberapa ekor itik dilepaskan dalam sungai lalu dikejar-kejar. Bahkan tidak jarang terjadi kecelakaan sampai merenggut nyawa untuk memeriahkan Ramadan. APBD yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat malah digunakan untuk pencitraan pimpinan daerah bahwa dengan mengadakan pesta pora menyambut Ramadan kepedulian sang pemimpin terhadap agama dapat dianggap berpihak. Bukankah salah satu ciri dari insan yang bertakwa yang ingin dicapai dengan segala amalan dalam bulan Ramadan adalah tawakal yang merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Sifat ini baru akan menjelma dalam diri manusia ketika imannya sudah matang.

Bentuk lain dari realitas dinamika kehidupan rakyat dalam bulan Ramadan adalah mengisi hari demi hari yang penuh dengan pemborosan dan hawa nafsu. Atas nama Ramadan diberbagai tempat menjamurlah pasar-pasar tajil terbuka. Jalan-jalan menjadi macet dan begitu banyak rakyat yang melampiaskan hawa nafsunya untuk terbuka dengan berbagai macam makanan. Padahal justru bulan Ramadan merupakan tempat dimana manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Bila dibulan Ramadan setan dan jin dibelenggu oleh Allah SWT maka hal-hal yang dapat merusak amal ibadah dan keimanan umat muslim tinggal hawa nafsu dan keadaan itu sendiri.

Bulan Ramadan seharusnya dapat membentuk manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan menerima dengan ikhlas

segala keadaan yang terjadi sebagai sebuah ketentuan Allah. Jika dalam bulan Ramadan ini umat Islam mampu mengawal hawa nafsunya dan menjadi kian berhemat dengan tidak makan pada siang hari maka tidak ada alasan sedikitpun untuk terjadinya inflasi dan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Justru sebaliknya, persediaan bahan pokok akan meningkat karena berkurangnya permintaan. Harga menjadi turun dan rakyat kecil yang selama ini kurang mampu mengakses barang-barang tersebut dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.

Alangkah indahny jika uang yang seharusnya dikeluarkan untuk makan siang, lalu karena berpuasa tidak jadi dibelanjakan, dan uang itu seterusnya dapat terkumpul selama tiga puluh hari maka akan menjadi potensi ekonomi yang sangat besar untuk pemberdayaan umat. Bila ada dua juta orang umat Islam berikhlas diri seperti itu dan setiap orang mampu mengumpulkan sumberdaya sebesar Rp 600.000,- selama Ramadan maka akan mampu dihimpun dana pemberdayaan umat Islam mencapai Rp 1,2 triliun. Bayangkan, jika penduduk Indonesia sebanyak 230 juta orang dan 90 persennya Islam, lalu 50 persen diantaranya bukan merupakan orang miskin maka akan ada potensi sebanyak 103.500.000 umat. Apabila separoh pula dari potensi tersebut mau dan mampu merealisasikan untuk menyumbangkan dana makan siang yang tak dibelanjakan karena berpuasa sebesar Rp 20.000,- per orang per hari maka selama Ramadan akan terhimpun kekuatan financial pemberdayaan umat Islam sebesar 103.500.000 orang x Rp 20.000,- x 30 hari = Rp 62,1 triliun.

Lantas, yang terjadi justru sebaliknya. Umat Islam melipatgandakan pengeluarannya dibulan Ramadan, baik untuk kepentingan berbuka puasa, ngabuburit, mercon, kembang api sampai pada memenuhi keperluan hari raya Idul Fitri. Sepuluh hari terakhir jumlah umat Islam di mal dan pasar swalayan jauh lebih banyak dari mereka yang bertarawih di mesjid. Barang-barang kebutuhan pokok langka dan meningkat harganya. Pemerintah membebani pula APBD nya untuk keperluan pasar murah. Produktivitas rakyat menurun dan konsumerisme naik tajam. Hal-hal yang mungkin sangat tidak

diinginkan oleh maksud adanya bulan Ramadan itu sendiri. Hal-hal yang justru ingin diberantas dalam diri manusia dengan melatih diri selama bulan Ramadan untuk dapat menjadi manusia yang rendah hati, mampu mengendalikan hawa nafsu dan ikhlas menerima keadaan dengan melipat-gandakan amal ibadah sepanjang hari dan sepanjang malam.

Ironisme lainnya adalah dengan menggunakan Ramadan maka berbagai pembatasan pun dilakukan. Rumah makan dan tempat hiburan harus ditutup dan umat-umat lain diminta untuk menghormati orang berpuasa dengan tidak makan dan merokok ditempat-tempat umum. Ternyata dengan berbagai cara pula rumah-rumah makan itu tetap saja buka tetapi dengan pintu yang sedikit tertutup. Orang yang makan disitu adalah mereka-mereka yang ber-KTP Islam. Mereka tidak takut dan malu karena sepertinya tersembunyi dari pandangan orang. Dihadapan manusia mereka mampu berkelit atau memang tak perlu berkelit. Dihadapan Allah SWT mereka lupa atau tak mau peduli bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berkelit. Allah SWT maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui. Ibadah puasa adalah bertautan langsung antara manusia dengan Allah SWT dan merupakan penyerahan total diri seseorang dengan Allah SWT. Manusia dalam keadaan apapun harus melatih diri untuk tidak tergoda oleh hawa nafsu dan keadaan disekelilingnya. Semakin manusia itu digoda dan semakin ia meningkatkan keimanan dan ibadahnya maka Allah SWT menjanjikan pahala yang kian besar pula. Dalam persoalan ini tidak diperlukan sama sekali adanya kamufase dan segala aturan yang seakan-akan “memanjakan” orang berpuasa.

Tampilan yang mengesankan justru dipertontonkan pula oleh generasi muda Islam. Di bulan Ramadan mereka menaja Asmara Subuh setelah pada malam harinya mereka saling kebut-kebutan untuk menonjolkan sisi buruk sifat-sifat manusia. Mercon berdentuman dan kembang api bersilauan ditengah-tengah shalat tarawih dan ini dilakukan oleh anak-anak yang masih pada tingkat sekolah dasar ke bawah. Tradisi Islam mungkin tidak mengenal

suasana seperti ini untuk mengisi hari di bulan yang penuh magfirah ini. Tarawih, tadarus, zikir dan bertahajud adalah perilaku yang sepatutnya menjadi asyik dikerjakan oleh anak-anak muda Islam dalam bulan Ramadan.

Bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan yang non-islami tersebut menjadi kebiasaan yang islami dikalangan generasi muda islam memang menjadi tantangan tersendiri yang tidak kecil.

Cabaran untuk menciptakan anak-anak yang mampu menggerakkan hatinya pada amal ibadah sangat besar, khususnya dari berbagai media televisi dan kaum lain yang tidak ingin Islam berkembang dengan pesat.

Para mubaligh yang diturunkan untuk memberikan tausiyah Ramadan setiap malamnya memang harus dibekali cara-cara menyadarkan umat untuk kian berorientasi Islam. Jangan malah menjadi corong dan perpanjangan tangan politikus dan pejabat untuk melakukan tebar pesona. Apalagi melakukan tausiyah berbekal pengetahuan dialogis dengan umat yang sangat minim sehingga terkesan sebagai ceramah yang asal-asalan. Jamaah tarawih malah semakin mengantuk.

Kita memang harus senantiasa berbenah. Mulai dari pemimpin dan ulama sampai pada tingkat rumah tangga, surau-surau dan mesjid-mesjid. Prasarana dan sarana untuk memperkokoh umat islam sebenarnya sudah sangat cukup. Mesjid-mesjid diberbagai daerah sudah sangat “mentereng” yang dapat dijadikan sebagai pusat ibadah, pusat pemberdayaan dan pusat perlindungan umat yang sangat strategis. Setiap tahun selama satu bulan lamanya Allah SWT menyediakan waktu yang sangat berharga bagi kita untuk menunjukkan tidak saja identitas kita sebagai umat Islam tetapi juga pengabdian kita yang akan dihargai-Nya secara berlipat ganda. Semoga kita memang memperoleh prediket umat yang takwa ketika Ramadan ini berlalu. Semoga...dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, mohon maaf lahir dan bathin.

*“Anak bangsa saat ini sedang
dirongrong ketakutan dari
merebaknya terorisme.
Dirundung pilu dari bencana
demi bencana yang menimpa.
Didera kemiskinan karena
pembangunan tak kunjung tepat
pada sasarannya. Mulai
kehabisan kesabaran karena
beban hidup yang menghimpit
tak kian berkurang. Harga-
harga melambung tetapi
pendapatan tak berubah. Barang-
barang langka diberbagai tempat.
Entah menyelinap dimana ?”*

RAMADHAN 1430 H: MOMENTUM STRATEGIS INDONESIA

Dua hari menjelang Ramadhan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang dalam Pilpres 2009, menyampaikan pidato penerimaan (acceptance speech). Sebagai pemenang SBY dengan santun menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan yang paling mengesankan adalah ajakannya untuk bersatu setelah semua tahapan dalam kompetisi Pilpres usai sudah. Ia menyerukan bahwa ada waktunya berkompetisi dan ada waktunya bersatu. Hasil pemilu, menurut SBY selayaknya dijadikan modal untuk membangun hari depan bangsa yang lebih baik.

Ajakan ini akan terasa kering jika hanya menelaah substansi pidato tanpa dikaitkan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Makna pidato tersebut menjadi dalam. Pertama, disampaikan menjelang masuknya bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah. Sudah selayaknya umat Islam beralih fokus dari mempertentangkan proses dan hasil Pilpres kepada perhatian yang besar berkenaan proses ibadah di bulan Ramadhan yang manfaatnya jauh berlipat ganda. Kedua, kerja besar bangsa ini harus lebih

dikedepankan ketimbang mempersoalkan apa-apa yang sudah berlalu.

Anak bangsa saat ini sedang dirongrong ketakutan dari merebaknya terorisme. Dirundung pilu dari bencana demi bencana yang menimpa. Didera kemiskinan karena pembangunan tak kunjung tepat pada sasarannya. Mulai kehabisan kesabaran karena beban hidup yang menghimpit tak kian berkuarang. Harga-harga melambung tetapi pendapatan tak berubah. Barang-barang langka diberbagai tempat. Entah menyelinap dimana ?

Ramadhan 1430 H kali ini memang memberi momentum strategis bagi Indonesia untuk kembali ke pangkal jalan. Setelah tersesat demikian lama dalam sistem ekonomi yang tak kunjung memberikan kesejahteraan, sudah saatnya untuk kembali ke khittah. Kompetisi yang tidak sehat telah memenjarakan begitu banyak umat dalam kesengsaraan. Hanya sebagian kecil yang mampu menikmati hidup serba berkecukupan, bahkan bertimbun harta lebih. Padahal Islam mengajarkan; “Agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...”(QS. Al-Hasyr[59]:7). Allah SWT sangat murka terhadap orang-orang yang membiarkan merebaknya kemiskinan. Firman Allah SWT; “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin”(QS. Al-Ma’un[107]:1-3). Karena itulah (Pustaka Pengetahuan Al-Quran,2007:21) Islam tidak hanya cukup memperkuat hak setiap individu yang terkait dengan tercukupinya kebutuhan hidup masing-masing, tapi juga memprakarsai pengelolaan harta dalam hal zakat.

Berbagai pejabat yang mengisi institusi negara akan dilantik. Mulai dari DPRD ditingkat kabupaten/kota samapi DPR dan DPD RI. Mulai dari presiden dan wakilnya sampai para menteri yang akan memimpin departemen dan non departemen yang diikuti pula oleh perangkat-perangkat birokrasi di dalamnya. Pelantikan berbagai pejabat publik tersebut, baik pada bulan Ramadhan maupun sesudahnya, dengan mengucapkan sumpah jabatannya, semoga menancapkan kesediaan berbakti untuk rakyat.

Mereka harus lebih mendalami makna Ramadhan 1430 H kali ini.

Tidak saja sebagai media untuk menuju ketaqwaan kepada Allah SWT tetapi juga dalam arti keikhlasan dan ketulusan mengemas atau mengelola bangsa ini sebagai tempat bernaung rakyat yang nyaman, terpelihara dan sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal itu Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnya dunia itu adalah nikmat terindah, dan sesungguhnya Allah SWT memberikan kepercayaan kepada kalian sebagai khalifah di dunia. Dia Maha Melihat apa-apa yang kalian lakukan”. Dari sinilah seharusnya seluruh pejabat Indonesia menancapkan tekad untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan rakyat kepadanya sehingga implementasinya tidak melenceng menjadi proses “balik modal” atau “cari modal” untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri beserta kroni-kroninya.

Ajakan SBY untuk kebersamaan dalam membangun bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera dapat dipandang sebagai keinginan untuk mempererat silaturahmi. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW; “Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menghubungkan tali silaturahmi”. Termasuk tentunya umur kepemimpinan SBY sebagai presiden tentu akan lebih bermakna bila hubungan antar manusia di Indonesia dapat dijalin sebagai basis untuk memperkuat hubungannya dengan Sang Khalik. Kerja besar kepemimpinan SBY ke depan adalah memastikan anak bangsa ini mendapat keleluasaan untuk memperkuat jejaring kesejahteraannya sebagai modal memperdalam ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Perubahan keadaan ekonomi rakyat kedalam pola yang memiliki keseimbangan antar manusia hanya mungkin diperoleh bila semua kita menyadari bahwa kasih sayang haruslah menjadi landasan utama, disamping akhlak, untuk berbagi sehingga tidak ada harta yang kian menumpuk tetapi tetangga kelimpungan tidak makan. Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim, pernah bersabda: “Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ditawannya hingga mati. Ia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya memakan binatang-binatang kecil atau serangga-

serangga bumi”. Bayangkan bila manusia yang diperlakukan seperti kucing tersebut dan murka Allah SWT tentunya akan lebih besar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini begitu banyak manusia yang harus mati dan manusia yang membuat mati seperti kisah kucing dimaksud. Indonesia kian menyuburkan orang-orang yang ingin memenjarakan kemerdekaan orang lain, menelantarkan manusia dan bahkan dengan dalih agama meneror dan membunuh sesama umat.

Memanfaatkan momentum strategis pada bulan penuh berkah, Ramadhan 1430 H ini, untuk mencapai ketaqwaan yang tinggi, adalah menyadarkan semua komponen bangsa, terutama pemimpinnya akan kebesaran arti kasih sayang dan kemauan berbagi untuk sesama. Abu Hurairah RA (Ensiklopedi Al-Quran, 2005:46) berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Tatkala dalam perjalanan, seorang pria merasa sangat dahaga, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah sumur (mata air). Ia pun menuruni sumur tersebut lalu minum. Kemudian, ketika keluar dari sumur, tiba-tiba ia melihat seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Anjing ini kehausan sebagaimana aku’, pikir laki-laki itu. Maka ia pun kembali menuruni sumur itu dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian ia memegang mulut sepatu itu lalu memberi minum anjing tersebut. Allah SWT berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya”. Begitulah Allah SWT menghargai orang yang memiliki rasa kasih sayang. Dan jika pada sesama manusia perasaan belas kasih itu senantiasa ditumbuhkan dan diwujudkan maka keselamatan bersama dan kesejahteraan untuk semua akan mudah diperoleh. Allah SWT pun akan semakin sayang pada rakyat Indonesia.

Indonesia masa depan membutuhkan torehan orang-orang yang berakhlak dan mau serta mampu membangun kasih sayang untuk sesama. Tanpa itu, Indonesia tak akan bertahan. Ramadhan adalah bulan dimana umat Islam memperbaharui jati dirinya agar kian dekat dengan Allah SWT, kian bersahabat dengan sesama. Memberi untuk membahagiakan dan berbelas kasih karena ingin menggembirakan. Perilaku itulah yang seharusnya berkelanjutan walaupun Ramadhan

berganti Syawal dan manusia berproses menuju Ramadhan berikutnya...Inshaallah...!!!

RAMADAN DAN PEMULIHAN EKONOMI

Hantaman pandemic Covid 19 telah membuat perekonomian Indonesia terjungkal cukup parah. Menurut penuturan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia (Riau Pos, 1 Mei 2021, hal 3) sebelum Covid 19 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3 persen. Namun realisasinya malah terpuruk dalam dengan pertumbuhan minus 2,7 persen. Ini berarti nilai tambah ekonomi yang menguap mencapai 8,8 persen yang bila diekuivalenkan dengan nilai rupiah mencapai 1.356 triliun rupiah.

Sebahagian besar usaha ekonomi masyarakat bangkrut dan PHK terjadi di banyak sector. Pelaku UMKM yang mampu bertahan hanya sekitar 6 persen. Padahal selama ini UMKM menjadi penyangga bagi menampung laju pertumbuhan angkatan kerja. Saat ini sector tersebut justru terpaksa menjadi penyumbang pengangguran karena banyaknya usaha-usaha mereka yang gulung tikar.

Dalam suasana seperti itu tangan pemerintah diharapkan dapat membantu sepenuhnya. Bukan tidak menunjukkan hasil sama sekali namun kinerja pemerintah mulai dari pusat sampai daerah masih sangat tidak memadai. Bahkan dalam kondisi rakyat yang terjepit itu masih ada saja oknum-oknum pemerintah yang tega berlaku curang.

Bantuan social untuk menopang suksesnya penanggulangan pandemic Covid 19 pun djarah secara tidak bertanggung jawab.

Skema-skema kebijakan yang salah sasaran juga masih banyak terjadi. Belum lagi soal ketidak konsistenan kebijakan itu sendiri membuat masyarakat malah merasa bingung dan kehilangan pemandu yang mampu membawa mereka bangkit dan sehat. Keputusan-keputusan pemerintah dibuat dan kemudian dicabut kembali. Hal ini seperti menggambarkan betapa lemahnya kemampuan pemerintah mencari resultan dari tarik-menarik situasi yang terjadi. Kualitas oknum-oknum pengambil kebijakan terkuak ke permukaan dari cara-cara penanganan yang diimplementasikannya untuk membantu persoalan-persoalan pelik yang dihadapi rakyat.

Ke depan persoalan kemampuan pemerintah untuk mampu menjadi garda terdepan mengatasi pandemic Covid 19 ini bukannya akan bertambah baik. Anggaran negara dari sisi pengeluaran diperkirakan akan makin membengkak. Sementara dari sisi pendapatan justru akan mengalami penurunan. Pada periode 2019 ke 2020 pengeluaran pemerintah naik sebesar 12,3 persen sementara itu pendapatan malah merosot 16 persen. Akibatnya terjadi deficit hingga 6,1 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Kemampuan pemerintah untuk berbuat bagi kepentingan rakyat akan melemah. Apalagi dengan mental birokrasi yang korup, membudayakan penguasaan daripada pelayanan, kurang inovatif, dan enggan belajar untuk mampu mengatasi persoalan serta kepekaan yang rendah dalam mencermati penderitaan rakyat sehingga penanganan-penanganan masalah rakyat menjadi kurang sinergis dan optimal.

Lalu apakah rakyat akan pasrah yang membiarkan dirinya tetap berada dalam situasi seperti memakan buah simala-kama, dimakan mati bapak namun bila tak dimakan mati ibu? Persoalan kehidupan tentu menjadi tidak semakin sederhana. Berbagai aturan pemerintah membuat ruang gerak menjadi terbatas secara fisik. Ini memang tuntutan penting bagi pengendalian virus Covid 19. Disisi lain, tanpa mobilitas maka penduduk akan menjadi kehilangan mata pencaharian. Pahitnya kehidupan tidak jarang pula menimbulkan tindakan yang

kurang bertanggungjawab secara social kemasyarakatan.

Tanpa sepenuhnya menggantungkan penyelesaian pada kebijakan pemerintah maka sudah sepantasnya semua komponen bangsa, khususnya umat Islam, untuk merenung dan menggunakan seoptimal mungkin momentum kehidupan yang ada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Momentum kehidupan ini akan mengarah pada dua sisi, yakni ke dalam diri sendiri dan ke luar dirinya sebagai perwujudan hidup yang bersilatullah. Kedua sisi momentum ini akan memberi berkah sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT.

Dalam tulisannya Nisa Mutia Sani (2019) menguraikan beberapa berkah yang dapat dipetik sempena momentum Ramadan ini. Pertama, memperbanyak doa baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan orang lain. Ramadan memberi kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak doa karena ada harapan besar sela bulan suci itu untuk dikabulkannya doa-doa kepada Allah SWT. Percaya akan hal tersebut maka akan mengurangi segala keluh kesah ketika cobaan hidup dalam masa pandemi ini semakin berat. Kesempatan itu tentu saja, dan tidak jarang, dapat menumbuhkan ide-ide baru dan inspirasi-inspirasi baru dalam mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan kehidupan.

Kedua, menghatamkan Al-Qur'an yang sudah pasti nantinya akan memperoleh ilmu pengetahuan dan berbagai jalan untuk mengarungi hidup dalam dunia yang fana ini. Dalam Al Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman, yang artinya; Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Itu berarti dalam bulan Ramadan ini merupakan momentum bagi umat Islam untuk mencari ilmu-ilmu dan petunjuk-petunjuk yang sesungguhnya akan dapat dipakai dalam menjalani kehidupan dan bangkit dari keterpurukan ekonomi maupun sosial. Ini adalah berkah yang tak ternilai harganya jika mampu meraihnya secara maksimal.

Ketiga, shalat Tarawih yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa yang

menghidupkan malam bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bermakna ada momentum membersihkan diri sehingga ke depan akan muncul kepercayaan diri untuk melangkah dan memperbaiki kehidupan. Betapapun pedihnya kehidupan yang menguak akibat Covid 19 ini, seharusnya muncul semangat baru yang menggelora untuk tidak terbelunggu dengan sejarah kepedihan hidup.

Keempat, I'tikaf sebagai bentuk penyerahan diri yang total kepada Allah SWT sebagai penguasa alam semesta. Memperbanyak dzikir dan istighfar dapat memunculkan kepercayaan diri bahwa dalam mengarungi kehidupan ada benteng amat tangguh yang akan melindungi. Allah SWT adalah maha menyelesaikan segala masalah maka menyerahkan diri kepada Nya adalah membalut diri dengan benteng pertahanan yang tiada terkalahkan di dunia ini. Dan, itu berarti kemampuan diri menerjuni kehidupan baru akan lebih terdorong untuk lebih berhasil.

Kelima, memperbanyak berbuat kebaikan yang implementasinya bila dilaksanakan bersamaan akan menjadi kekuatan yang maha dahsat. Tidak semua orang hidup dalam kemiskinan dan tidak semua orang ada dalam kekayaan. Namun, bukan berarti orang miskin tidak memiliki kesempatan berbuat kebaikan dan bukan berarti kebaikan hanya hak dari orang kaya. Bentuk-bentuk perbuatan kebaikan tidak dapat dihitung meskipun harus menggunakan semua ranting sebagai alat penulisnya dan semua air di lautan sebagai tintanya. Begitu banyaknya perbuatan kebaikan yang dapat dilakukan maka momentum Ramadan memberi pula peluang untuk melipat-gandakan nilai-nilai dari kebaikan itu. Jumlah orang Islam yang kaya dan berkecukupan di Indonesia ini masih jauh lebih besar dari yang miskin. Oleh karenanya, mengoptimalkan momentum Ramadan persoalan pandemi Covid 19 seharusnya mampu diselesaikan kalau hanya dengan cara stay at home selama sebulan penuh. Tidak unguin ada yang tidak makan walaupun harus berhenti sementara untuk bekerja. Nikmat Allah SWT apa lagi yang mesti didustakan sehingga untuk membantu sebahagian masyarakat kita yang terdampak parah dari pandemic Covid 19 ini

harus menelan rintihan kepedihan dan kesengsaraannya sendiri. Bukankah harta-harta itu hanyalah titipan Allah SWT semata. Tidaklah ia akan dibawa menghadap Nya kecuali amal ibadah dalam bentuk perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan atas sesama.

Kelima, bersedekah sebagai wujud dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ibnu Abbas RA berkata: Nabi (Muhammad SAW) adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Kedermawannya meningkat saat malaikat Jibril menemuinya setiap malam hingga berakhirnya bulan Ramadhan, lalu Nabi membacakan al-Quran di hadapan Jibril. Pada saat itu kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Inilah yang menjadi penekanan utama dari memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan. Kemandirian umat Islam untuk menyelesaikan cabaran kehidupan justru seharusnya muncul dari kekuatan kebersamaan umat itu sendiri. Tidak seharusnya ada likuiditas ekonomi yang menumpuk. Likuiditas dan kekayaan itu hendaklah mengalir membasahi semua kerongkongan umat. Menyuburi sanubari kebersamaan yang solid untuk mematahkan semua belenggu.

Momentum Ramadan dengan demikian seharusnya menjadi tonggak bersama untuk sama-sama keluar dari keterpurukan. Memulihkan perekonomian dengan memperbaiki kualitas kehidupan. Itu harus dikerjakan bersama. Mengoptimalkan berkah Ramadan harus dilekatkan dalam pada detak jantung dan hembusan nafas. Penguatan itu tidak hanya pada arah sisi dalam diri tetapi sangat penting untuk makin mematangkannya pada arah sisi luar keberadaannya sebagai insan ciptaan Allah SWT. Semoga...!!!

COVID-19



Bagian 4

*“Jejaring usaha inovatif harus
dikembangkan dengan
diferensiasi yang tinggi dari
waktu ke waktu sesuai dengan
dinamika pasar.”*

EKOSISTEM BISNIS DI ERA PANDEMI COVID 19

Menghadapi Pandemi Covid 19 sungguh tidak gampang. Banyak korban bertumbangan. Mereka yang terpapar ada yang bergejala dan ada yang harus dirawat sedemikian rupa, baik secara mandiri di rumah atau secara intensif di rumah sakit. Bahkan kematian pun tidak sedikit jumlahnya. Secara ekonomi, khususnya bisnis mengalami gejala serupa. Banyak perusahaan megap-megap karena kehilangan pendapatan yang sangat besar dan berkelanjutan. Bagi yang tidak mampu bertahan terpaksa gulung tikar sehingga menjadi sumber penyumbang pengangguran baru.

Namun, kehidupan tetap melahirkan dua sisi berbeda. Pandemi Covid 19 juga menciptakan nilai tambah ekonomi baru. Pada tahap awal banyak usaha yang terpuruk dan gelagapan menghadapi tantangan dinamis itu. Tahap selanjutnya, mereka-mereka yang kreatif, mulai menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan keluar dari kemelut.

Pandemi itu ternyata juga membuka peluang bagi usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan massif. Bahkan memicu rente yang tidak etis jika dikaitkan dengan kepedulian masyarakat menghadapi bencana. Masyarakat bahkan sempat

mengalami kelangkaan produk seperti masker, obat-obatan, minyak kayu putih, tabung oksigen, dan lain-lain. Bahkan obat cacung pun menjadi primadona dan diburu konsumen yang sesungguhnya tidaklah membutuhkan. Kalau pun bisa diperoleh di pasar produk-produk tersebut harus dibayar dengan harga sangat mahal.

Secara makro ada sektor yang terpuruk atau berkontraksi sangat dalam tetapi ada juga yang tumbuh meroket. Pada triwulan kedua 2021 baik Indonesia maupun dalam skala regional Riau perekonomian kembali tumbuh positif. Bahkan recovery nya sangat mencengangkan. Seolah-olah perekonomian sudah kemabali normal dan berjalan pada track yang semula. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Perekonomian tumbuh namun berubah dari paradigma yang lama ke era baru yang memiliki fitur berbeda.

Perekonomian bergerak dengan sistem yang semakin dinamis dan lentur. Iklim ekonomi baru ini mengharuskan pelaku bisnis untuk menjadi bagian dari ekosistem usaha yang dinamis. Falsafah bahwa “dalam satu bukit tidak boleh ada dua macam” sudah kurang relevan untuk diimplementasikan. Pelaku usaha harus membangun mitra bagaikan sebuah keluarga yang saling bersinergi. Basisnya bertumpu pada keterampilan masing-masing sub-sistem bisnis dan kapasitas mereka dalam meamjukan usaha bersama yang saling menguntungkan.

Jejaring usaha inovatif harus dikembangkan dengan diferensiasi yang tinggi dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika pasar.

Hanya dengan pola ekosistem bisnis seperti itu para pelaku bisnis akan mampu menciptakan multiplier effect yang kuat sehingga secara bersama mampu berhadapan dengan tantangan eksternal yang cepat dan senantiasa berubah-ubah. Hari ini konsumen menginginkan produk tertentu dengan fitur dan manfaat tertentu pula. Namun besok atau lusa mereka sudah menginginkan sesuatu produk yang berubah baik bentuk maupun fiturnya.

Di masa pandemi maupun pasca ketika pandemi ini mampu ditanggulangi tidak ada pelaku bisnis yang mampu memainkan peran sebagai srigala tunggal yang hidup di satu bukit untuk menjadi raja dan penentu. Dari perkembangan teknologi yang baru, pergeseran gaya

hidup dan budaya konsumen yang baru dunia bisnis akan menghadapi tantangan yang sama sekali baru pula. Iklim ekonomi baru ini menuntut pelaku bisnis untuk menggunakan strategi baru sebagai sub-sistem dalam sebuah ekosistem bisnis berkelanjutan dengan beberapa langkah tertentu.

Pertama, membuka cakrawala untuk keluar dari cengkaman paradigma lama. Pelaku usaha akan berhadapan dengan konsumen yang kian rewel dan serba ingin tahu akan segala hal. Mereka akan memeriksa dengan teliti siapa yang memproduksi, dari apa diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan lain sebagainya. Preferensi pelanggan senantiasa akan dikaitkan dengan keamanan mengkonsumsi dan jaminan atas kesehatan mereka ke depannya, jika mengkonsumsi suatu produk. Tidak ada lagi peluang bagi produsen untuk menutup-nutupi semua itu secara ketat jika tidak ingin ditinggalkan pelanggan. Justru melalui keterbukaan yang dapat dipercaya lah para pelanggan dapat diraih dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Kedua, senantiasa membangun kredibilitas, baik sebagai pelaku usaha terpercaya maupun sebagai pemain yang senantiasa mampu memberikan perubahan kepada tingkat kepuasan konsumen secara lebih baik. Para pelanggan tidak mau bertahan pada satu kepuasan. Mereka selalu mengeksplorasi hal-hal baru dan mencari sesuatu yang dapat memberi kepuasan lebih. Pelanggan akan mencari para pelaku usaha yang kredibel untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan itu.

Ketiga, mengembangkan road map (peta jalan) usaha yang jelas dan terukur. Mengingat persaingan bukan lagi didasarkan pada kemampuan pelaku tunggal maka peta jalan yang jelas dan terukur akan membuat mitra usaha dan pelanggan memiliki keyakinan untuk membangun ekosistem bisnis yang saling menguatkan. Ini berarti peta jalan yang disusun untuk mengembangkan usaha harus saling berkaitan dengan semua sub-sistem bisnis yang ada sehingga ia bagaikan rencana bisnis yang berjajring untuk tumbuh dan memperoleh manfaat bersama.

Keempat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki skill dan keterampilan yang dinamis. Tenaga kerja yang

terlibat harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah. Selera pelanggan tak pernah statis pada satu fitur produk dan itu harus mampu diantisipasi oleh sumberdaya manusia berkualitas. Sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah dari perubahan-perubahan cepat dan tiada henti.

Kelima, organisasi baik dari dimensi struktur maupun proses haruslah semakin lentur namun tetap memiliki standar terukur dan tegas. Kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi struktur harus mampu menghadapi perubahan-perubahan internal dan eksternal yang menerpa. Sedangkan dari dimensi proses organisasi bisnis harus tetap lentur dengan standar-standar yang jelas sehingga efisiensi dan efektivitasnya terjaga untuk memberikan pelayanan pada tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi.

Pandemi Covid 19 memang merupakan suatu cobaan serius bagi para pelaku bisnis. Berhenti berbuat untuk meratapi nasib tentunya bukan sesuatu yang dikehendaki. Masih ada sisi-sisi tertentu yang menjadi peluang untuk bertahan atau bahkan melahirkan bisnis baru yang profitable. Hanya saja, keberhasilan untuk meraupnya tidak lagi mengandalkan diferensiasi tunggal dan mandiri. Bisnis telah menjadi sebuah ekosistem yang saling berkait kelindan. Bila mampu masuk ke dalam ekosistem bisnis itu maka efeknya terhadap keuntungan dan daya tahan akan berlipat ganda. Semoga !!!.

“Dalam menyukseskan penanggulangan wabah Covid 19 ini tentunya diperlukan afirmasi kebijakan dan program yang sesuai. Tidak lagi mampu hanya sekedar himbauan. Membentuk kerja kelompok yang partisipatif akan lebih memungkinkan untuk mencapai keberhasilan yang tinggi.”

COVID 19: MENGEMAS PERAN BERKESESUAIAN

Covid 19 sudah menjejas Indonesia lebih dari setahun. Belum usai terpaan gelombang pertama dengan Varian Alpha kini menghempas pula gelombang kedua dengan merebaknya Varian Delta. Entah akan bermutasi menjadi berapa varian tidak banyak ahli yang mengkaji. Pemerintah pun belum mampu memberi informasi pasti. Ketidakpastian ke depan masih sangat tinggi dan rakyat semakin sulit diajak untuk bahu-membahu melawan pandemi yang kian menebar kematian. Berita hoaks dan silang pendapat para pakar malah membuat rakyat hilang kepercayaan. Belum lagi provokasi-provokasi busuk dan kental dengan nuansa politik picisan.

Masyarakat setiap hari disuguhi informasi banyaknya orang yang terpapar, sembuh, dan meninggal akibat Covid 19 serta kekurangan ketersediaan pelayanan di rumah-rumah sakit, kian membumbungnya harga obat dan peralatan perlindungan kesehatan. Bahkan kelangkaan oksigen di rumah sakit diduga telah menjadi pemicu bertambahnya kematian. Solusi yang diambil justru menimbulkan problema baru. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro menjadi tidak efektif karena sulitnya penerapan kebijakan tersebut dan tingginya penolakan masyarakat untuk melaksanakannya. Meskipun itu

merupakan solusi terbaik guna memutus mata rantai penularan virus Covid 19 namun konsekuensinya pada perekonomian rakyat tidak tertanggulangi dengan baik.

Pemerintah tidak mungkin menangani pandemi ini secara biasa dan sekadarnya. Refocusing anggaran yang dilakukan sebagai alat bagi pemerintah untuk memainkan peranannya dalam membantu rakyat keluar dari cengkraman Covid 19 harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat dan efisien. Program harus ditaja dalam suasana serba bergerak cepat dan tetap taat aturan. Kepatuhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab harus selalu dikedepankan meskipun semua persoalan serba mendesak untuk ditangani dan diselesaikan.

Di Pemerintah Provinsi Riau, meskipun sudah berupaya mengemban amanah negara untuk melaksanakan pembangunan melalui berbagai program yang sudah ditaja tetapi masih perlu melakukan banyak perbaikan. Sampai pada Triwulan Pertama tahun 2021 realisasi anggaran ternyata masih belum mencapai target diinginkan. Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama tahun sebelumnya maka pada tahun 2021 ini terjadi perlemahan kinerja implementasi anggaran pembangunan. Berdasarkan Laporan Perekonomian Daerah yang dirilis Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan pertama tahun 2021 realisasi belanja pemerintah Provinsi Riau baru sebesar Rp 468,75 milyar atau sekitar 5,13 persen dari pagu anggaran. Kondisi ini terkontraksi atau berkurang sampai 20,11 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal jika dilihat dari aspek pendapatan justru mengalami peningkatan. Sepanjang triwulan pertama tahun 2021 pendapatan daerah berhasil dihimpun sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Artinya dari aspek ketersediaan dana untuk melakukan program guna menstimulus upaya-upaya rakyat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kesejahteraannya masih memadai dan bahkan lebih dari cukup.

Manajemen pemerintahan menghadapi krisis dan bencana memang tidak sederhana. Semua negara mengalami bencana namun respon terhadap itu berbeda-beda. Bagi Indonesia, termasuk Riau,

banyak kendala yang dihadapi. Pertama, kelambanan dalam melakukan penyesuaian rencana dan anggaran. Tantangan untuk menyusun rencana dan penganggaran baru relatif rumit karena begitu sulitnya memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan baru dan mendesak akibat adanya penutupan sekolah, pembatasan kegiatan masyarakat, timbulnya PHK diberbagai institusi ekonomi, dan kehidupan new normal lainnya yang membutuhkan gerak cepat dan tepat.

Kedua, pertukaran sistem ke arah digitaliasi selain membutuhkan perangkat keras yang memakan biaya juga memerlukan perangkat lunak yang handal dan aman. Semua perangkat lunak harus terintegrasi agar bisa berjalan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Bila ada sub-sistem mengalami kerusakan maka akan memngganggu semua sistem. Keterlambatan pemerintah dalam menerapkan sistem digitalisasi ini menjadi sangat kentara ketika dihadapkan pada situasi bencana yang sangat membutuhkan proses serba cepat dan terukur saat ini. Untuk merubah ke sistem terintegrasi dan aman bukan sebuah pekerjaan sederhana dan pada saat yang sama bencana Covid 19 sudah makin menenggelamkan segalanya.

Ketiga, sumberdaya manusia kurang terlatih dalam menanggapi persoalan-persoalan krusial yang datang begitu cepat dan harus ditangani dalam waktu relatif singkat. Pekerja birokrasi pemerintahan sebelumnya masih terbelenggu oleh kesibukan rutinitas yang kurang inovatif. Akibatnya, kemampuan dalam mengantisipasi terpaan bencana ini seperti sedikit gelagapan. Berbagai kebijakan seakan-akan kurang sinkron satu sama lain. Bahkan masih terdapat aparatur yang meraup rente pribadi diatas penderitaan masyarakat.

Keempat, komunikasi efektif belum terselenggara dengan baik. Para pemangku kepentingan masih belum terhubung atas basis kepercayaan dan kerja bersama yang sinergis. Bahkan setiap elemen pemangku kepentingan masih saling curiga dan berimplikasi mereduksi ketercapaian program dan kebijakan penanganan bencana itu sendiri. Muncul situasi saling paradok yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap program penanganan bencana. Begitu sulitnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap

efektivitas vaksin dan malah kepercayaan masyarakat terhadap adanya pandemi Covid19 itu sendiri masih diragukan.

Kelima, stress berlebihan, baik penyelenggara maupun masyarakat telah mengakibatkan korban tidak sedikit. Dalam penanganan bencana suasana stress ini sangat sulit dihindari karena semua orang merasa dirinya terancam. Para pelaku penanggulangan di garda terdepan tentunya menghadapi tingkat stress lebih tinggi karena selain berhadapan dengan bencana itu sendiri mereka juga dibebani out-put penanganan berkualitas sebagai wujud tuntutan masyarakat dan tugas yang diembannya.

Keenam, oprasi dan rantai pasokan yang sering terputus. Baik informasi maupun bantuan-bantuan terhadap masyarakat sering mengalami kendala karena seakan-akan setiap gugus pelaksana bukan merupakan sebuah rantai nilai yang saling berkait. Mereka-merka yang bekerja pada tataran bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat tidak tersambung dengan pengambil kebijakan secara efektif. Putaran proses pada masing-masing gugus tidak seirama sehingga memacetkan putaran penanggulangan bencana secara keseluruhan. Tagihan-tagihan BPJS dari berbagai rumah sakit yang belum dibayarkan pasti akan menyulitkan rumah sakit dalam melakukan pelayanan penanggulangan bencana. Oleh karena itu mungkin terjadinya kelangkaan oksigen berpunca dari macetnya gugus-gugus terkait dalam paduan operasional secara keseluruhan.

Dalam menyukseskan penanggulangan wabah Covid 19 ini tentunya diperlukan afirmasi kebijakan dan program yang sesuai. Tidak lagi mampu hanya sekedar himbauan. Membentuk kerja kelompok yang partisipatif akan lebih memungkinkan untuk mencapai keberhasilan yang tinggi.

Cara ini tentu akan mendorong komunikasi lebih baik dan menciptakan kepercayaan tinggi bagi masyarakat. Menggesa vaksinasi menjadi upaya utama yang mempercepat penyelesaian bencana. Agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat diperlukan penanganan lebih terukur dan akurat. Berkomunikasi dan jujur dengan masyarakat sangat diperlukan untuk memperbarui pemahaman menangani situasi

COVID 19: MENGEMAS PERAN BERKESESUALAN

dan berpikir tentang risiko. Mengemas peran bersama menjadi sangat berarti ketika bencana melanda. Pekerjaan yang tidak saling bertaut suai hanya akan menghasilkan kinerja kusut masai. Ontah lah !!!

*“Tujuan utama komoditas ekspor
Riau adalah China yang
kontribusinya mencapai 18,20
persen. Komoditas utama yang
diekspor kenegara tersebut adalah
CPO sebagai turunan utama
TBS.”*

CONTINGENCY PLAN Co-VID 19 DI RIAU

Berbagai upaya penanganan dan penangkalan Corona Virus yang saat ini telah merebak ke berbagai negara telah dilansir pemerintah. Mulai dari bagaimana mencuci tangan dan sedaya-uapaya untuk tidak menyentuh muka bila tangan telah bersentuhan dengan benda lain yang dapat diduga mengandung virus tersebut. Penanggulangan dalam bidang ekonomi nampaknya belum mendapat sentuhan khusus dan terencana dengan baik. Berbeda dengan Malaysia. Dalam dinamika dan kemelut politik yang lagi memanas, Mahatir Muhammad selaku perdana menteri sementara setelah secara resmi mengundurkan diri masih merilis Paket Ekonomi 2020 sebagaiantisipasi mewabahnya viros corona yang berdampak berat bagi perekonomian. Lalu di Riau sebaiknya berbuat apa?

Dampak buruk Co-Vid 19 ini memang mulai terasa. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika ringsek seketika. Saat ini sudah menurun hingga Rp 14.530,- per dolar. Nilai terendah sejak awal tahun 2020 bahkan sejak setahun terakhir. Pelemahan mata uang terhadap dolar Amerika ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Won Korea turun sebesar 5.07 persen. Bath Thailand melorot sampai 6,42 persen, dolar Singapore turun 3,76 persen, dan Ringgit Malaysia terdepresi sebesar

2,91 persen. Resonansi Co-Vid 19 juga telah mengguncang lantai bursa. IHSG turun tajam dari 6000 menjadi 5200. Dua indikator ekonomi di atas tentunya sudah cukup memberi sinyal adanya guncangan ekonomi akibat mewabahnya virus tersebut.

Dampak lain masih berlanjut. Impor dari China pun anjlok sampai 39,6 persen. Selama ini China memasok produk-produknya ke Indonesia mencapai 27 % dari total impor Indonesia. Arab Saudi membatalkan semua jamaah umroh untuk masuk ke negaranya. Termasuk dari Indonesia yang masih menggembar-gemborkan sebagai negara yang bebas virus tersebut. Singapore Airline dan Silk Air menutup 12 penerbangan ke Indonesia.

Pengaruh terhadap perekonomian dari sengkarut Co-Vid 19 ini memang akan berbeda bagi setiap wilayah sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Bagi Riau sendiri yang perekonomiannya dari sudut pengeluaran, masih sebahagian besar dipengaruhi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dampaknya akan terasa cukup signifikan. Dorongan konsumsi rumah tangga selama ini sangat dipengaruhi oleh harga tandan buah sawit (TBS). Bila harga TBS naik maka daya beli masyarakat akan meningkat. Namun bila terjadi penurunan harga TBS maka daya beli masyarakat langsung turun dan pertumbuhan ekonomi juga akan merosot. Penurunan daya beli masyarakat ini juga akan memberi efek negative kepada sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lain yang berkait, seperti transportasi, hotel dan restoran serta jasa lainnya.

Tujuan utama komoditas ekspor Riau adalah China yang kontribusinya mencapai 18,20 persen. Komoditas utama yang diekspor kenegara tersebut adalah CPO sebagai turunan utama TBS.

India berkontribusi dalam ekspor Riau sebesar 12,11 persen dan komoditas utama yang diekspor juga CPO. Termasuk Belanda dengan kontribusi 7,05 persen dan Malaysia sebesar 5,07 persen. Bila negara-negara tersebut terpaksa membatalkan impor CPO atau bahkan paling tidak mengurangi volume ekspornya maka harga TBS akan langsung anjlok. Tanda-tanda anjloknya ekspor sawit dan turunnya harga TBS

sudah mulai terasa. Pendapatan petani sawit langsung akan melorot dan konsumsi rumah tangga dalam struktur perekonomian Riau akan terkoreksi cukup tajam. Untuk mengalihkan peran kepada sector lain juga sulit karena kendala transportasi dan pembatasan penduduk asing baik masuk maupun ke luar negeri terjadi diberbagai belahan dunia.

Ini memberi indikasi bahwa untuk tahun 2020 dan bahkan jika persoalan Co-Vid 19 ini tidak tertangani segera maka dinamika perekonomian Riau akan mengalami kemunduran. Bahkan harapan untuk memenuhi ekspor Ikan Patin sebanyak 400 ton per hari ke China sebagaimana yang sudah dilansir Gubernur Riau tentu akan menjadi pepesan kosong belaka. Perlu ada kebijakan khusus untuk menghadapinya. Sudah saatnya gubernur melakukan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota dengan melibatkan paling tidak ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Contingency Plan dalam menampak dampak Co-Vid 19 ini. Kebijakan pembangunan secara khusus harus ditelorkan agar rakyat tidak lebih sengsara. Baik kebijakan menangkal merebaknya virus tersebut maupun kebijakan ekonomi yang mungkin sama menyakitkan dari virus itu sendiri bila tak tertangani dengan baik.

Beberapa hal mungkin perlu diperhatikan. Pertama, menelusuri kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Tidak lama lagi masyarakat Islam akan menghadapi bulan puasa dan lebaran. Bila segala kebutuhan pokok tidak tersedia dengan baik dan lancer maka akan terjadi kenaikan harga yang berlipat ganda. Tanpa ada pengaruh Co-Vid 19 saja persoalan harga-harag menjelang ramadan dan lebaran senantiasa berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi perlu melakukan rapat terpadu dengan semua dinas terkait provinsi dan seluruh kabupaten/kota seperti perdagangan, perhubungan dan industri.

Kedua, mendorong kinerja yang lebih tinggi bagi sektor-sektor produksi yang dapat menghasilkan komoditas dalam jangka waktu pendek sebagai substitusi impor. Terutama sekali komoditas pangan, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, beras, jagung, dan buah-buahan. Sub-sektor peternakan dan perikanan digesa agar bisa menghasilkan

pangan mandiri dan mengurangi ketergantungan dari impor. Ketiga, memperkuat industri rumah tangga kearah produsen ekspor sebagai supplementary livelihood dan diversifikasi pendapatan masyarakat. Banyak sekali diberbagai kabupaten produksi industri rumah tangga yang layak dikembangkan dengan sentuhan teknologi dan jaringan pasar yang kuat.

Keempat, mempertajam skala prioritas program pembangunan yang telah dituangkan dalam APBD agar benar-benar memiliki sentuhan jangka pendek terhadap kesiapan daerah menanggulangi segala kemungkinan buruk dari bencana yang muncul. Terakhir, tetap menjaga terlaksananya program dengan pengawasan dan pengendalian yang akurat dan terukur sehingga efisiensi dan efektivitasnya semakin optimal.

Seperti halnya persoalan kebakaran hutan dan lahan maka kebijakan menyangkut dampak perekonomian dari persoalan Co-Vid 19 ini harus lah ditangani secara serius dan khusus. Memperebutkan kursi ketua partai boleh saja tetap berjalan karena itu diperlukan bagi penguatan politik dan implementasi kebijakan. Merespon secara dini dampak-dampak dinamika ekonomi yang terjadi baik karena faktor ekonomi itu sendiri maupun karena faktor-faktor non-ekonomi, juga sangat urgen dilakukan agar rakyat tidak hanya menerima bencana dan dampak-dampaknya. Co-Vid 19 menjalar begitu cepat dan massif. Kerusakan ekonomi yang ditimbulkannya juga menjalar secepat penularan virus itu sendiri. Jadi, janganlah sampai lengah. Ontah lah...!!!

LINGKUNGAN HIDUP



Bagian 5

“...Namun persoalan seriusnya justru terletak dari ancaman masa depan rakyat Riau. Penduduk usia 0 s/d 19 tahun yang diterpa jerabu asap itu ternyata menghadapi dua ancaman serius, yakni kesehatan fisik dan tekanan mental...”





TRAGEDI ASAP

Sejak tahun 2000 Riau telah setiap tahun masyarakat Riau diterpa tragedi asap. Paling tidak satu bulan lamanya pada musim kemarau rakyat disesaki jerabu. Berulang-ulang persoalan asap ini terjadi dan bahkan merasuk pula ke negara tetangga. Negara dibuat malu oleh terganggunya masyarakat Malaysia dan Singapura oleh ekspor asap Indonesia, khususnya dari Riau. Artinya, asap akibat kebakaran hutan ini bukan lagi sekedar peristiwa biasa. Selain berkait dengan rancunya kebijakan dan pengelolaan sumberdaya alam permasalahannya telah merembes pada martabat dan marwah bangsa.

Dalam pidatonya saat melantik gubernur dan wakil gubernur Riau Mendagri malah menyindir bahwa tragedi asap ini tidaklah dapat dianggap bencana karena kejadiannya telah berulang-ulang. Bencana tidak terjadi dalam bentuk yang sama secara berulang. Karenanya Mendagri berpesan agar ada solusi yang komprehensif dan terencana dengan baik menanggulangi persoalan asap di Riau.

Jika ditilik dari proses kejadian munculnya asap bisa saja Mendagri berpendapat bahwa hal itu bukanlah sebuah bencana. Setiap tahun senantiasa terjadi musim kemarau. Hutan alam Riau sudah punah ranah oleh pembukaan perkebunan maupun HTI. Tinggal lagi

tanah gambut yang sangat rentan terhadap api pada musim kering. Para pemburu rente, baik berkelompok, perseorangan maupun dalam bentuk institusi perusahaan berlomba-lomba membuat kebun sawit. Sepintas, usaha perkebunan ini memang sangat menjanjikan secara ekonomi. Karena itu, berbagai cara ditempuh untuk menggarap lahan bagi perkebunan kelapa sawit. Dan dengan cara membakar dalam proses pembuatannya merupakan tehnik yang paling efisien bagi pengelola perkebunan. Walaupun menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar cara ini lebih menguntungkan untuk dilaksanakan.

Jika terpaan jerabu bukan merupakan bencana sehingga pemerintah pusat belum perlu cepat tanggap atau mengambil kebijakan tanggap darurat untuk menanganinya maka dampak dari tragedi ini mestinya diperhitungkan untuk tidak dianggap hal yang sederhana. Kabut asap sudah terjadi berkali-kali sejak tahun 2000 dan durasinya hampir mencapai satu bulan setiap kejadian itu muncul. Jika saat ini terdapat 2.414.241 jiwa penduduk Riau yang berusia 0 s/d 19 tahun maka dampak tragedi asap ini tentunya tidak dapat dipandang sebagai hal yang sederhana. Menganggap persoalan asap bukan merupakan bencana tentulah sangat menyakitkan bagi masyarakat Riau dan bagi Riau masa depan.

Pada setiap saat kejadian rerata terdapat lebih kurang 31.000 orang yang terserang ISPA. Secara ekonomi kejadian ini telah pula mengganggu penerbangan dan arus lalu lintas barang dan jasa.

Namun persoalan seriusnya justru terletak dari ancaman masa depan rakyat Riau. Penduduk usia 0 s/d 19 tahun yang diterpa jerabu asap itu ternyata menghadapi dua ancaman serius, yakni kesehatan fisik dan tekanan mental.

Asap yang dihisap ternyata mengandung partikel-partikel yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bila terhirup dalam jangka waktu lama dan berulang-ulang dapat menimbulkan ancaman penyakit kanker. Pada sisi lain paru-paru akan menghirup udara yang kurang mengandung oksigen yang sehat sehingga dengan sendirinya pasokan oksigen ke otak juga akan berkurang. Pada gilirannya hal ini dapat menimbulkan lemahnya kerja otak pada usia dini. Dampak ini

tentunya sangat serius karena Riau bisa kebanjiran generasi yang kurang sehat baik mental maupun fisik dimasa yang akan datang.

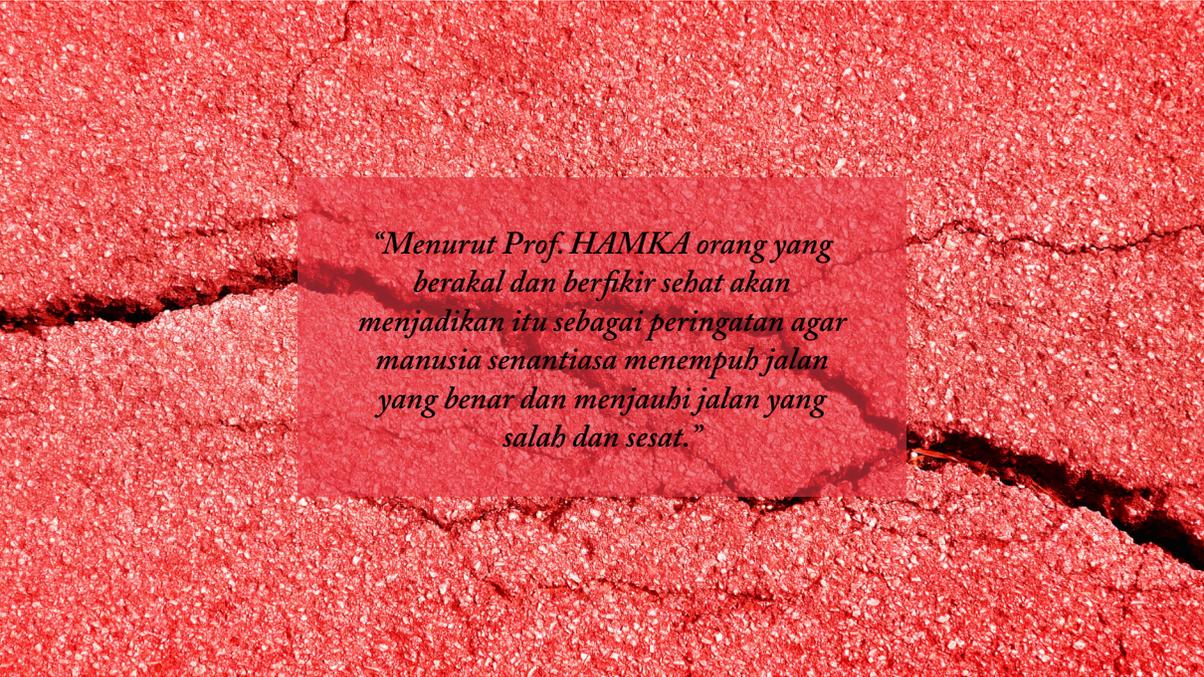
Pada setiap tragedi asap para siswa juga selalu diliburkan karena dianggap berbahaya bagi mereka untuk keluar rumah. Persoalan ini ternyata tidak sederhana. Bukan berarti dengan libur dari sekolah para siswa tersebut hanya berdiam diri di rumah. Lebih banyak mereka memanfaatkan libur sejkolah tersebut justru dengan bermain kesana kemari tanpa tujuan yang jelas dan tetap berada di luar rumah. Orang tua banyak yang kurang mampu untuk mengawasi sesuai dengan kesibukan pekerjaan mereka masing-masing. Pada akhirnya tujuan meliburkan para siswa dari sekolah untuk menghindari mereka dari cengkraman jerabu asap malah semakin menambah keterbelengguannya dalam kabut asap.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tragedi asap ini dalam jangka panjang maka penting kiranya dianggap sebagai bencana luar biasa bagi rakyat. Penanganannya tidak bisa bersifat temporer dan sporadis. Tragedi asap bukan sekedar memantau titik api dan memadamkannya. Lahan-lahan Riau sangat sensitif terhadap hawa panas dan suhu di Riau memang tergolong tinggi di musim kemarau. Untuk itu perlu ada antisipasi sejak dini agar kebakaran lahan dan hutan tidak menimbulkan dampak asap yang besar. Manajemen kelembagaan menghadapi masalah asap harus ditumbuhkan mulai dari level rakyat terbawah. Pemerintah harus membangun jaringan kelembagaan pada setiap segmen masyarakat secara hrizontal dan setiap level pemerintahan. Pola kerjanya harus lebih partisipatif, baik dari segi tugas, fungsi, kewenangan dan dana.

Khusus dengan proses belajar mengajar dan masalah-masalah kesehatan yang diperkirakan muncul antisipasinya harus dilakukan sejak dini. Sosialisasi penanggulangan tragedi asap harus dilakukan secara berkesinambungan dan sekolah-sekolah harus mengubah suai suasana dan kondisinya pada upaya-upaya menanggulangi kabut asap. Pemerintah harus berfikir untuk mampu menyediakan penyaring udara di setiap kelas bila terjadi bencana asap. Penanganannya tentu tidak hanya sekedar memberikan masker kepada para siswa. Disamping

suasana sekolah yang tanggap asap berbagai peralatan untuk itu juga harus disediakan.

Sudah lebih 13 tahun lamanya bencana ini terjadi secara berulang. Kedepan tetap akan sulit untuk menanggulangnya bila tidak dilakukan secara komprehensif. Pendekatannya bukan sekedar memadamkan api tetapi bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan secara baik. Penanggulangan dampaknya bukan sekedar terapi jangka pendek tetapi mencegah terjadinya masyarakat Riau yang memiliki keterbatasan mental dan fisik dalam jangka panjang sangatlah urgen dan mendesak. Asap walaupun bukan bencana tetapi dampaknya terhadap masa depan anak jati Riau adalah bencana yang berkesinambungan dan tiada terperikan sakitnya. Jangan biarkan Riau dijejali oleh orang-orang yang berkekurangan fisik dan mental 10 atau 20 tahun mendatang hanya karena menganggap sepele tragedi jerabu yang terjadi berulang-ulang ini. Semoga !

The background of the image is a close-up of red asphalt pavement, showing several deep, dark cracks that run across the surface. The texture of the asphalt is granular and uneven. In the center of the image, there is a semi-transparent, reddish-brown rectangular box containing a quote in Indonesian. The text is centered within the box and is written in a black, serif font.

“Menurut Prof. HAMKA orang yang berakal dan berfikir sehat akan menjadikan itu sebagai peringatan agar manusia senantiasa menempuh jalan yang benar dan menjauhi jalan yang salah dan sesat.”

PERINGATAN DARI SMS PASCA GEMPA

Selang beberapa hari setelah terjadi gempa di Sumatera Barat banyak keprihatinan yang mendera. Sahabat-sahabat kita berjuang merengkah maut dan ada diantaranya yang lolos tapi begitu banyak yang harus menumpuh ajal. Harta benda berhamburan tak berguna dan mereka yang masih hidup bergantung pada bantuan-bantuan yang berdatangan dari berbagai penjurur yang simpati. Ini adalah bentuk kepedulian sesama yang harus tetap dipupuk dan dihidupkan secara kian membesar. Solidaritas adalah hal penting untuk saling meringankan beban.

Dalam pada itu, entah apa dasarnya beredar pula SMS pada berbagai handphone yang secara gamblang mengaitkan peristiwa gempa dari aspek waktu kejadian dengan ayat-ayat Al-Quran yang memberi peringatan pada manusia untuk berfikir. Bunyi SMS tersebut adalah "Gempa terjadi tanggal 30 bulan 9 (lihat surat 30 ayat 9), gempa di Padang terjadi pukul 17:16 (lihat Qs, al-Israa 17:16) kemudian gempa susulan terjadi pada pukul 17:38 (lihat Qs, al-Israa, 17:38) gempa di Jambi terjadi pada pukul 8:52 (lihat Qs,al-Anfal, 8:52) harap dibaca dan direnungkan, semoga kita termasuk orang-orang yang berfikir. Sebarkan SMS ini kesmua yang kamu kenal". Sebagai orang

yang mau dan selalu berfikir ada baiknya menelaah dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Namun untuk menyebarkan SMS tersebut tentu harus berfikir panjang bila tidak memahami makna dan tujuan SMS tersebut. Mungkin lebih baik ikut memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagai upaya mencari pahala dan mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana disebutkan maka dalam surat Ar-Rum, ayat 9 (QS 30:9) Allah berfirman: “*Awalam yasiiruu fil ardhi fayanzhuruu kaifa kaana ‘aaqibatul ladziina min qablihim, kaanuu asyadda minhum quwwtan-wa atsaarul ardhi, wa ‘amaruuhhaa aktsara mimmaa ‘amaruuhhaa wajaa-at-hum rusulhum bilbayyinaat(i), fama kaanal laahu liyazhlimahum walaakin kaanuu anfusahum yazhlimuun(a)*”. Arti dari ayat ini adalah: “Apakah mereka tidak berjalan dimuka bumi, lalu memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita oleh) orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari pada mereka dan telah mengolah bumi dan memakmurkannya lebih banyak dari pada apa yang mereka memakmurkannya. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan (membawa) bukti-bukti nyata. Maka tidaklah Allah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri”. Dalam Tafsir Al-Azhar yang ditulis Prof. HAMKA dinyatakan bahwa bahagian awal ayat ini menganduk maksud untuk menyuruh manusia yang kurang percaya itu agar menyalangkan matanya, menyaringkan telinga, lihatlah dan dengarlah tentang manusia-manusia yang telah berlalu didalam sejarah betapa akhir kesudahan nasib orang yang tidak mau percaya. Manusia supaya mengambil i'tibar dan perbandingan dari kaum-kaum yang telah musnah karena congkak, sombong, ingkar dan tidak mau percaya. Pada bagian akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidaklah menganiaya manusia. Azab Allah yang datang tiba-tiba, dan tiada harta benda yang banyak itu dapat menolong atau anak pinak yang dapat mempertahankan, hanyalah karena diri mereka sendiri. Mereka sendirilah yang telah aniaya kepada diri mereka sendiri. Mereka terlalu bangga dan pongah dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka tanpa memperhatikan peringatan-peringatan yang telah Allah

berikan sebelumnya yang Allah sampaikan melalui Rasul-rasul yang telah diutus-Nya.

Menurut Prof. HAMKA orang yang berakal dan berfikir sehat akan menjadikan itu sebagai peringatan agar manusia senantiasa menempuh jalan yang benar dan menjaubi jalan yang salah dan sesat.

Sedangkan dalam Buku Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 hal 358 diuraikan bahwa betapa pun kuatnya umat manusia sejak dulunya tidaklah ada yang mampu menahan azab Allah. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Sebab itulah Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Allah tidak berbuat zhalim, kezhaliman itu berasal dari mereka sendiri dimana mereka mendustakan ayat-ayat Allah serta menghinakannya.

Sedangkan dalam Surat Al-Isra'ia', ayat 16 (QS 17:16) Allah berfirman: "Wa idzaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mtrafihaa fafasaquu fiihaa fahaqqa 'alaih al qaulu fadamarnaahaa tadmiiraa (n)". Arti dari ayat ini adalah: "Dan apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah (untuk mentaati Allah), tetapi mereka durhaka di dalam negeri itu, maka sepantasnyalah berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), maka Kami hancurkannya (negeri itu) sehancur-hancurnya". Dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis Prof. HAMKA pada hal 34-35 diuraikan bahwa pada bahagian awal ayat ini ditunjukkan Allah betapa kekayaan dan kemewahan dapat meruntuhkan sebuah negeri. Allah memerintahkan kepada pemimpin atau orang yang berkuasa di dalam suatu negeri untuk menggunakan kekuasaan mereka seluas-luasnya bagi perbaikan (ishlah) tetapi ternyata dengan kekuasaan itu mereka menjadi mabuk dan tidak lagi terkendali oleh Iman. Mereka bukannya melakukan perbaikan tetapi malah berbuat maksiat dan memelopori pendurhakaan kepada Allah. Setelah itu Allah melanjutkan "Lantaran itu patutlah turun ke atas mereka azab, maka Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya". Ayat ini mengingatkan manusia bahwa kekuasaan adalah percobaan paling hebat dalam jiwa manusia sehingga bila tidak ada kontrol dan apabila yang berkuasa telah berbuat semau-

maunya, lupa daratan, gila kuasa maka kehancuran akan mengancam negeri dimana ia berkuasa. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi kehancuran itu. Dalam Tafsir Ibnu Katsir halaman 147-148 dijelaskan bahwa meskipun terdapat berbagai penafsiran tentang bacaan “Kami perintahkan” dalam ayat 16 Surat Al-Israa’ ini namun makna utamanya adalah datangnya azab Allah pada suatu negeri yang dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mendurhakai Allah dan atau banyaknya masyarakat yang telah diberi kemewahan oleh Allah dalam suatu negeri tetapi mereka justru malah mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keji dan perbuatan jahat serta tipu daya. Dan karena itulah Allah membinasakan mereka dengan azab.

Selanjutnya dalam Surat Al-Israa’ ayat 38 (QS 17:38) firman Allah berbunyi: “Kulu dzalika kaana sayyi-uhuu ‘inda rabbika makruuhaa”. Arti ayat ini adalah: “Semua kejahatannya itu amat dibenci di sisi Rabb-mu”. Menengarai ayat ini Tafsir Ibnu Katsir pada hal 165-166 menekankan pada bacaan sayyi-uhu atau sayyi-atun dimana Allah sangat melarang perbuatan keji dan Allah sangat membenci dan bahkan akan memberikan hukuman atasnya. Allah sama sekali tidak menyukai dan meridhai perbuatan keji itu. Sedangkan Prof. HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar yang disusunnya menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah itu antara lain ; mendurhakai ibu-bapa dan berkata kasar kepadanya, membuang-buang harta (mubazzir), boros ataupun bakhil, mendekati kepada zina, membunuh anak-anak karena takut miskin, mendekati harta anak yatim, kecurangan berniaga, melalaikan janji, menurut-nurut saja tanpa berfikir dan sombong. Semua itu adalah kejahatan kepada Allah dan amat dibenci-Nya.

Akhirnya, pada Surat Al-Anfaal ayat 52 (QS 8:52) Allah menegaskan: “Kada’bi aali fir’aun(a), walladziina min qablihim, kafaruu bi aayaatillaahi fa-akhadzahumul laahu bidzunuubihim, innal laaha qawiiyun syadiidul ‘iqaab(i)”. Arti dari ayat ini adalah: “(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir’aun bersama pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, (karena itu) maka Allah menyiksa

mereka dengan (sebab) dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya”. Dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 halaman 65 diuraikan bahwa ayat ini menegaskan betapa Allah Maha Kuat, Maha perkasa dan Maha Menetapkan sehingga Ia mampu memberikan siksaan yang teramat pedih terhadap umat manusia sejak dahulunya, termasuk Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada seorang vpun yang bisa mengalahkan Allah sejak kapan pun dan sampai kapan pun. Namun Allah memberikan siksaan yang keras hanyalah akibat ulah umat manusia itu sendiri yang mendustakan Allah dan kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dosa-dosa manusialah yang menyebabkan siksaan Allah itu berlaku sehingga manusia menjadi binasa dan tersiksa. Prof. HAMKA dalam tafsirnya menguraikan bahwa Allah tidaklah akan menghukum orang yang tidak bersalah karena Allah mustahil melakukan kezaliman. Semua diazab Allah adalah karena kesalahan manusia sendiri. Segala hukum dan siksaan yang diterima manusia adalah setimpal dengan kesalahan dan kekufuran yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia tidak mampu dan tidak akan pernah mampu menangkis kekuatan Allah. Sebagaimana dikisahkan Prof.HAMKA; “Laksana pasir terhampar ditepi pantai, ombakpun datang bergulung, maka si pasir halus itu yang di atas boleh dikebawahkan dan yang di bawah dapat dikeataskan sambil dipermain-mainkan oleh ombak itu seketika naiknya dan turunnya. Begitulah kita makhluk dihadapan Tuhan. Diri kita sendiripun tidak mempunyai kekuatan buat menangkis perputaran hari dan pergantian malam; dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua. Di dunia ini tidak ada kekuatan kita buat menangkis kekuatan Allah, apatah lagi di akhirat. Hanya ketika hidup inilah kita membekali diri agar yang kita dapatkan di akhirat kelak adalah syurga yang mulia. Bila tidak maka ganjarannya adalah api neraka jahannam. Tergantung kita memilih jalan mana yang akan kita tempuh , sekarang dan sampai akhir hidup kita.

Hal yang dapat dipetik dari ayat-ayat tersebut adalah betapa kerdil dan kecilnya manusia dihadapan Tuhan Allah Seru Sekalian Alam. Oleh karenanya janganlah nikmat Allah yang telah dilimpahkan Allah

digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah. Nikmat-nikmat itu dapat saja Allah hapuskan dengan sesaat belaka, tanpa dapat kita lawan dan tangkis sama sekali. Manakala manusia mendapat nikmat hendaklah ia sadar sesungguhnya itu adalah pemberian Allah tanpa harus sombong, meninggikan diri, mendustai bahwa itu dari Allah atau bahkan menggunakannya pada jalan yang dimurkai Allah. Azab yang pedih akan dirasakan manusia akibat perbuatan-perbuatannya. Allah tidak zhalim. Hanya manusialah yang membuat siksaan-siksaan bagi dirinya sendiri dari apa-apa yang diperbuatnya di atas dunia. Cara keluar dari semua persoalan itu adalah tetap berserah diri kepada Allah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Agar bisa mengimplementasikan semua itu maka manusia wajib mempelajari Al_Quran sehingga jalan hidupnya dan semua perilakunya di atas dunia dapat sejalan dengan kehendak Allah semata. Lebih penting dari itu adalah tidak menggunakan ayat-ayat Al_Quran untuk kepentingan-kepentingan yang justru diluar dari apa yang diajarkan dalam Al_Quran tersebut. Insyallah...!!!!

TEKNOLOGI



Bagian 6

*“Perkembangan teknologi,
komunikasi dan sistem informasi
dalam dunia yang “tidak
kampungan” membuat orang
mampu memperluas jaringan
persahabatan dan kekerabatan
tanpa memandang suku bangsa,
agama dan tempat dimana
mereka dilahirkan.”*

KAMPUNGAN

Dalam bahasa gaul anak-anak muda kata kampungan dimaksudkan untuk menggambarkan seseorang yang sudah ketinggalan teknologi. Begitu pesatnya perkembangan zaman sehingga orang bisa saja tak mampu mengikutinya. Arus percaturan global menjadikan dunia seakan tanpa batas dan derasnya informasi yang mengalir ke setiap pelosok bumi menuntut orang merespon serba cepat tepat dan terukur. Tidak ada lagi kesempatan untuk memenangkan persaingan bagi orang-orang yang nyaman pada satu keunggulan. Orang akan sukses bila mampu melompat dari satu keunggulan ke keunggulan baru yang lebih mutakhir dan mendahului apa yang dapat dilakukan pesaingnya.

Kampungan juga digambarkan pada orang yang berperilaku tertutup dan mengisolasi diri. Semakin tak nyaman seseorang terhadap tekanan-tekanan eksternal maka semakin kikuk atau salah tingkah orang tersebut dihadapan lingkungannya. Ia akan mencoba mencari cara untuk membentengi diri agar tetap ada dalam keterisolasian itu secara kaku. Mereka menjadi sulit bergaul dan memiliki jaringan yang terbatas akibat kurangnya komunikasi yang baik dengan sesama dan alam sekitarnya. Dunia tanpa batas saat ini memang tidak mungkin diarungi tanpa kemampuan komunikasi yang lancar, baik dalam bahasa

verbal, tulisan maupun melalui berbagai jejaring sosial yang marak belakangan ini. Tak bisa facebook, twitter, BBM dan berbagai media jaringan sosial lainnya akan membuat seseorang menjadi termangu-mangu dan kurang pergaulan.

Perkembangan teknologi, komunikasi dan sistem informasi dalam dunia yang “tidak kampung” membuat orang mampu memperluas jaringan persahabatan dan kekerabatan tanpa memandang suku bangsa, agama dan tempat dimana mereka dilahirkan.

Seorang ustad dan penceramah agama dikampung sekalipun dapat mengakses berbagai informasi melalui Gadget mereka sehingga mampu menambah khasanah ceramah agama yang uraikannya. Seorang anak kampung sekalipun saat ini tidak perlu lagi merasa dibatasi oleh jarak dan waktu untuk dapat memiliki kenalan dan sahabat dari berbagai manca negara. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Mereka larut dalam chatting dan bahkan dapat membangun impian bersama walaupun secara lahiriah mereka belum sedetikpun berjumpa (copy darat). Intinya, anak yang tinggal dikampung atau siapa saja yang bermukim di pelosok kampung tidak dapat dikatakan kampungan bila ia telah mampu menembus batas-batas demografi. Mencabik sekat dan belenggu ruang hidup. Baru mendapat prediket kampungan bila seseorang hanya tau lingkup disekitar jangkauannya dan tertinggal dari pengetahuan dan segala “ganak-ginik” yang disajikan media informasi. Cap kampungan akan makin melekat bila ia tak sedikit pun mengerti mempergunakan teknologi yang demikian kencang perubahannya.

Dewasa ini memang tidak gampang larut dalam kemajuan teknologi dan bila itu tidak dibarengi oleh integritas diri maka orang yang tidak kampungan pun belum tentu akan menjadi manusia baik. Tergerus oleh arus informasi dan terkikis oleh kemajuan-kemajuan teknologi akan membuat seseorang justru makin kecil dalam pusran global. Ia akan menciut akibat lalu-lintas komunikasi yang kian tak terhentikan. Hanya bau yang tak bisa dipindahkan oleh teknologi dan segala peralatan komunikasi yang saat ini. Warna, suara dan gerak-gerak sudah dapat berpindah pada saat yang sama akibat kecanggihan

teknologi. Pidato apapun dan tarian yang sege mulai apa pun dapat dinikmati diberbagai sudut ruang dan ujung tasik melalui kemampuan jaringan komunikasi dan teknologi.

Dalam suasana yang serba instan dan smoothing itulah, akhirnya persetujuan antar umat manusia sudah berubah dari seputar perut dan tambak kepada adu kecepatan, kepiawaian dan kualitas. Tak ada lagi pertinjuan. Tak nampak lagi persengketaan. Kalau hanya menyangkut soal tapal batas dan rasa lapar. Dibatasi tembok setebal apapun satu dengan lainnya dengan gampang dapat bercengkrama dan bersenggama dalam dunia mayanya. Setinggi apapun dinding pembatas satu sama lain masih bisa beradu argumentasi untuk menunjukkan jati dirinya masing-masing. Bagi yang pandai menggunakan teknologi ia akan kian kencang berlari tanpa harus kehilangan identitas. Bagi yang mampu memainkan sistem komunikasi ia akan trangkai dengan jaringan global tanpa harus menguras budaya dan integritas kebangsaannya. Ia tetap menjadi orang kampung dan nyaman berada dalam ceruk kampung tetapi tidak menjadi kampungan.

Khasanah global dan jejaring sosial yang demikian luas tentu menimbulkan tantangan untuk tetap waspada menjadi orang kampung yang tak kampungan dengan keterampilan yang mampu dipertandingkan. Sangat aneh bin ajaib dalam dunia seperti itu di Indonesia masih ada orang yang bertikai antar kampung dan batas teritorial. Bentrok antara Satpol PP Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu di lapangan menjadi sangat menggelitik ulu hati. Apalagi bentrokan itu dipicu oleh batas-batas wilayah dan kedudukan kampung. Tak dapat dipungkiri pula bahwa bentrokan tersebut juga memunculkan nuansa benturan politik antar bupati kedua kabupaten tersebut. Dalam dunia tanpa batas dan arus yang mengalir deras saat ini di Riau ternyata masih ada runding yang tak terselesaikan dan sengketa yang tak tertuntaskan hanya menyangkut batas-batas administrasi pemerintahan. Inilah gambaran anak kampung yang pada akhirnya dapat disebut menjadi kampungan.

Jika berkunjung ke Hongkong ada baiknya kedua bupati dan

Satpol PP tersebut diajak untuk menyaksikan bagaimana masyarakat Hongkong bermukim di Shenzen hanya untuk menghindari tingginya biaya sewa apartement di Hongkong. Setiap pagi dan sore ribuan anak-anak Hongkong yang bertempat tinggal di Shenzen pulang balik untuk bersekolah ke Hongkong. Alasan mereka hanya karena rumah lebih murah sewanya di Shenzen dan sekolah lebih baik di Hongkong. Tak ada lagi perseteruan antar kampung. Semua bisa berbagi peran dengan baik dan terukur. Masyarakat tidak saling serang karena orang Hongkong tinggal di shenzen dan orang Shenzen bersekolah di Hongkong. Mereka bersahabat karena mereka berkerabat. Mereka berkomunikasi untuk mengejar mimpi menjadi baik dan terpilih.

Tidak mungkin ada pertikaian jika sekam tak berapi. Oleh karenanya kesadaran akan masa depan yang lebih baik harus dikedepankan untuk membuat kebijakan pembangunan. Memperalat rakyat untuk menunjukkan dominansi kekuasaan sangat disayangkan dalam dunia yang kian luber dari pengkotakan wilayah. Memanipulasi kegiatan hanya untuk memamerkan kepedulian dan menumbuhkan perselisihan sangatlah memalukan ditengah-tengah peradaban dunia yang kian cair oleh arus pergerakan global. Sudah saatnya ego kedaerahan tidak dibangun untuk mempersempit ruang dan jangkauan berfikir. Batas administrasi wilayah pemerintahan hanyalah alat berbagi peran untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Bupati bukanlah raja-raja kecil yang harus saling serang untuk sebuah patok desa. Budaya rakyat tak mungkin dikapling-kapling dengan ruang dan tempat bermukim. Kebudayaan menjelma dari interaksi antar sesama. Kemampuan menjaga asimilasinya agar tidak keluar dari identitas dan integritas kelayakan tak mungkin berhasil baik bila didasarkan pada keinginan mengisolasi diri dan bergaya kampungan. Semoga kita makin sadar bahwa kemajuan yang ingin dicapai tanpa kehilangan jati diri hanya lah dengan kerelaan dan ke mampuan mengantisipasi perubahan berbalutkan nilai-nilai kekerabatan. Insya Allah....!